



Katalog: 4401002

STATISTIK KRIMINAL 2021



BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTIK KRIMINAL 2021



BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTIK KRIMINAL 2021

ISSN: 2089-5291

Nomor Publikasi: 04300.2111

Katalog: 4401002

Ukuran Buku: 17.6 x 25 cm

Jumlah Halaman: xxvi + 220 halaman

Naskah:

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Penyunting:

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Desain Kover:

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial

Penerbit:

© Badan Pusat Statistik

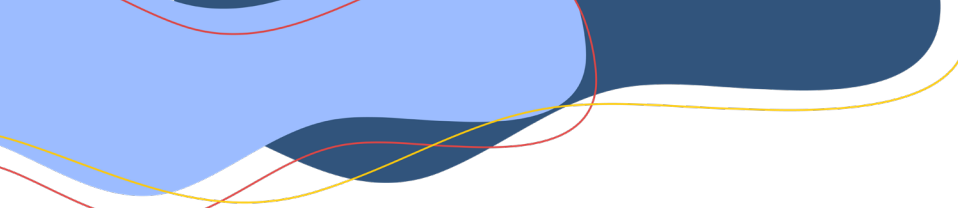
Pencetak:

Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi:

freepik.com, flaticon.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



Kata Pengantar

Statistik kriminal merupakan salah satu aspek kunci yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas pariwisata dan ekonomi. Statistik kriminal yang *valid*, *reliable*, dan *sustainable* akan bermanfaat bagi berbagai pihak.

Publikasi Statistik Kriminal 2021 merupakan publikasi yang diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan data kriminalitas di Indonesia antar waktu. Penerbitan publikasi ini akan sangat bermanfaat untuk memonitor pelaksanaan, perkembangan, dan pencapaian program-program pembangunan, khususnya dalam bidang keamanan.

Data yang disajikan pada publikasi ini berasal dari tiga sumber, yaitu data registrasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan data yang dikumpulkan oleh BPS yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Pendataan Potensi Desa (Podes) yang dihasilkan BPS. Ketiga jenis data tersebut tidak dapat secara langsung dibandingkan karena cara pendekatan pengumpulan data yang berbeda, tetapi bisa saling melengkapi (komplementer).

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan sehingga publikasi ini dapat diterbitkan. Semoga data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini dapat bermanfaat khususnya bagi para pengambil keputusan sebagai acuan atau rujukan dalam rangka penyusunan arah dan kebijakan pembangunan nasional terutama pembangunan diperbaiki publikasi di masa mendatang.

Jakarta, November 2021
Kepala Badan Pusat Statistik



Margo Yuwono

Ringkasan Eksekutif

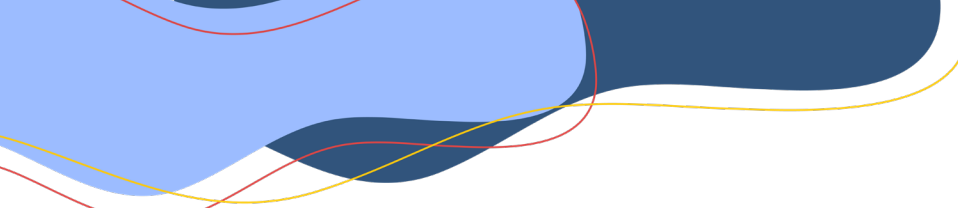
Publikasi Statistik Kriminal 2021 menyampaikan gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Ketersediaan data ini bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan hukum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Informasi yang disajikan mencakup tiga pendekatan utama statistik kriminal, yakni pendekatan pelaku (Data Registrasi Kepolisian), korban (Data Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas), dan kewilayahan (Pendataan Potensi Desa/Podes). Data registrasi Polri mencatat bahwa selama periode tahun 2018–2020 jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung menurun. Jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada 2018 sebanyak 294.281 kejadian. Angka ini menurun menjadi sebanyak 269.324 kejadian pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi 247.218 kejadian.

Indikator tingkat kejahatan (*crime rate*) selama periode tahun 2018–2020 juga mengalami penurunan, pada tahun 2018 adalah sebesar 113, menjadi 103 pada tahun 2019, dan menurun menjadi 94 pada tahun 2020. Selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*) adalah sebesar 00.01'47" (1 menit 47 detik) pada tahun 2018 dan menjadi sebesar 00.01'57" (1 menit 57 detik) pada tahun 2019 dan 00.02'07" (2 menit 07 detik) pada tahun 2020. Interval *crime clock* yang semakin panjang menunjukkan intensitas kejadian tindak kejahatan yang semakin menurun.

Data survei menggambarkan persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan selama periode tahun 2019–2020 juga memperlihatkan pola yang sama dengan data registrasi, yaitu cenderung menurun. Persentase penduduk korban kejahatan mengalami penurunan dari 1,01 persen pada tahun 2019 menjadi 0,78 persen pada tahun 2020. Sementara itu, tingkat pelaporan ke polisi (*police report rate*) setiap tahun masih relatif rendah. Pada periode 2019–2020, persentase penduduk Indonesia yang mengalami kejadian kejahatan kemudian melaporkannya ke polisi tidak lebih dari 25 persen. Pada tahun 2020 persentasenya sebesar 23,46 persen, sedikit mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 (22,19 persen).

Selain data kejadian kejahatan yang bersumber data dengan pendekatan individu, kejadian kejahatan dapat dilihat berdasarkan ruang lingkup kewilayahan dengan berbasis desa. Berdasarkan pendataan Potensi Desa, selama periode 2011–2018, jenis kejadian pencurian merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi pada desa/kelurahan di Indonesia, jumlahnya mencapai lebih dari 36–45 persen dari seluruh desa/kelurahan.



Executive Summary

The 2021 Criminal Statistics Publication provides a macro-overview of the current security situation and condition, also its developments over the past few years. The availability of this data is beneficial as a basis for sectoral development planning in security and law fields to improve public welfare.

The information presented includes three main approaches, namely the perpetrator's approach (Police Registration Data), the victims' approach (National Socio-Economic Survey/Susenas), and the regional approach (Village Potential Data/Podes). Police Registration Data records that during 2018-2020, the number of crimes or criminal acts in Indonesia tended to decrease. The number of crime incidents (total crime) in 2018 was 294,281 incidents. This number decreased to 269,324 incidents in 2019 and 247,218 incidents in 2020.

The crime rate indicator during 2018-2020 also slightly declined. It was 113 in 2018, 103 in 2019, and kept decreasing to 94 in 2020. The time interval between the occurrence of a crime (crime clock) was 00.01'47" (1 minute 47 seconds) in 2018, 00.01'57" (1 minute 57 seconds) in 2019, and became longer to 00.02'07" (2 minutes 07 seconds) in 2020. The longer time interval shows the lower intensity of the crime.

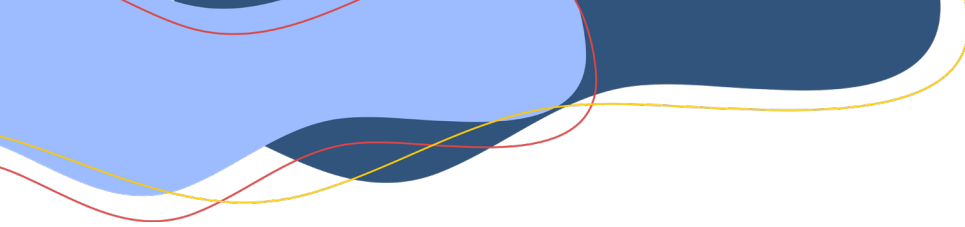
The survey data describing the percentage of the population who became victims of crime during the 2019-2020 period also showed the same declining pattern as the registration data. The percentage of crime victims had dropped from 1.01 percent in 2019 to 0.78 percent in 2020. Meanwhile, the annual police report rate was still relatively low. In 2019-2020, the percentage of crime victims who reported the incident to the police was less than 25 percent. It was 23.46 percent in 2020, showing a slight increase compared to 2019 (22.19 percent).

In addition to data on crime incidents from an individual approach, crime incidents can also be seen based on the regional scope (village-based). Based on the Village Potential data, during the 2011-2018 period, theft was the most common crime in villages/kelurahan in Indonesia, reaching more than 36-45 percent of all villages/kelurahan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Ringkasan Eksekutif	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Tabel	xvii
Bab 1 Pendahuluan	1
Latar Belakang	3
Maksud dan Tujuan	4
Ruang Lingkup	4
Sistematika Penyajian	5
Bab 2 Kejadian Kejahatan	7
Angka Kejahatan Nasional	9
Angka Kejahatan Menurut Polda/Provinsi	10
Angka Kejahatan Berdasarkan Klasifikasi	13
Kejahatan Terhadap Nyawa	14
Kejahatan Terhadap Fisik/Badan	16

Kejahatan Terhadap Kesusilaan	19
Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang	21
Kejahatan Terhadap Hak/milik dengan Penggunaan Kekerasan	23
Kejahatan Terhadap Hak/milik tanpa Penggunaan Kekerasan.....	25
Kejahatan Terkait Narkotika	27
Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi	29
Gambaran Kejadian Kejahatan Secara Kewilayahan	31
Konflik Massal	38
Upaya Menjaga Keamanan	43
Bab 3 Korban Kejahatan	47
Penduduk Korban Kejahatan	49
Tingkat Pelaporan kepada Polisi	55
Bab 4 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Terkait Keamanan	61
Daftar Pustaka	73
Catatan Teknis	79
Jenis dan Sumber Data	81



Konsep dan Definisi	83
Penjelasan Teknis	86
Lampiran	87
Penghitungan <i>Sampling Error</i>	201

<https://www.bps.go.id>

Daftar Gambar

II. KEJADIAN KEJAHATAN

2.1	Jumlah Kejahatan dan Tingkat Risiko Kejahatan, 2018–2020	10
2.2	Jumlah Kejahatan yang dilaporkan Menurut Polda/Provinsi, 2020	11
2.3	Tingkat Risiko Terkena Kejahatan Menurut Polda/Provinsi, 2020 ..	12
2.4	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa, 2016–2020	15
2.5	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa Menurut Polda/ Provinsi, 2020	16
2.6	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan, 2016–2020	17
2.7	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan Menurut Polda/ Provinsi, 2020	18
2.8	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan, 2016–2020	19
2.9	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan Menurut Polda, 2020	20
2.10	Jumlah Kejadian dan Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, 2016–2020	21
2.11	Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Menurut Polda/Provinsi, 2020	22
2.12	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan, 2016 – 2020	23

2.13	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan Menurut Polda/Provinsi, 2020	24
2.14	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik Tanpa Penggunaan Kekerasan, 2016–2020	25
2.15	Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik Tanpa Penggunaan Kekerasan Menurut Polda/Provinsi, 2020	26
2.16	Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika, 2016 – 2020	27
2.17	Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika Menurut Polda/Provinsi, 2020	28
2.18	Jumlah Kejadian Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi, 2016–2020	29
2.19	Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi Menurut Polda/Provinsi, 2020	30
2.20	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, 2011, 2014, dan 2018	31
2.21	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018	32
2.22	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018	33
2.23	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018	34

2.24	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian (Tanpa Kekerasan) Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018	35
2.25	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018 ...	36
2.26	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018	38
2.27	Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal, 2011, 2014, dan 2018	39
2.28	Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Tipenya, 2014 dan 2018	40
2.29	Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Penyelesaiannya, 2014 dan 2018	41
2.30	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi, 2018	42
2.31	Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi, 2018	43
2.32	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2011, 2014, dan 2018	44
2.33	Persentase Desa/Kelurahan yang terdapat Pos Polisi Menurut Provinsi, 2018	45

2.34	Persentase Desa/Kelurahan Tidak Memiliki Pos Polisi Menurut Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat, 2018	46
------	--	----

III. KORBAN KEJAHATAN

3.1	Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan, 2019-2020	47
3.2	Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kejahatan yang Dialami, 2019-2020	48
3.3	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin, 2019-2020	51
3.4	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Umur, 2019-2020	52
3.5	Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Provinsi, 2019-2020	53
3.6	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan jenis Kelamin dan Provinsi, 2020	54
3.7	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Umur dan Provinsi, 2020	55
3.8	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi, 2019-2020	56
3.9	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Berdasarkan Provinsi, 2019-2020	57

3.10	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi dan Mendapatkan/Ditemani Bantuan Hukum, 2019-2020 ..	58
3.11	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi dan Mendapatkan/Ditemani Bantuan Hukum Berdasarkan Provinsi, 2019-2020	59

IV. INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs) TERKAIT KEAMANAN

4.1	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir, 2016–2020	66
4.2	Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, 2020	67
4.3	Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan kepada Polisi, 2016–2020	68
4.4	Perkembangan IPAK, 2012–2021	70
4.5	Persentase Masyarakat yang Pernah Berurusan dengan Layanan Publik dan Mengeluarkan Uang/Barang/Fasilitas Melebihi Ketentuan, 2020-2021	71
4.6	Persentase Masyarakat Pelaku Usaha yang Pernah Berurusan dengan Layanan Publik dan Mengeluarkan Uang/Barang/Fasilitas Melebihi Ketentuan, 2020-2021	72

Daftar Tabel

II. KEJADIAN KEJAHATAN

Sumber Data: Kepolisian RI

2.1.1	Indikator Kriminalitas Nasional, 2018-2020	90
2.1.2	Peringkat Polda Menurut Jumlah Kejahatan dan Risiko Penduduk Terkena Kejahatan, 2020	91
2.1.3	Jumlah Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2018-2020	92
2.1.4	Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan Menurut Kepolisian Daerah, 2018-2020	93
2.1.5	Persentase Penyelesaian Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2018-2020	94
2.1.6	Selang Waktu Terjadinya Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2018-2020	95

Sumber Data: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

2.1.7	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk Menurut Kepolisian Daerah, 2018-2020	96
2.1.8	Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok Jenis Kejahatan, 2018-2020	97
2.1.9	Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok/Jenis Kejahatan dan Bulan, 2020	98

2.1.10	Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2018	102
2.1.11	Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2019	108
2.1.12	Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2020	114

Sumber Data: Potensi Desa

2.2.1	Jumlah Desa/Kelurahan, 2011, 2014, dan 2018	122
2.2.2	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Mengalami Kejadian Tindak Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Tindak Kejahatan, 2011, 2014, dan 2018	123
2.2.3	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018	124
2.2.4	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018	125
2.2.5	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018	126
2.2.6	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018	127
2.2.7	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018	128

2.2.8	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018	129
2.2.9	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018	130
2.2.10	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018	131
2.2.11	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018	132
2.2.12	Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018	133
2.2.13	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018	134
2.2.14	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018	135
2.2.15	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018	136
2.2.16	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018	137

2.2.17	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018	138
2.2.18	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018	139
2.2.19	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018	140
2.2.20	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018	141
2.2.21	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018	142
2.2.22	Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018	143

Sumber Data: Potensi Desa

2.3.1	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia Menurut Beberapa Karakteristik Perkelahian Massal yang Terjadi, 2011, 2014, dan 2018	146
2.3.2	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018	147
2.3.3	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal	

	Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, Tahun 2011	148
2.3.4	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2014	150
2.3.5	Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2018	152
2.3.6	Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2011	154
2.3.7	Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2014	156
2.3.8	Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2018	158
2.3.9	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal dan Mampu Menyelesaikannya Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018	160

Sumber Data: Potensi Desa

2.4.1	Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2011, 2014, dan 2018	162
2.4.2	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2011	163

2.4.3	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2014	164
2.4.4	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2018	165
2.4.5	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2011	166
2.4.6	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2014	167
2.4.7	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2018	168
2.4.8	Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membangun Pos Keamanan Lingkungan Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018	169
2.4.9	Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membentuk Regu Keamanan Lingkungan Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018	170
2.4.10	Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Menambah Anggota Hansip/Linmas Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018	171
2.4.11	Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Memeriksa Setiap Warga Luar Desa yang Masuk (Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan*) Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018	172
2.4.12	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2014	173

2.4.13	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2018	174
2.4.14	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2014	175
2.4.15	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2018	176

III. KORBAN KEJAHATAN

Sumber Data: Survei Sosial Ekonomi Nasional

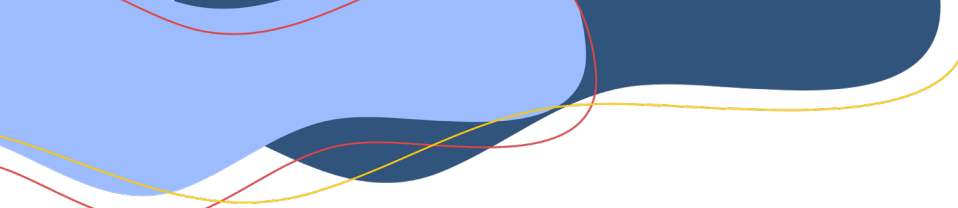
3.1.1	Persentase Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kejahatan yang Dialami, 2019-2020	178
3.1.2	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2019-2020	179
3.1.3	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin, 2019-2020	180
3.1.4	Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Menurut Kelompok Umur, 2019-2020	181
3.1.5	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2019-2020	182
3.1.6	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Penganiayaan Menurut Provinsi, 2019-2020	183
3.1.7	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Menurut Provinsi, 2019-2020	184
3.1.8	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pelecehan Seksual dengan Kekerasan Menurut Provinsi, 2019-2020	185

3.1.9	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Lainnya Menurut Provinsi, 2019-2020	186
3.1.10	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, 2019-2020	187
3.1.11	Persentase Penduduk yang Pernah Melapor dan Mendapatkan/ Ditemani Bantuan Hukum Menurut Provinsi, 2020.....	188
3.1.12	Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melapor ke Polisi Menurut Jenis Kejahatan dan Provinsi, 2020	189

IV. INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs) TERKAIT KEAMANAN

Sumber Data: Survei Sosial Ekonomi Nasional

4.1.1	Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, 2020	192
4.1.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Kekhawatiran Ketika Melakukan Perjalanan dari dan Menuju Tempat Kerja/Aktivitas Menurut Provinsi, 2020	193
4.1.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Kekhawatiran Ketika Meninggalkan Rumah dalam Keadaan Tidak Berpenghuni Menurut Provinsi, 2020	194
5.1.1	Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir, 2019-2020	195
5.1.2	Proporsi Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, 2020	196
5.1.3	Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan kepada Polisi, 2019-2020	197



SAMPLING ERROR

6.1.1	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Laki-laki yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2020	203
6.1.2	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Perempuan yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2020	205
6.1.3	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2020	207
6.1.4	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Laki-laki yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2020 ..	209
6.1.5	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Perempuan yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2020 ..	211
6.1.6	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2020	213
6.1.7	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Laki-laki yang Pernah Melaporkan Kejadian Kejahatan Menurut Provinsi, 2020	215
6.1.8	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk Perempuan yang Pernah Melaporkan Kejadian Kejahatan Menurut Provinsi, 2020	217
6.1.9	<i>Sampling Error</i> Persentase Penduduk yang Pernah Melaporkan Kejadian Kejahatan Menurut Provinsi, 2020	219

PENDAHULUAN

Penulisan publikasi Statistik Kriminal 2021 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik kriminal secara berkala dan berkesinambungan





<https://www.bps.go.id>



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Data statistik kriminal merupakan salah satu aspek kunci yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas pariwisata dan ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Data statistik kriminal yang *valid*, *reliable*, dan *sustainable* akan bermanfaat bagi berbagai pihak. Selain stabilitas politik, aspek keamanan merupakan salah satu faktor penting bagi investor untuk berinvestasi pada suatu wilayah. Kondisi keamanan yang baik, akan menciptakan iklim investasi yang baik, dan sebaliknya. Kemudian, faktor keamanan juga membuat masyarakat umum menjadi lebih tertarik untuk melakukan kunjungan wisata ke wilayah tertentu, dan sebaliknya. Oleh karena itu, ketersediaan data kriminal sangat diperlukan. Ketersediaan data ini juga sangat bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Data statistik kriminal akan menjadi tolok ukur dan acuan publik dalam menilai tingkat keamanan suatu wilayah. Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia (Maslow, 1943), rasa aman berada pada tingkatan yang kedua di bawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting.



Maksud dan Tujuan

Publikasi Statistik Kriminal 2021 ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan data statistik kriminal secara berkala dan berkesinambungan. Ketersediaan data ini bermanfaat sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Statistik dan data kriminal juga dibutuhkan dalam level internasional yakni pemenuhan data *United Nations Surveys on Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems* (UN-CTS) untuk *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), serta pemenuhan indikator SDGs, khususnya *Goal 16* terkait dengan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Tujuan penyusunan publikasi ini adalah dalam rangka memperoleh gambaran secara makro mengenai situasi dan kondisi keamanan masyarakat terkini serta perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Secara khusus, penyusunan publikasi ini juga ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian kejahatan, pelaku kejahatan, dan korban kejahatan yang terjadi di Indonesia.

Ruang Lingkup

Publikasi ini menyajikan gambaran kejadian kejahatan, pelaku kejahatan, dan korban kejahatan yang terjadi di Indonesia, baik pada level provinsi maupun level nasional. Khusus untuk data yang bersumber dari Mabes Polri disajikan menurut wilayah/daerah Kepolisian (Polda) dan nasional.

Sesuai dengan ketersediaan data, untuk keseluruhan statistik dan indikator mengenai kejadian tindak kejahatan, pelaku kejahatan, dan korban kejahatan disajikan selama tiga tahun terakhir berturut-turut, yaitu tahun 2018, 2019, dan 2020. Untuk keseluruhan statistik dan indikator bersumber dari Potensi Desa disajikan selama tiga periode terakhir, yaitu tahun 2011, 2014, dan 2018.

Sistematika Penulisan

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam beberapa bagian (Bab) yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

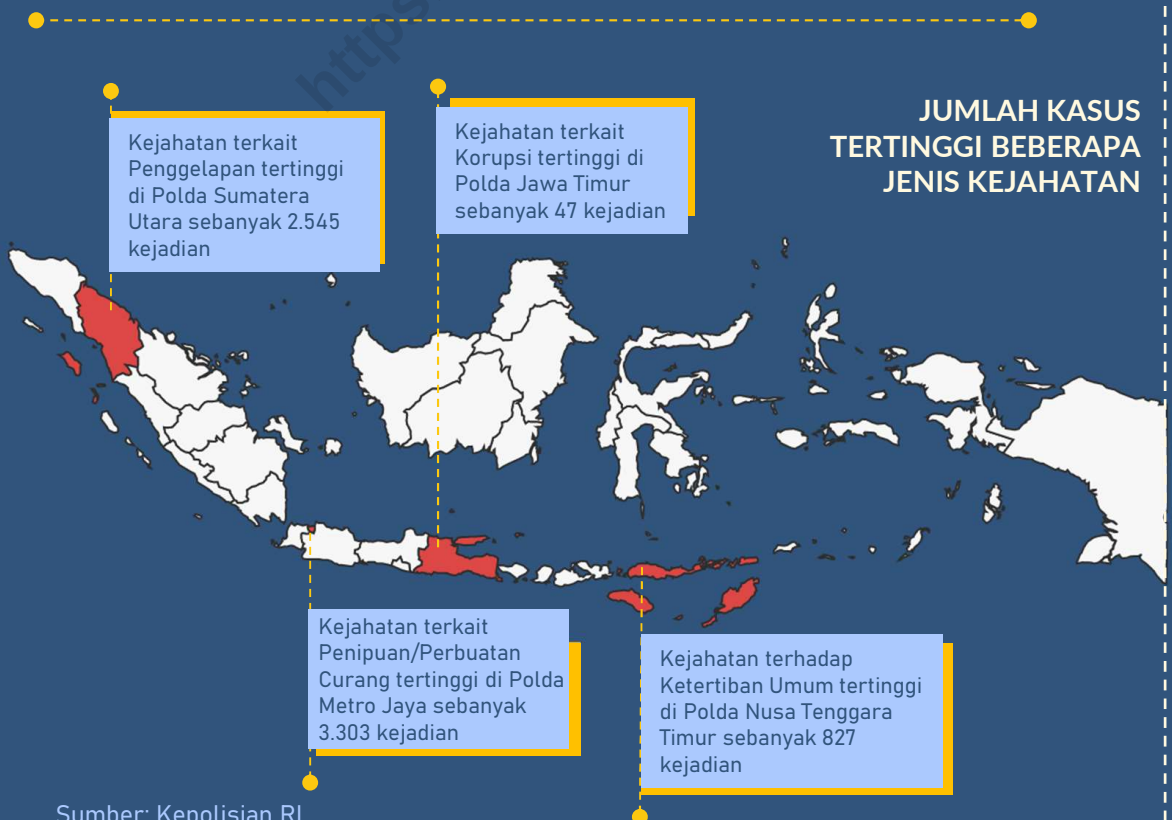
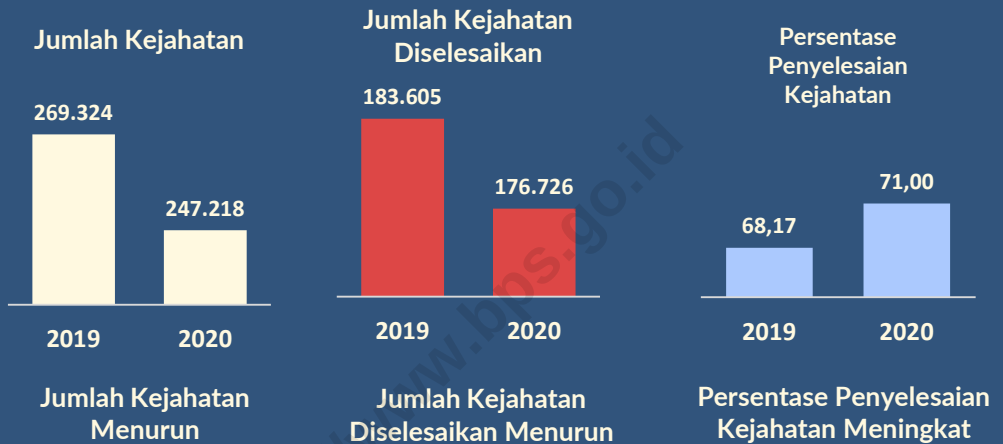
- Bab I menjelaskan latar belakang dan tujuan penyusunan publikasi.
- Bab II menyajikan gambaran umum dan perkembangan kejadian kejahatan termasuk kejadian kejahatan berdasarkan data polisi dan gambaran kejadian kejahatan dan konflik secara kewilayahan bersumber dari Podes.
- Bab III menyajikan data korban kejahatan berdasarkan karakteristik demografi dan sosial ekonomi.
- Bab IV menyajikan data yang merupakan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terkait keamanan.
- Catatan teknis menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini, meliputi jenis dan sumber data, konsep/definisi, dan penjelasan mengenai statistik/indikator yang disajikan.
- Bagian terakhir merupakan daftar pustaka dan tabel lampiran.



<https://www.bps.go.id>



02 KEJADIAN KEJAHATAN





<https://www.bps.go.id>



BAB II

Kejadian Kejahatan

Angka Kejahatan Nasional

Statistik kriminal terdapat beberapa indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan dari sisi makro dan tingkat keseriusan. Dalam konteks makro terdapat indikator angka jumlah kejahatan (*crime total*), angka kejahatan per 100.000 penduduk (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*). Dalam konteks makro, menurut Savitz (Savitz, 1978) perlu kehati-hatian dalam memaknai angka kejahatan karena merupakan agregat semua jenis kejahatan yang terjadi dalam satu waktu tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya.

Gambar 2.1, data Polri memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2018 sebanyak 294.281 kejadian, menurun menjadi sebanyak 269.324 kejadian pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 247.218 kejadian. Selama periode tahun 2018–2020, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Indonesia cenderung fluktuatif.

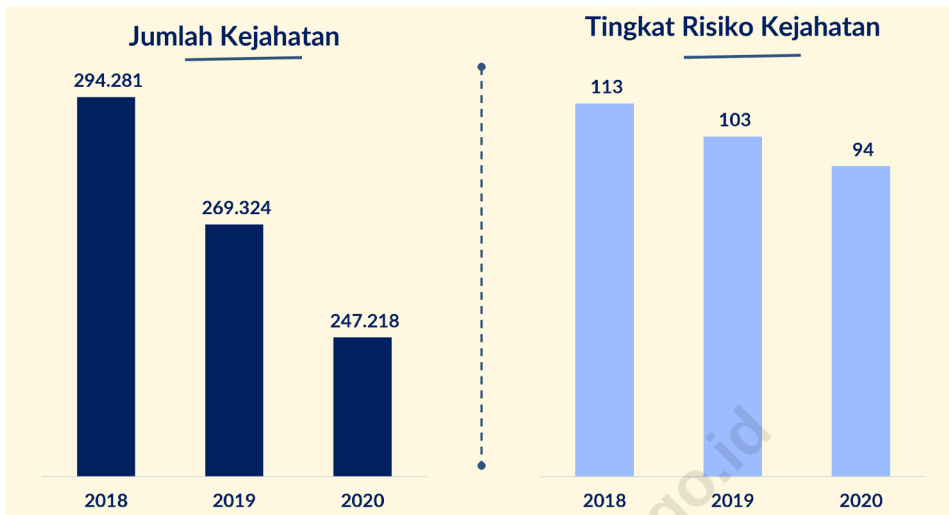
Crime rate merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu wilayah tertentu dalam waktu tertentu. Semakin tinggi angka *crime rate* maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi pula, dan sebaliknya. Selama periode tahun 2018–2020, tingkat resiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk juga mengalami penurunan, pada tahun 2020 sebesar 94. Angka ini menurun dari 113 pada tahun 2018 dan 103 pada tahun 2019.



Pada tahun 2020, rasio kejadian kejahatan per 100.000 penduduk sebesar 94 turun dari 103 (2019) artinya tingkat kejahatan semakin menurun



Gambar 2.1. Jumlah Kejahatan dan Tingkat Risiko Kejahatan, 2018 – 2020



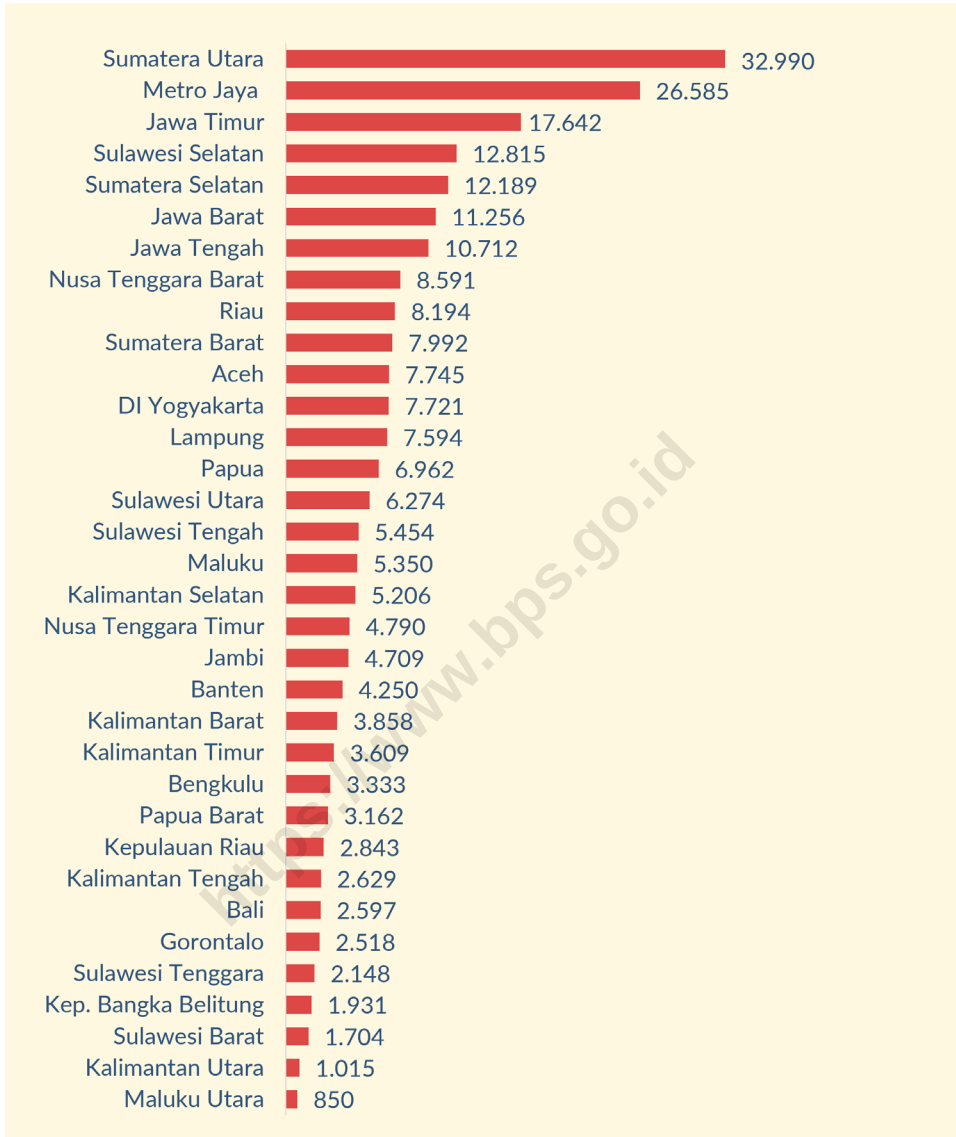
Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Indikator-indikator kriminalitas lainnya selama periode 2018-2020 juga menunjukkan pola perkembangan yang serupa. Selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*) 00.01'47" (1 menit 47 detik) pada tahun 2018 dan menjadi sebesar 00.01'57" (1 menit 57 detik) pada tahun 2019. Kemudian intervalnya menjadi semakin panjang pada tahun 2020 menjadi sebesar 00.02'07" (2 menit 07 detik). Interval waktu yang semakin panjang menunjukkan intensitas kejadian tindak kejahatan yang semakin menurun dan sebaliknya.

Angka Kejahatan Menurut Polda/Provinsi

Berdasarkan jumlah kejahatan untuk level Polda/Provinsi selama tahun 2020 Polda Sumatera Utara mencatat jumlah kejahatan terbanyak (32.990 kejadian), disusul oleh Polda Metro Jaya (DKI Jakarta dan sekitarnya) (26.585 kejadian), dan Polda Jawa Timur (17.642 kejadian). Sementara itu, Polda Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara, merupakan tiga wilayah dengan jumlah kejahatan paling sedikit dengan jumlah kejadian kejahatan berturut-turut sebanyak 1.704; 1.015; dan 850 (Gambar 2.2).

Gambar 2.2. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Polda/Provinsi, 2020



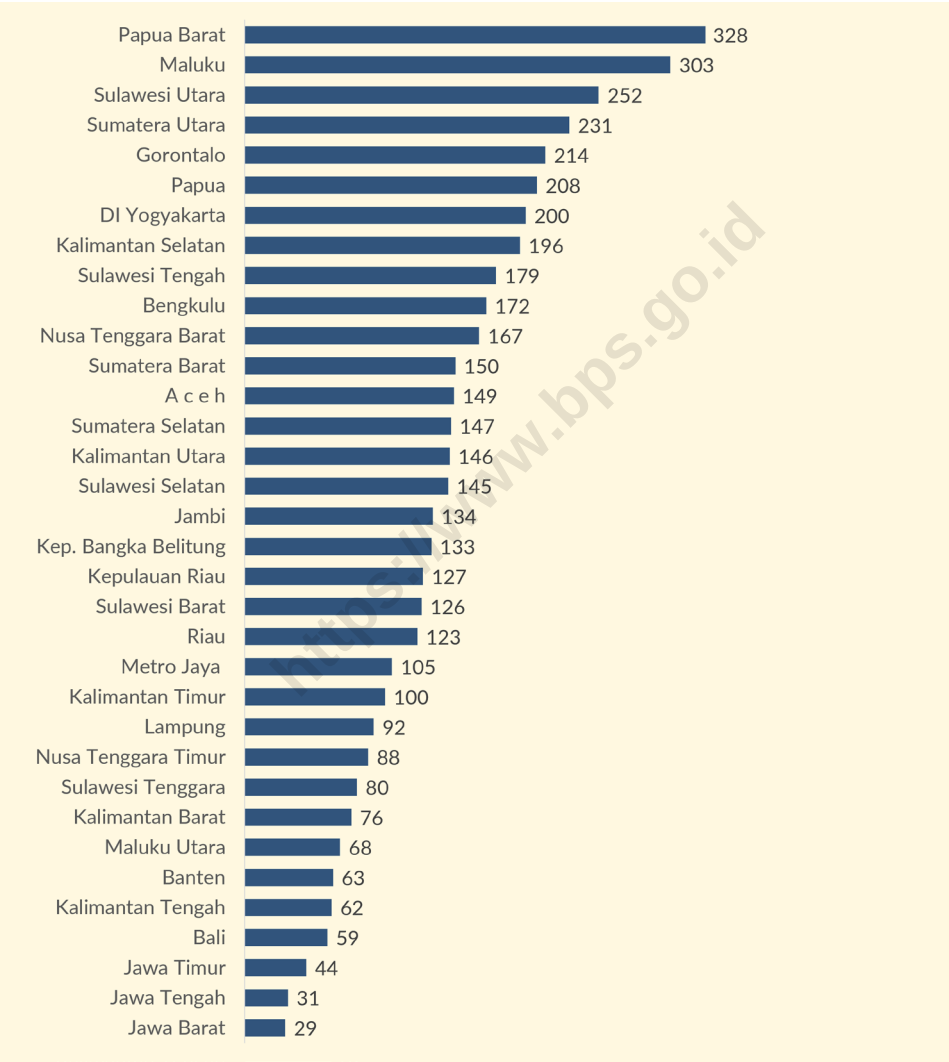
Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Polda Jawa Timur termasuk kategori lima terbesar dari sisi jumlah kejadian (*crime total*), tetapi dari sisi tingkat kejahatan (*crime rate*) termasuk kelompok lima terendah. Hal ini tentu karena pengaruh jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur yang besar. Terkait *crime rate*, Polda Papua Barat mencatat tingkat kejahatan tertinggi yakni 328 (setiap 100.000 penduduk), disusul oleh Polda Maluku (303) dan Sulawesi Utara (252).



Pada tahun 2020, dua wilayah Polda dengan tingkat resiko kejahatan (*crime rate*) tertinggi adalah Papua Barat dan Maluku

Gambar 2.3. Tingkat Risiko Terkena Kejahatan Menurut Polda/Provinsi, 2020



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Angka Kejahatan Berdasarkan Klasifikasi

Angka kejahatan tersebut dapat lebih bermanfaat khususnya dalam menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan tingkat kerawanan suatu wilayah apabila dilihat secara lebih detail. Jumlah kejahatan (*crime total*) dan tingkat risiko terkena kejahatan (*crime rate*) hanya menggambarkan peristiwa kejahatan secara makro dan umum. Angka ini belum menggambarkan tingkat resiko dan keseriusan kejahatan yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, publikasi ini mengelompokkan jenis kejahatan berdasarkan beberapa kriteria, yakni:

1. Target dari kejadian kejahatan (orang, harta benda, ketertiban umum, negara, dan sebagainya).
2. Tingkat keseriusan kejahatan (kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap hak milik/barang, dan sebagainya).
3. Bagaimana kejahatan tersebut dilakukan (kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan, kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan, dan sebagainya).

Hal ini secara umum sejalan dengan pengelompokan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia dan *The International Classification of Crime for Statistical Purposes* (ICCS) yang digagas Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNODC (*United Nation Office on Drugs and Crime*) (UNODC, 2015).



Jenis Kejahatan dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat keseriusan maupun targetnya (objek)



Berikut klasifikasi kejahatan yang terdapat di dalam publikasi ini :

No	Klasifikasi Kejahatan	Jenis Kejahatan
1	Kejahatan terhadap Nyawa	-Pembunuhan
2	Kejahatan terhadap Fisik/ Badan	-Penganiayaan Berat -Penganiayaan Ringan -Kekerasan dalam Rumah Tangga
3	Kejahatan terhadap Kesusilaan	-Perkosaan -Pencabulan
4	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	-Penculikan -Mempekerjakan Anak di Bawah Umur
5	Kejahatan terhadap Hak Milik/ Barang dengan Penggunaan Kekerasan	-Pencurian dengan Kekerasan -Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api (Senpi) -Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam (Sajam)
6	Kejahatan terhadap Hak Milik/ Barang	-Pencurian -Pencurian dengan pemberatan -Pencurian Kendaraan Bermotor -Pengrusakan/Penghancuran Barang -Pembakaran dengan Sengaja -Penadahan
7	Kejahatan Terkait Narkotika	-Narkotika dan Psikotropika
8	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan dan Korupsi	-Penipuan/Perbuatan Curang -Penggelapan -Korupsi
9	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	-Terhadap Ketertiban Umum

Sumber: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia dan *The International Classification of Crime for Statistical Purposes* (ICCS)

Kejahatan Terhadap Nyawa

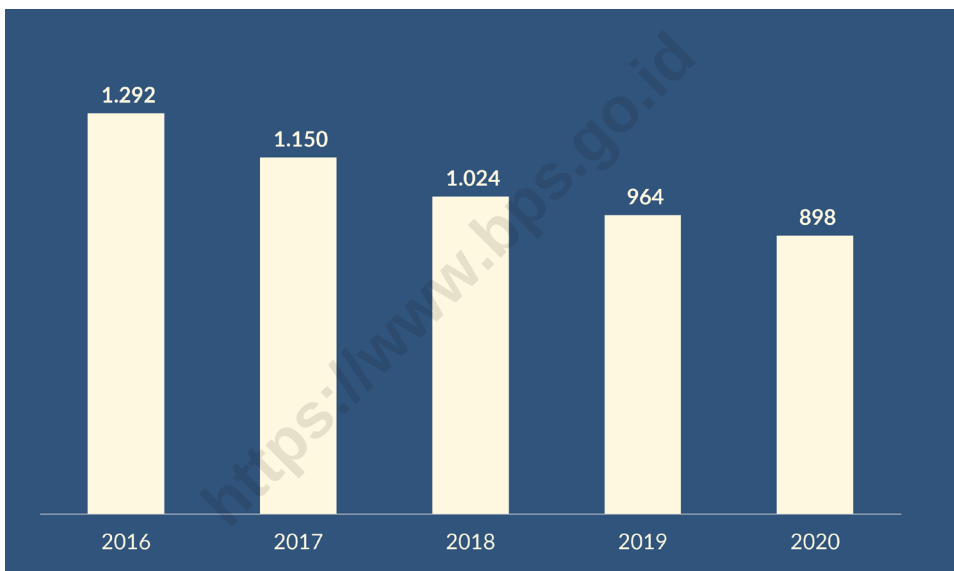
Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan/*Homicide*) merupakan salah satu kejahatan yang paling tinggi hierarkinya dalam klasifikasi kejahatan internasional, selain itu dari sisi hukuman juga yang paling berat hukumannya dalam KUHP Indonesia.



**Pada tahun 2020, jumlah
kejadian kejahatan terhadap
nyawa (pembunuhan) di
Indonesia menurun**

Periode lima tahun terakhir, jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa (pembunuhan) di Indonesia fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Gambar 2.4 memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa pada tahun 2016 hingga 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016 tercatat ada 1.292 kejadian (tertinggi pada kurun waktu lima tahun terakhir). Angka ini menurun pada tahun 2017 menjadi 1.150 kejadian, tahun 2018 menjadi 1.024 kejadian, tahun 2019 menjadi 964 kejadian dan turun kembali pada tahun 2020 menjadi 898 kejadian (jumlah kejadian tidak mencerminkan jumlah korban karena pada satu kejadian bisa jadi lebih dari satu orang).

Gambar 2.4. Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa, 2016 – 2020

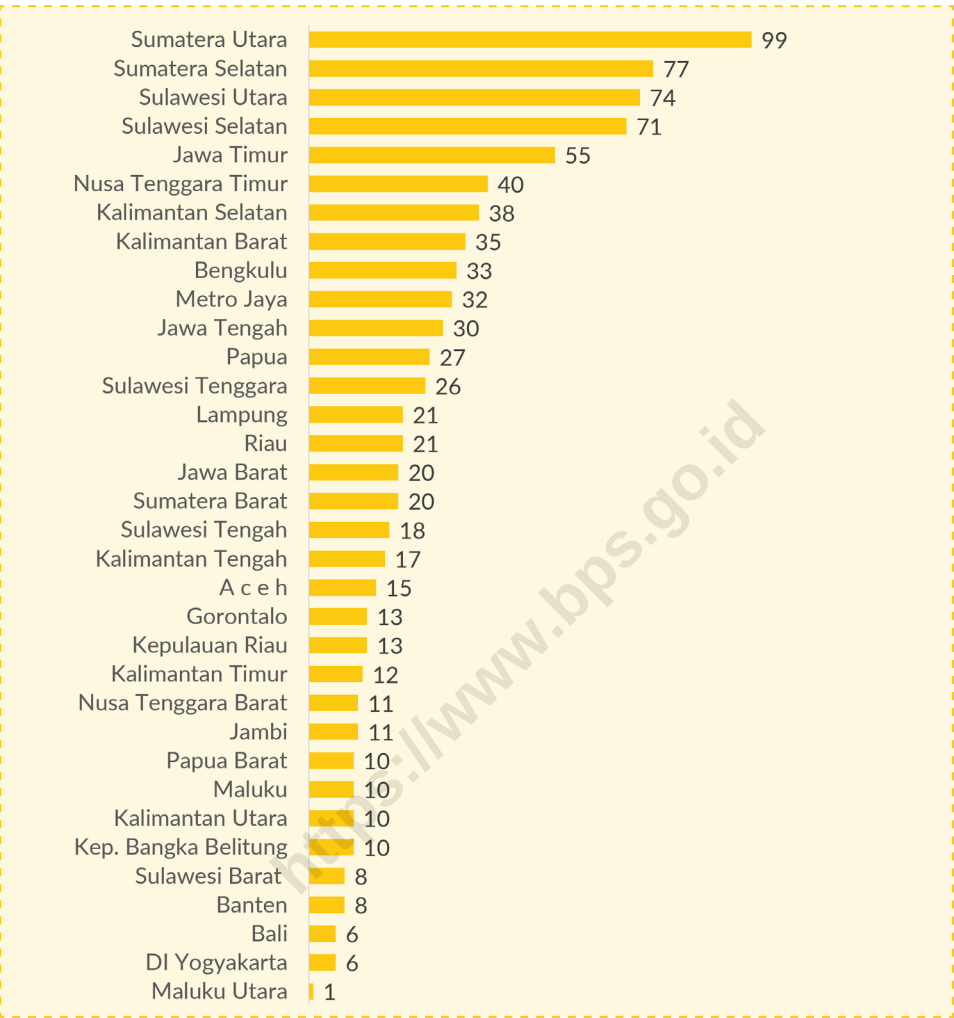


Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Berdasarkan Gambar 2.5 dapat dilihat bahwa tiga Polda yang memiliki jumlah kejadian kejahatan terhadap nyawa terbesar adalah Polda Sumatera Utara (99 kejadian), Sumatera Selatan (77 kejadian), dan Sulawesi Utara (74 kejadian). Wilayah dengan jumlah kejadian paling sedikit terdapat di Maluku Utara dengan jumlah kejadian sebanyak satu kejadian, diikuti oleh DI Yogyakarta dan Bali dengan jumlah kejadian yang sama masing-masing sebanyak enam kejadian.



Gambar 2.5. Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Nyawa Menurut Polda/
Provinsi, 2020



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

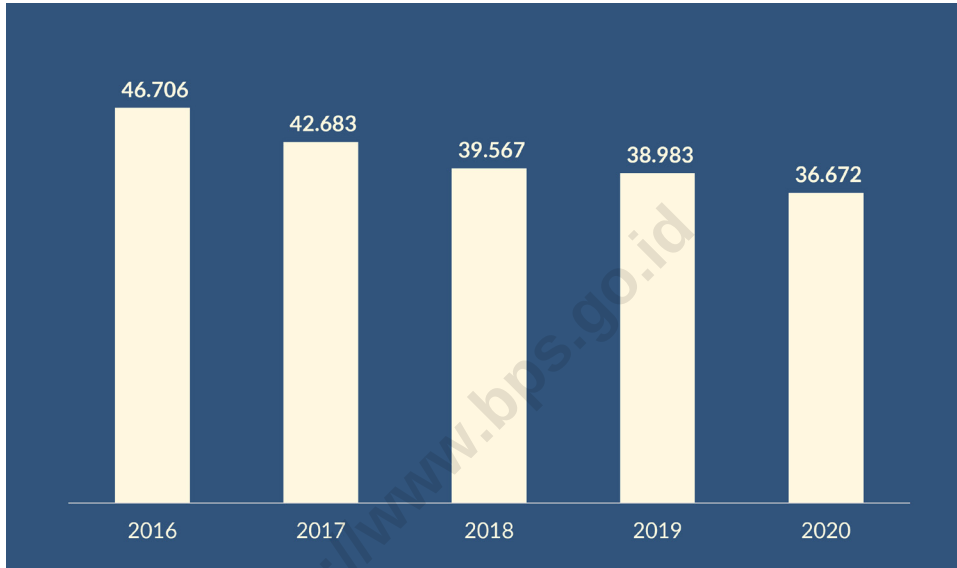
Kejahatan Terhadap Fisik/Badan

Kejahatan terhadap fisik/badan (*violence*) termasuk di dalamnya adalah penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk kejadian kejahatan terhadap fisik/badan pada 2020 jumlah kejadian di Indonesia cenderung menurun. Berdasarkan Gambar 2.6 pada 2019 terjadi 38.983 kejadian, pada tahun 2020 menurun menjadi 36.672.



Pada tahun 2020, jumlah kejadian kejahatan terhadap fisik/badan (*violence*) di Indonesia cenderung menurun

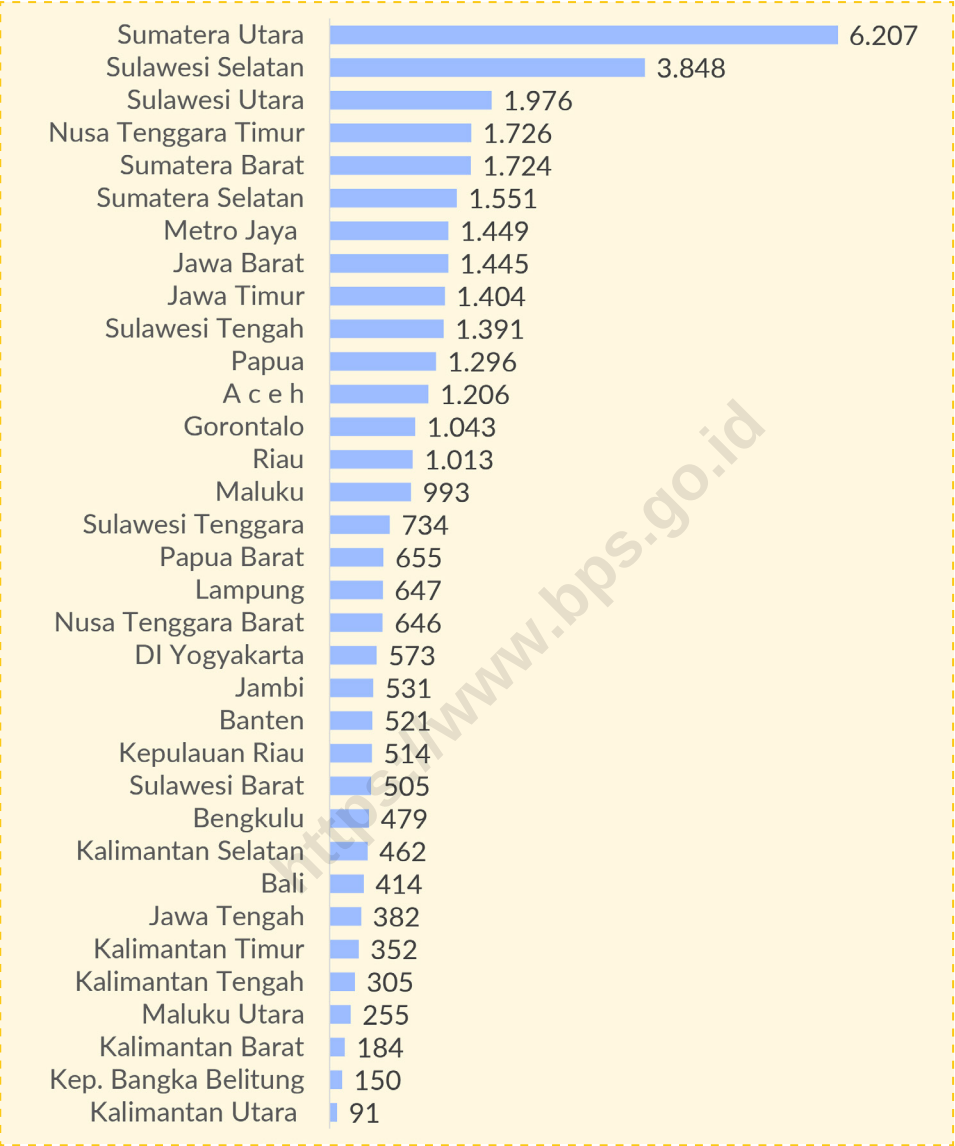
Gambar 2.6 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan, 2016-2020



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.7 menunjukkan bahwa jumlah kejadian kejahatan terhadap fisik/badan paling banyak terjadi di Polda Sumatera Utara dengan 6.207 kejadian. Polda dengan jumlah kejadian terbanyak kedua adalah Sulawesi Selatan, yaitu sebanyak 3.848 kejadian. Dua Polda yang terdapat kejadian kejahatan terhadap fisik paling sedikit adalah Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Utara, masing-masing sebanyak 150 dan 91 kejadian.

Gambar 2.7. Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Fisik/Badan Menurut Polda/
Provinsi, 2020



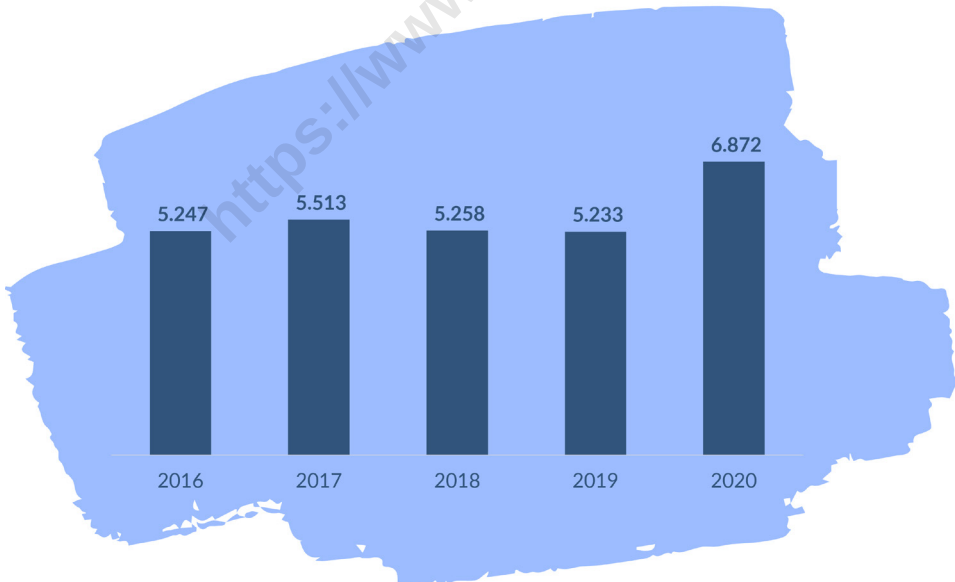
Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Kejahatan Terhadap Kesusilaan

Klasifikasi kejahatan terhadap kesusilaan terdiri dari jenis kejahatan perkosaan dan pencabulan. Jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan (perkosaan dan pencabulan) di Indonesia selama 2016-2020 berfluktuasi. Gambar 2.8 memperlihatkan bahwa pada tahun 2017 tercatat sebanyak 5.513 kejadian kejahatan terhadap kesusilaan, pada tahun 2018 menurun menjadi 5.258 kejadian, pada tahun 2019 menjadi 5.233 kejadian dan meningkat pada 2020 menjadi 6.872 kejadian.

Jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan di Indonesia selama lima tahun terakhir tertinggi pada tahun 2020

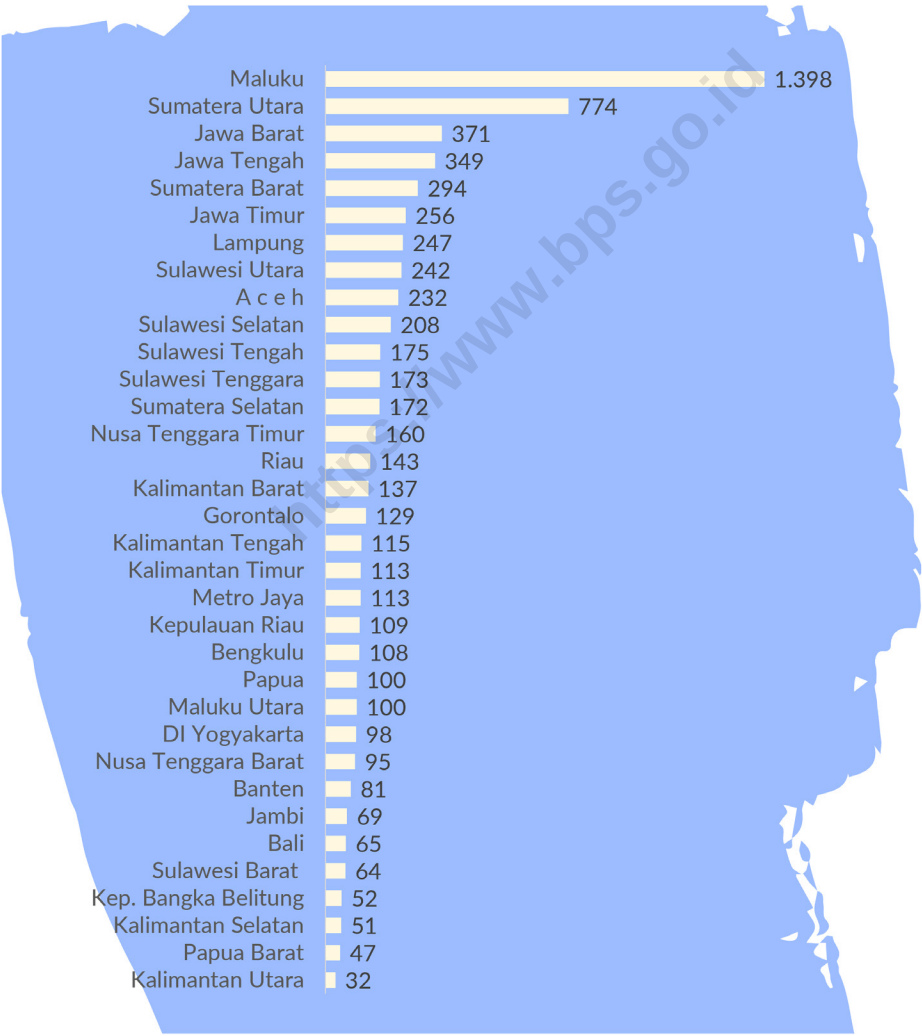
Gambar 2.8 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan, 2016-2020



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.9 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Polda Maluku merupakan wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap kesusilaan terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 1.398 kejadian. Di posisi kedua dan ketiga adalah Polda Sumatera Utara dan Jawa Barat, masing-masing sebanyak 774 kejadian dan 371 kejadian. Wilayah dengan jumlah kejadian paling sedikit adalah Polda Kalimantan Selatan, Papua Barat, dan Kalimantan Utara. Jumlah kejadian di ketiga Polda tersebut masing-masing 51 kejadian, 47 kejadian, dan 32 kejadian.

Gambar 2.9 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Kesusilaan Menurut Polda/Provinsi, 2020



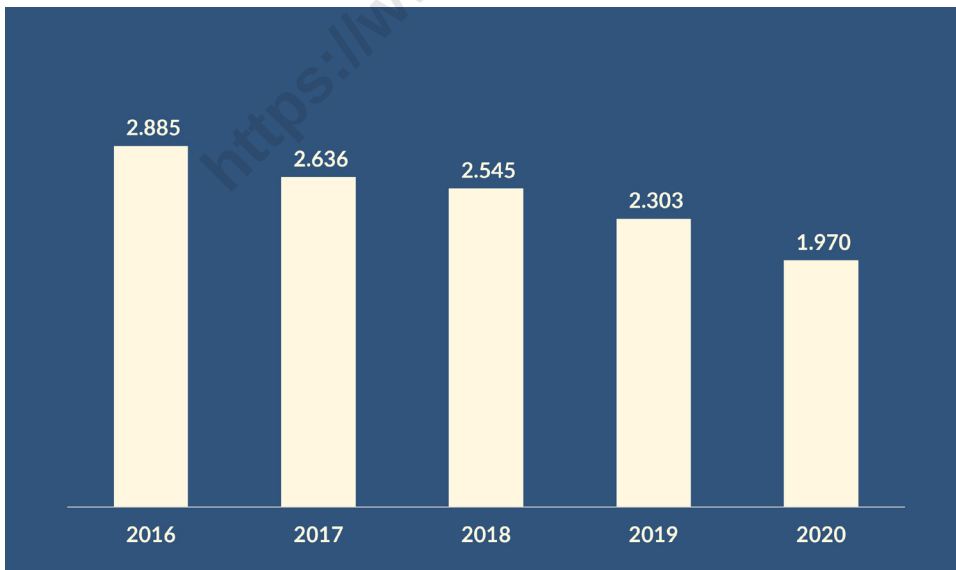
Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang

Klasifikasi kejahatan terhadap kemerdekaan orang terdiri dari jenis kejahatan penculikan dan mempekerjakan anak di bawah umur. Untuk kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang, termasuk penculikan dan mempekerjakan anak di bawah umur pada 2016-2020 cenderung menurun. Berdasarkan Gambar 2.10 pada tahun 2017 terjadi 2.636 kejadian, menurun menjadi 2.545 kejadian pada tahun 2018, dan menjadi 2.303 kejadian pada tahun 2019, Kemudian menurun lagi menjadi 1.970 kejadian pada tahun 2020.

**Pada tahun 2016-2020,
jumlah kejadian kejahatan
terhadap kemerdekaan (termasuk
penculikan) di Indonesia cenderung
menurun**

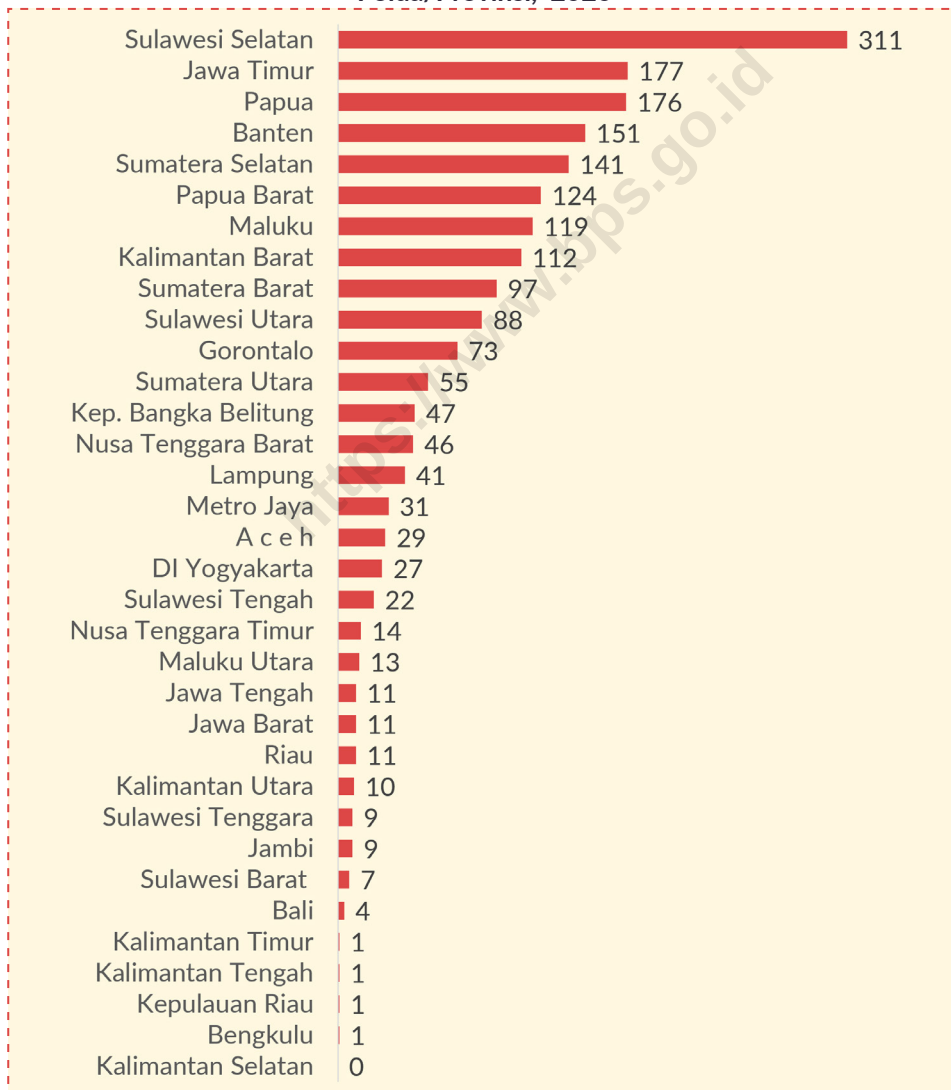
Gambar 2.10 Jumlah Kejadian dan Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, 2016 – 2020



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.11 menunjukkan kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang di tahun 2020 berdasarkan Polda/Provinsi. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa di Polda Sulawesi Selatan terdapat kejadian kejahatan terhadap kemerdekaan orang terbanyak yaitu sebanyak 311. Di posisi kedua terdapat Polda Jawa Timur, yaitu sebanyak 177 kejadian. Diikuti Polda Papua berada di posisi ketiga dengan kejadian sebanyak 176 kejadian. Sementara itu, Polda Kalimantan Selatan berada di posisi terakhir karena di wilayah tersebut tidak tercatat kejadian kejahatan ini di tahun 2020.

Gambar 2.11 Jumlah Kejadian Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Menurut Polda/Provinsi, 2020



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan

Jenis kejahatan ini secara hierarki tergolong tinggi karena selain menyangkut kejahatan terhadap properti juga merupakan kejahatan terhadap fisik. Dalam klasifikasi kejahatan ini yang termasuk kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan adalah pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api (senpi) dan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam (sajam).

Pada tahun 2020, jumlah kejadian kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan di Indonesia menurun. Seperti yang disajikan pada Gambar 2.12, jumlah kejadian kejahatan terhadap hak/milik dengan penggunaan kekerasan pada tahun 2020 sebanyak 6.538 kejadian, menurun dibanding tahun 2019 sebanyak 7.321 kejadian.

Gambar 2.12 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan, 2016 – 2020

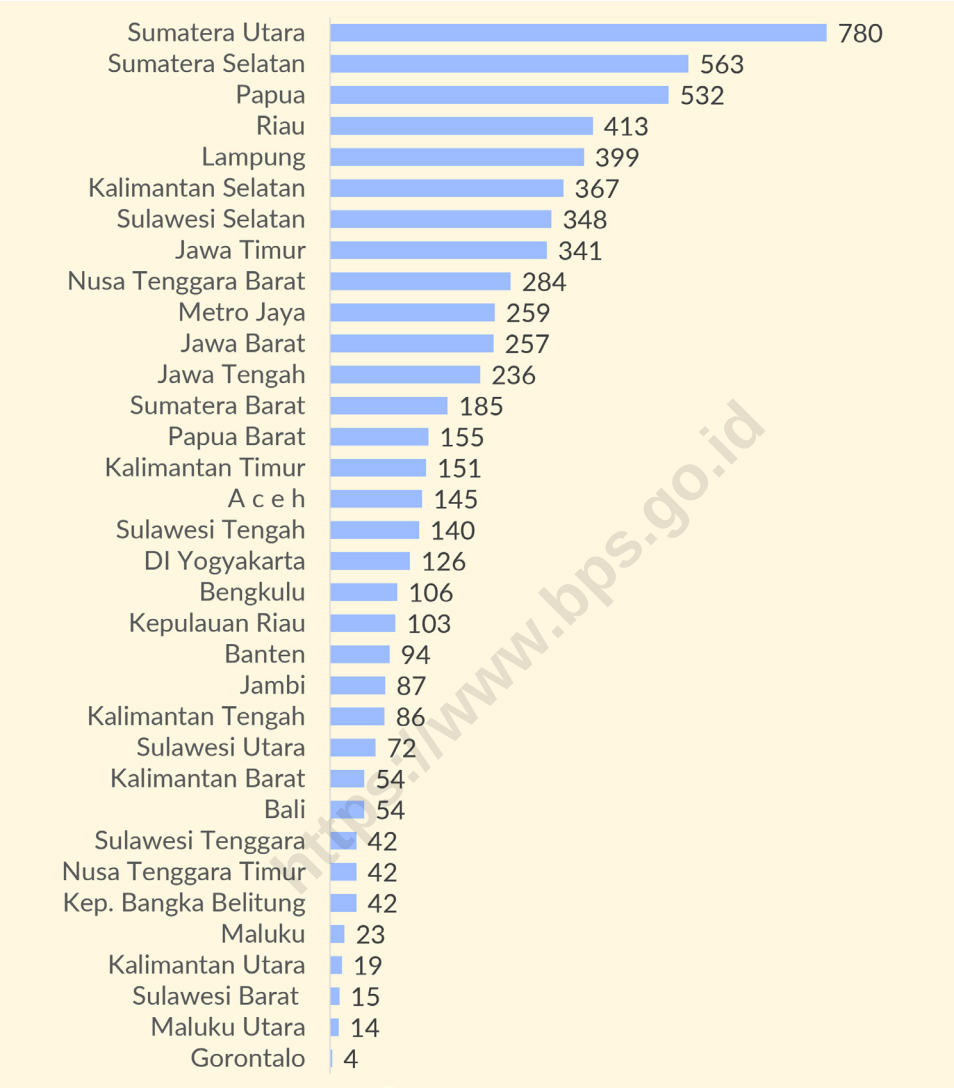


Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.13 menunjukkan jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang dengan kekerasan di tahun 2020. Wilayah dengan jumlah kejadian terbanyak adalah Polda Sumatera Utara, yaitu sebanyak 780 kejadian. Di posisi kedua terbanyak adalah Polda Sumatera Selatan dengan 563 kejadian. Dua wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan paling sedikit adalah Polda Maluku Utara dan Gorontalo masing-masing terjadi sebanyak 14 dan 4 kejadian.



Gambar 2.13 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik dengan Penggunaan Kekerasan Menurut Polda/Provinsi, 2020



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Kejahatan Terhadap Hak/Milik Tanpa Penggunaan Kekerasan

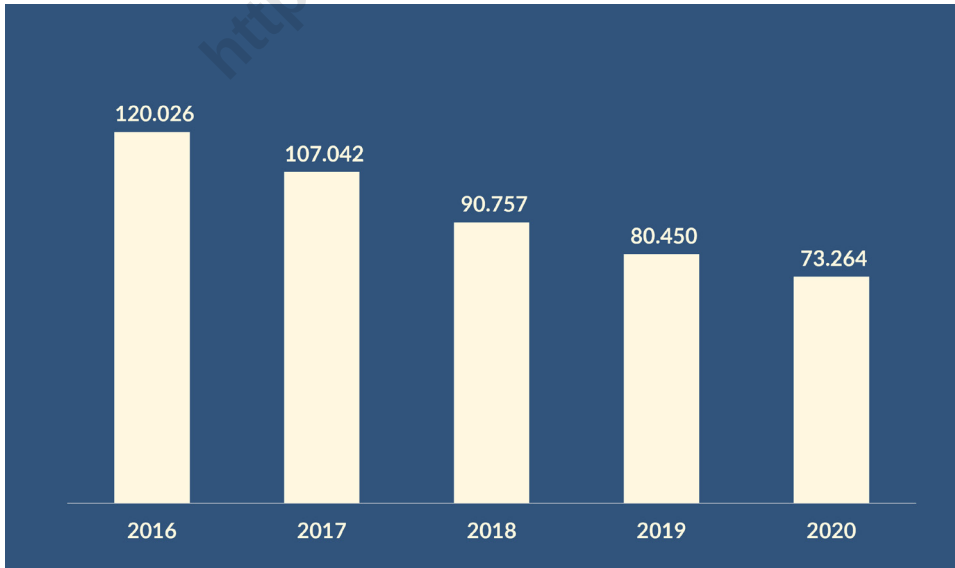
Klasifikasi kejahatan ini termasuk pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pengrusakan/penghancuran barang, pembakaran dengan sengaja, dan penadahan. Jumlah kejadian kejahatan terhadap hak/milik tanpa penggunaan kekerasan selama periode 2016–2020 cenderung menurun. Berdasarkan Gambar 2.14 pada tahun 2018 terjadi 90.757 kejadian, menjadi 80.450 kejadian pada tahun 2019, dan menurun menjadi 73.264 kejadian pada tahun 2020.

Kejadian kejahatan pencurian tanpa penggunaan kekerasan merupakan jenis kejahatan yang paling banyak dalam segi jumlah setiap tahunnya. Kejahatan ini banyak didominasi oleh kejahatan pencurian biasa dan pencurian kendaraan bermotor.



Pada tahun 2020, Polri mencatat sekitar 73.264 kejadian Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang Tanpa Kekerasan

Gambar 2.14 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik Tanpa Penggunaan Kekerasan, 2016 – 2020

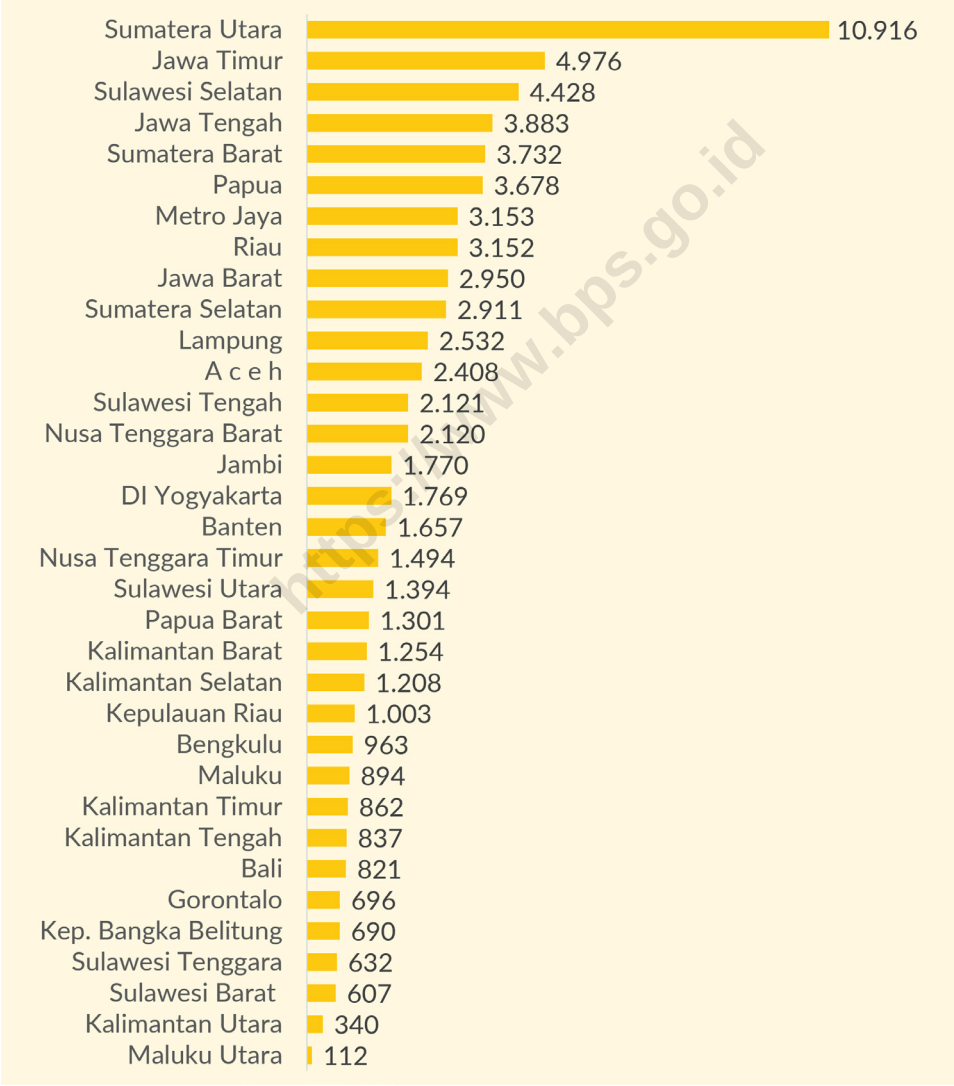


Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri



Gambar 2.15 menunjukkan jumlah kejadian kejahatan terhadap hak milik/barang tanpa kekerasan. Polda Sumatera Utara menduduki peringkat pertama dengan 10.916 kejadian kejahatan. Di posisi kedua terdapat wilayah Jawa Timur dengan 4.976 kejadian. Dua wilayah dengan jumlah kejadian paling sedikit adalah Polda Kalimantan Utara dan Maluku Utara masing-masing sebanyak 340 dan 112 kejadian.

Gambar 2.15 Jumlah Kejadian Kejahatan Terhadap Hak/Milik Tanpa Penggunaan Kekerasan Menurut Polda/Provinsi, 2020



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Kejahatan Terkait Narkotika

Pada tahun 2020, jenis kejahatan yang termasuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) ini memiliki pola yang mirip dengan kejahatan lain. Berdasarkan Gambar 2.16, jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika di Indonesia pada tahun 2016 – 2020 cenderung fluktuatif.

Gambar tersebut memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 39.588 kejadian. Angka ini meningkat dari tahun 2017 dengan jumlah kejadian sebanyak 35.142 kejadian. Namun, pada tahun 2019 menurun menjadi 36.478 kejadian. Kemudian pada tahun 2020 sedikit meningkat menjadi 36.611 kejadian.

Gambar 2.16 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika, 2016–2020

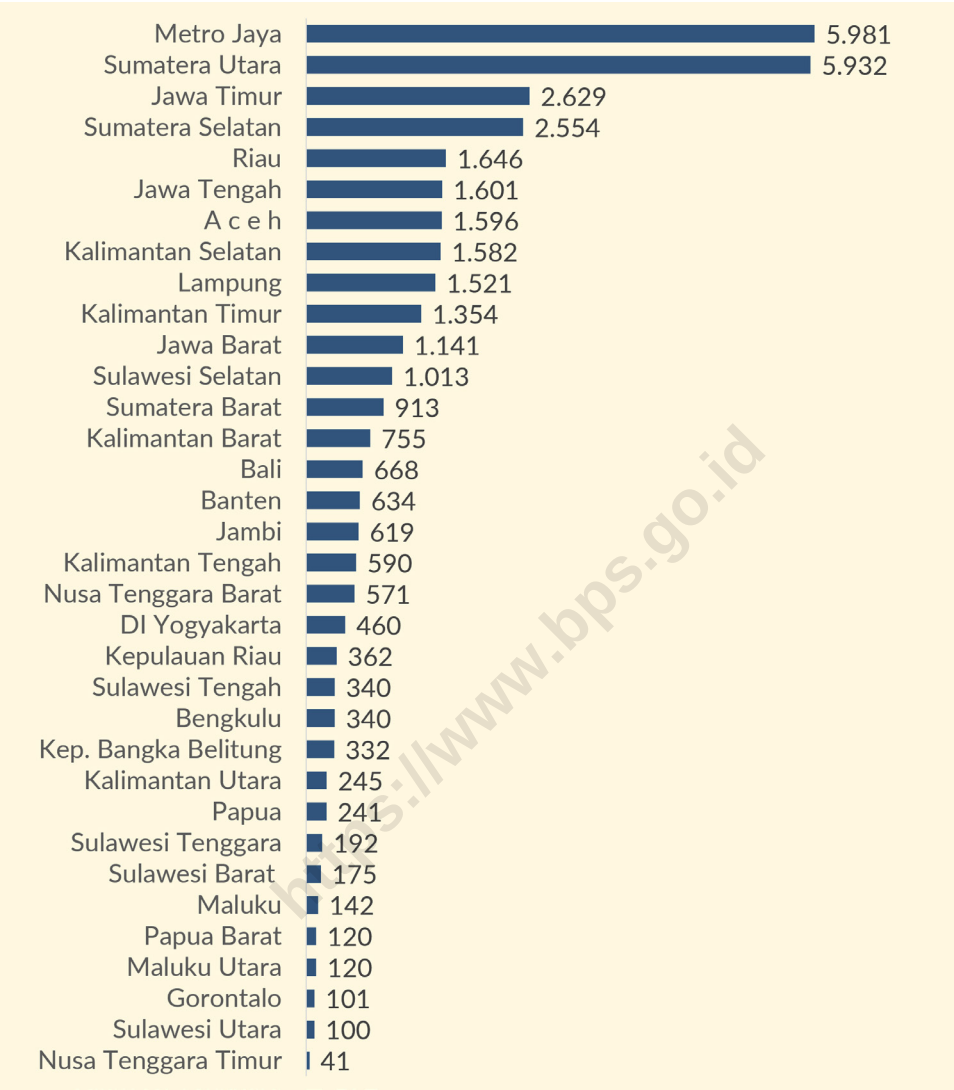


Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.17 menunjukkan jumlah kejahatan terkait narkotika tahun 2020 paling banyak terdapat di wilayah Polda Metro Jaya dengan jumlah 5.981 kejadian, kedua adalah Polda Sumatera Utara dengan jumlah 5.932 kejadian, dan ketiga terdapat Polda Jawa Timur dengan jumlah 2.629 kejadian. Gambar 2.17 juga menunjukkan wilayah dengan jumlah kejadian terendah ada Polda Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur, masing-masing dengan 101 kejadian, 100 kejadian, dan 41 kejadian. Sebagai informasi, kejahatan yang termasuk dalam kelompok kejahatan terkait narkotika adalah kejahatan narkotika dan psikotropika.



Gambar 2.17 Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Narkotika Menurut Polda, 2020

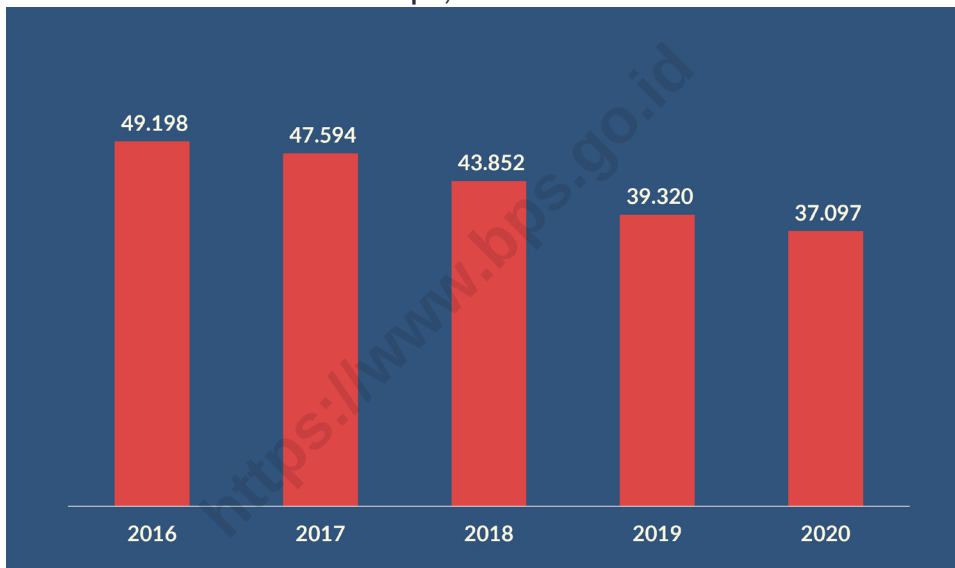


Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi

Klasifikasi kejahatan ini adalah penipuan, penggelapan, dan korupsi. Gambar 2.18 menunjukkan kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi yang tercatat di Polri selama periode 2016–2020 cenderung menurun. Pada tahun 2016 terjadi 49.198 kejadian dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020 menjadi 37.097 kejadian.

Gambar 2.18. Jumlah Kejadian Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi, 2016 – 2020

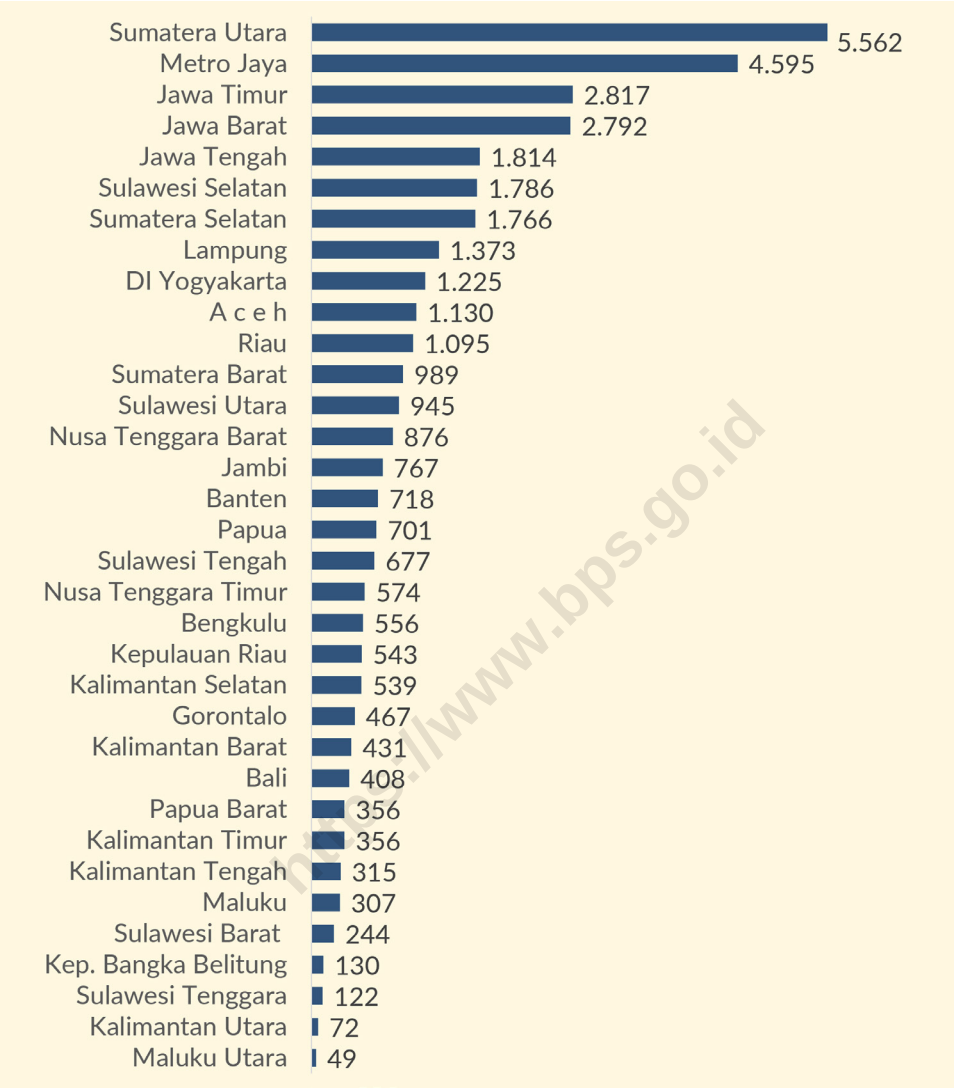


Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambar 2.19 menunjukkan bahwa Polda dengan jumlah kejadian kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi terbanyak adalah Polda Sumatera Utara sejumlah 5.562 kejadian. Di posisi kedua terbanyak terdapat Polda Metro Jaya sebanyak 4.595 kejadian. Gambar 2.19 juga menunjukkan wilayah Kalimantan Utara dan Maluku Utara adalah wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan ini yang paling sedikit, yaitu masing-masing sebanyak 72 dan 49 kejadian. Dalam klasifikasi kejahatan ini yang paling banyak kejadiannya adalah penipuan.



Gambar 2.19. Jumlah Kejadian Kejahatan Terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi Menurut Polda, 2020



Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Gambaran Kejadian Kejahatan Secara Kewilayahan

Kejadian kejahatan juga dapat dikaji melalui pendekatan kewilayahan selain melalui pendekatan pelaku. Bagian ini akan membahas kejadian kejahatan melalui pendekatan kewilayahan yang lebih menitikberatkan pada wilayah atau tempat terjadinya suatu kejadian kejahatan.

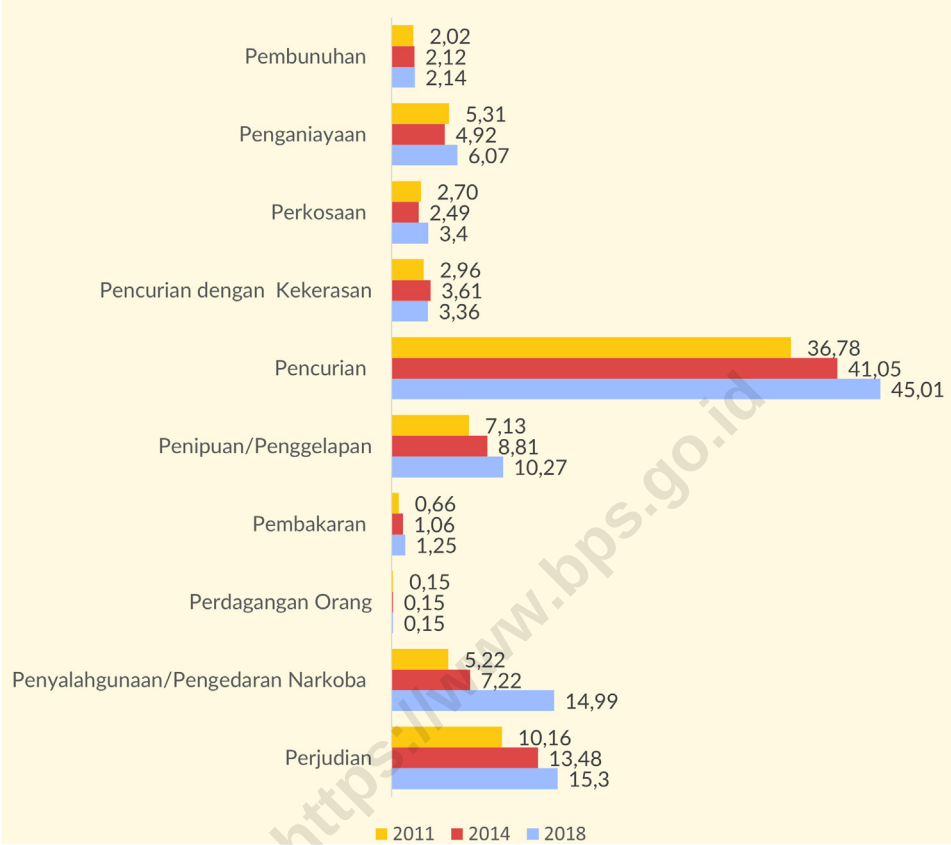
Secara lebih lanjut, bagian ini akan menjelaskan gambaran situasi dan perkembangan kejadian kejahatan yang dialami oleh masyarakat berdasarkan cakupan wilayah yang diukur melalui jumlah desa/kelurahan yang pernah mengalami kejadian kejahatan. Data yang digunakan ini bersumber dari Pendataan Potensi Desa tahun 2018 yang dilakukan oleh BPS yang biasanya dilakukan secara rutin setiap tiga tahun.

Hasil pendataan Potensi Desa 2018 menunjukkan bahwa secara umum, pencurian merupakan jenis kejahatan yang paling banyak terjadi di desa/kelurahan di Indonesia. Berdasarkan Gambar 2.20, terlihat bahwa persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian pencurian di tahun 2018 mencapai 45,01 persen dari seluruh desa/kelurahan di Indonesia. Persentase ini jauh lebih besar dibandingkan persentase kejahatan lainnya yang berada di bawah 16 persen.

Dilihat dari perkembangannya pada periode 2011-2018, persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian pencurian terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, terdapat 36,78 persen desa/kelurahan di Indonesia yang pernah mengalami kejadian pencurian. Angka ini terus mengalami peningkatan di tahun 2014 menjadi 41,05 persen kemudian meningkat lagi menjadi 45,01 persen di tahun 2018. Secara umum, persentase desa/kelurahan yang mengalami kejahatan meningkat pada tahun 2018 di hampir semua jenis kejahatan, penurunan hanya terjadi pada jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan. Lonjakan yang ekstrem terjadi pada jenis kejahatan penyalahgunaan/pengedaran narkoba, di mana pada tahun 2014 hanya sebanyak 7,22 persen dari total desa/kelurahan kemudian meningkat dua kali lipat menjadi 14,99 persen di tahun 2018. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang cukup serius dan harus menjadi perhatian agar perkembangan kejadian ini dapat ditekan atau bahkan diturunkan di kemudian hari.



Gambar 2.20. Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, 2011, 2014, dan 2018

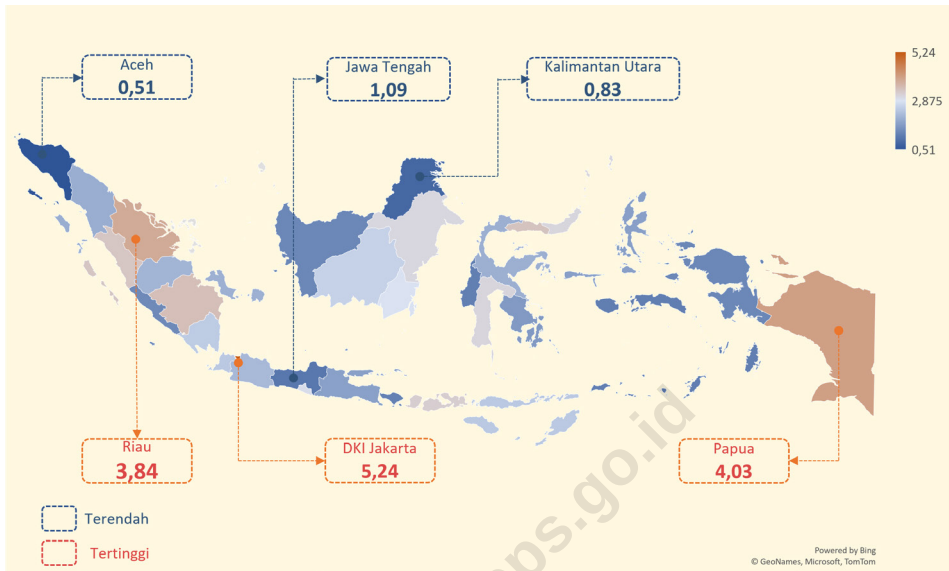


Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018

Gambar 2.21 menyajikan persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian kejahatan pembunuhan pada tahun 2018 menurut provinsi yang diukur melalui perbandingan jumlah desa/kelurahan yang mengalami kejadian pembunuhan dibagi total jumlah desa/kelurahan di suatu provinsi. Berdasarkan gambar tersebut, tiga provinsi dengan persentase desa/kelurahan yang pernah terjadi kejahatan pembunuhan terbesar yaitu DKI Jakarta (5,24 persen), Papua (4,03 persen), dan Riau (3,84 persen). Sementara itu, tiga provinsi dengan persentase desa/kelurahan yang pernah terjadi kejahatan pembunuhan terkecil adalah Aceh (0,51 persen), Kalimantan Utara (0,83 persen), dan Jawa Tengah (1,09 persen).



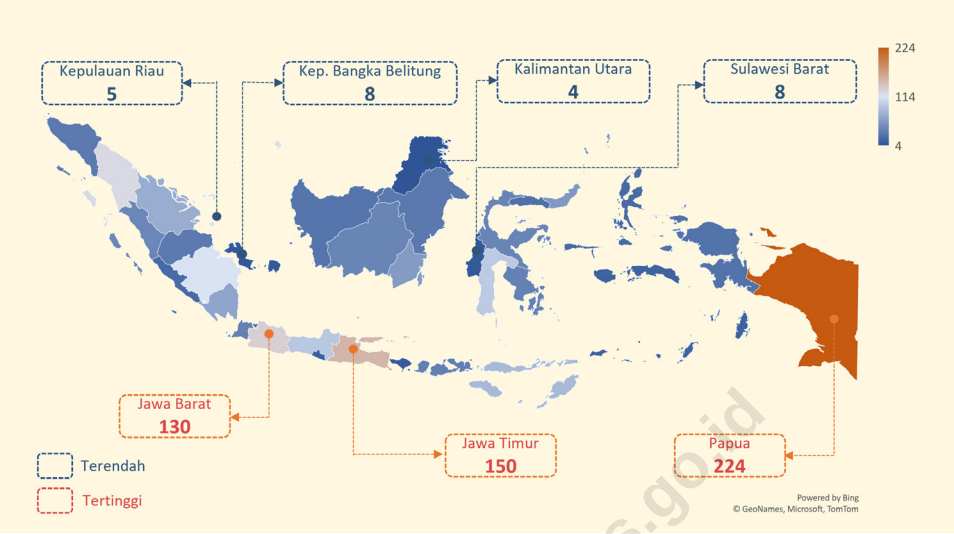
Gambar 2.21. Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018



Sumber: Podes 2018

Gambar 2.22 menampilkan besarnya kejahatan pembunuhan pada tahun 2018 menurut provinsi yang diukur melalui jumlah desa/kelurahan yang pernah mengalami kejadian pembunuhan di 34 provinsi. Berdasarkan gambar tersebut, tiga provinsi dengan jumlah desa/kelurahan yang pernah terjadi kejadian kejahatan pembunuhan terbesar secara berturut-turut adalah Papua (224 desa/kelurahan), Jawa Timur (150 desa/kelurahan), dan Jawa Barat (130 desa/kelurahan). Sementara itu, tiga provinsi dengan jumlah desa/kelurahan yang pernah terjadi kejadian kejahatan pembunuhan paling kecil adalah Kalimantan Utara (4 desa/kelurahan), Kepulauan Riau (5 desa/kelurahan), serta Kepulauan Bangka Belitung dan Sulawesi Barat (8 desa/kelurahan).

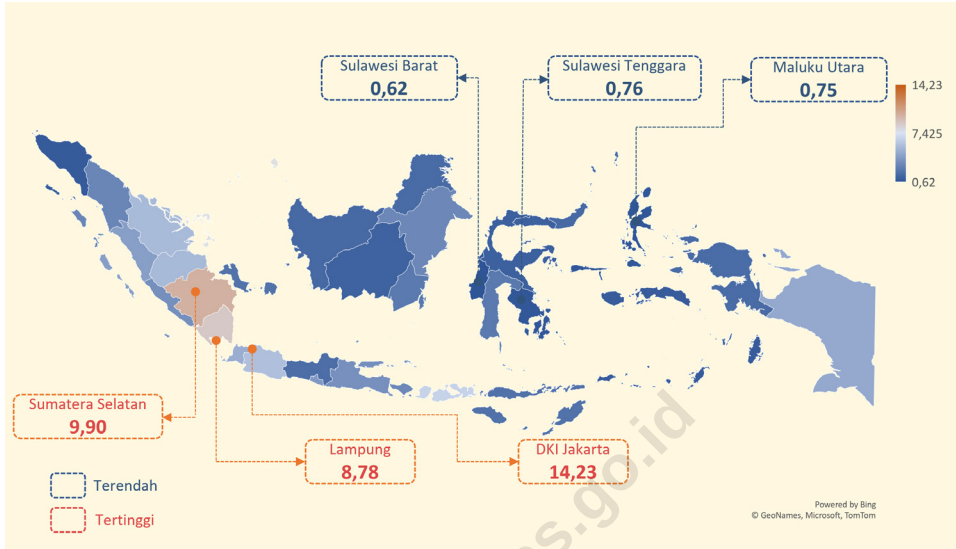
Gambar 2.22. Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018



Sumber: Podes 2018

Berdasarkan Gambar 2.23, rentang persentase desa/kelurahan yang pernah ada kejadian kejahatan pencurian dengan kekerasan selama tahun 2018 di 34 provinsi berkisar antara 0,62 – 14,23 persen. Tiga provinsi dengan persentase desa/kelurahan yang pernah terjadi kejahatan pembunuhan terbesar secara berturut-turut adalah DKI Jakarta (14,23 persen), Sumatera Selatan (9,90 persen), dan Lampung (8,78 persen). Di lain sisi, tiga provinsi dengan persentase desa/kelurahan yang pernah terjadi kejahatan pembunuhan terkecil secara berturut-turut adalah Sulawesi Barat (0,62 persen), Maluku Utara (0,75 persen), dan Sulawesi Tenggara (0,76 persen).

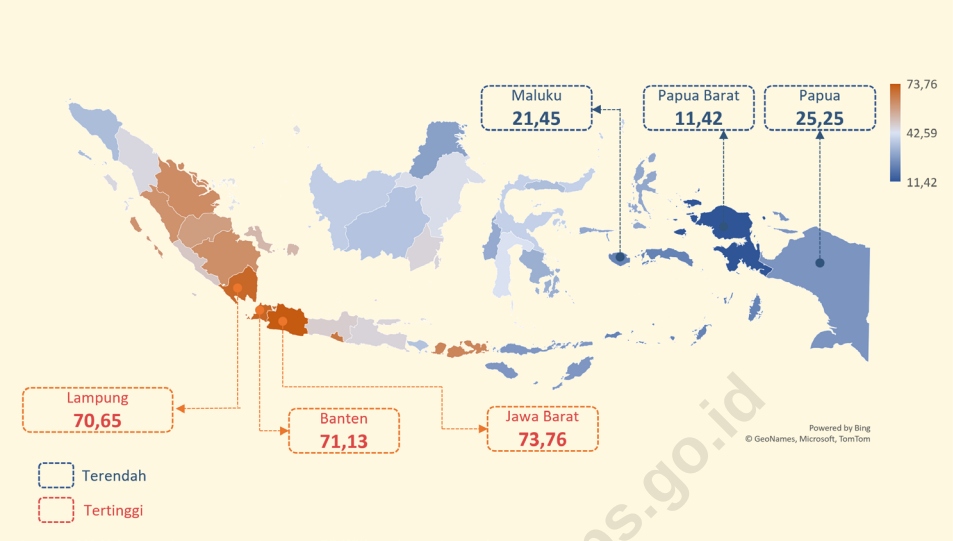
Gambar 2.23. Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018



Sumber: Podes 2018

Kejadian kejahatan pencurian (tanpa kekerasan) merupakan jenis kejahatan yang banyak terjadi di desa/kelurahan di Indonesia. Apabila dikaji menurut provinsi seperti pada Gambar 2.24, persentase desa/kelurahan yang pernah mengalami kejadian kejahatan pencurian (tanpa kekerasan) selama tahun 2018 memiliki rentang yang cukup besar, yaitu berkisar antara 11,42 – 73,76 persen dari total desa/kelurahan di masing-masing provinsi. Tiga provinsi dengan persentase desa/kelurahan yang pernah ada kejadian kejahatan pencurian terbesar selama tahun 2018 adalah Jawa Barat (73,76 persen), Banten (71,13 persen), dan Lampung (70,65 persen). Adapun tiga provinsi dengan persentase desa/kelurahan yang pernah ada kejadian kejahatan pencurian terkecil secara berturut-turut adalah Papua Barat (11,42 persen), Maluku (21,45 persen), dan Papua (25,25 persen).

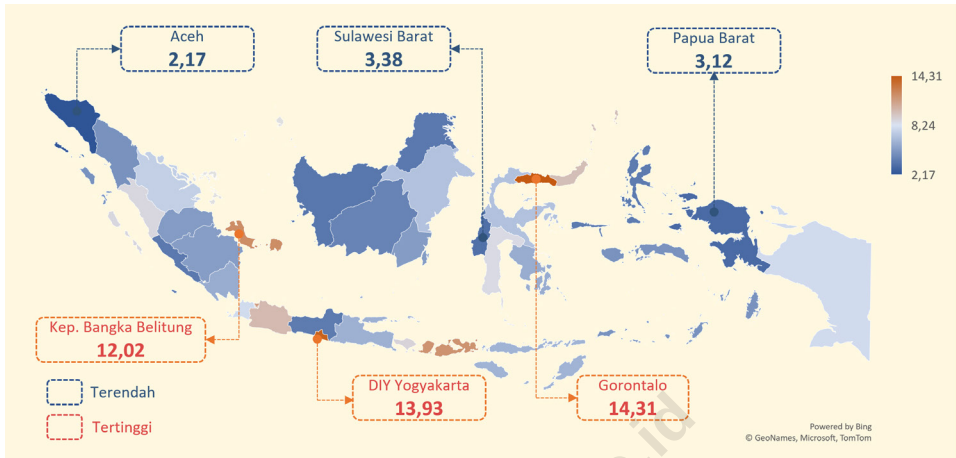
Gambar 2.24. Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian (Tanpa Kekerasan) Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018



Sumber: Podes 2018

Kejadian penganiayaan yang disajikan pada Gambar 2.25 menunjukkan rentang persentase desa/kelurahan yang mengalami penganiayaan selama tahun 2018 berada pada kisaran 2,17–14,31 persen dari total desa/kelurahan di masing-masing provinsi. Tiga provinsi dengan persentase desa/kelurahan yang pernah terjadi kejahatan penganiayaan terbesar secara berturut-turut adalah Gorontalo (14,31 persen), DI Yogyakarta (13,93 persen), dan Kepulauan Bangka Belitung (12,02 persen). Sementara itu, tiga provinsi dengan persentase desa/kelurahan yang pernah terjadi kejahatan penganiayaan terkecil secara berturut-turut adalah Aceh (2,17 persen), Papua Barat (3,12 persen), dan Sulawesi Barat (3,38 persen).

Gambar 2.25. Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018

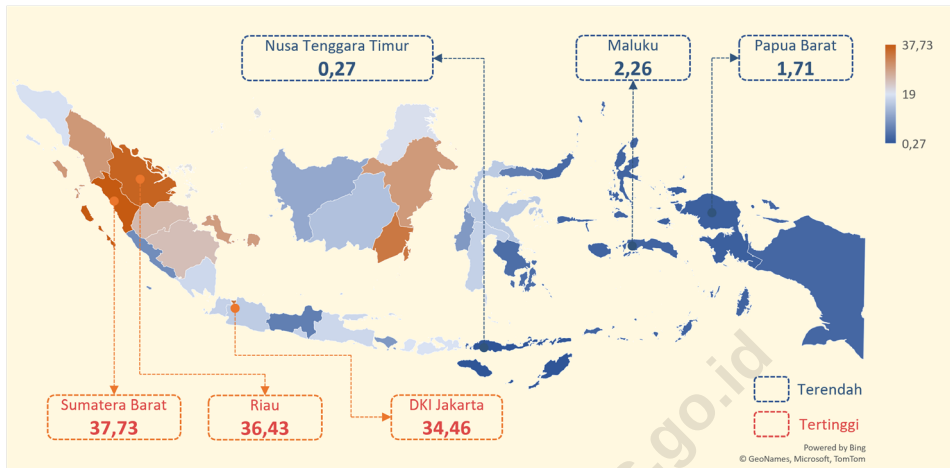


Sumber: Podes 2018

Lonjakan yang tinggi pada persentase desa/kelurahan yang pernah terjadi penyalahgunaan/pengedaran narkoba di tahun 2018 telah menyebabkan jenis kejahatan tersebut menjadi salah satu jenis peristiwa yang mendapat perhatian khusus di tahun 2018. Apabila dikaji lebih lanjut menurut provinsi (Gambar 2.26), kejadian penyalahgunaan dan pengedaran narkoba telah merebak di sejumlah desa/kelurahan pada semua provinsi di Indonesia, seperti halnya kejadian kejahatan pencurian dan penganiayaan.

Persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian kejahatan narkoba selama periode tahun 2018 memiliki rentang yang cukup besar, yaitu berada pada kisaran 0,27–37,73 persen dari total desa/kelurahan di masing-masing provinsi. Rentang yang cukup besar ini menunjukkan bahwa besaran dan tingkat keseriusan dari kejahatan narkoba yang dihadapi oleh masing-masing provinsi cukup bervariasi. Adapun tiga provinsi dengan persentase desa/kelurahan yang pernah terjadi kejahatan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba terbesar secara berturut-turut adalah Sumatera Barat (37,73 persen), Riau (36,43 persen), dan DKI Jakarta (34,46 persen). Sementara itu, tiga provinsi dengan persentase desa/kelurahan yang pernah terjadi kejahatan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba terkecil secara berturut-turut adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (0,27 persen), Papua Barat (1,71 persen), dan Maluku (2,26 persen).

Gambar 2.26. Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penyalahgunaan dan Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018



Sumber: Podes 2018

Konflik Massal

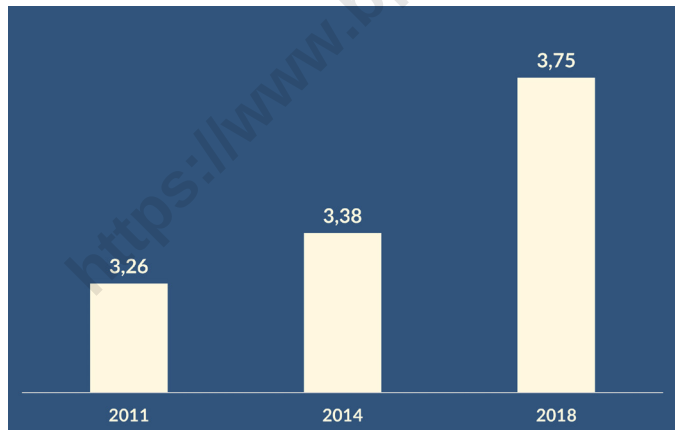
Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum terkait fenomena konflik berupa perkelahian massal yang terjadi di Indonesia serta perkembangannya selama satu dekade terakhir. Beberapa aspek yang dilihat meliputi jenis dan cakupan kejadian perkelahian massal serta upaya penyelesaiannya. Tak hanya dikategorikan sebagai kejahatan, perkelahian massal juga dianggap sebagai suatu kondisi yang dapat mengganggu keamanan.

Hafidhuddin (2001) mengemukakan bahwa secara etimologi, konflik berasal dari kata kerja Latin "*configere*" yang berarti saling memukul. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percekocan, perselisihan, pertentangan. Adapun secara terminologi, Soekanto (2005) mendefinisikan pertentangan atau pertikaian (konflik) sebagai suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan. Konflik yang ekstrem akan berujung pada kekerasan dan menimbulkan perkelahian massal.

Terkait konflik massal, data yang menjadi sumber utama merupakan data kewilayahan (*spatial data*) yang diperoleh dari data Statistik Potensi Desa (Podes). Pengumpulan data Statistik Podes menggunakan seluruh desa/kelurahan di wilayah Indonesia sebagai unit observasi. Sejalan dengan itu, kajian mengenai perkelahian massal pada bagian ini secara umum akan dilihat dari cakupan jumlah atau persentase desa/kelurahan yang menjadi wilayah atau lokasi kejadian tersebut.

Berdasarkan hasil Podes 2011, 2014, dan 2018, jumlah dan persentase desa/kelurahan yang mengalami perkelahian massal cenderung mengalami peningkatan (Gambar 2.27). Pada tahun 2011, persentase desa/kelurahan yang mengalami kejadian perkelahian massal selama setahun terakhir adalah sebesar 3,26 persen dari total desa/kelurahan di Indonesia. Angka ini mengalami peningkatan menjadi 3,38 persen desa/kelurahan di tahun 2014 dan terus meningkat hingga menjadi sebesar 3,75 persen desa/kelurahan pada tahun 2018.

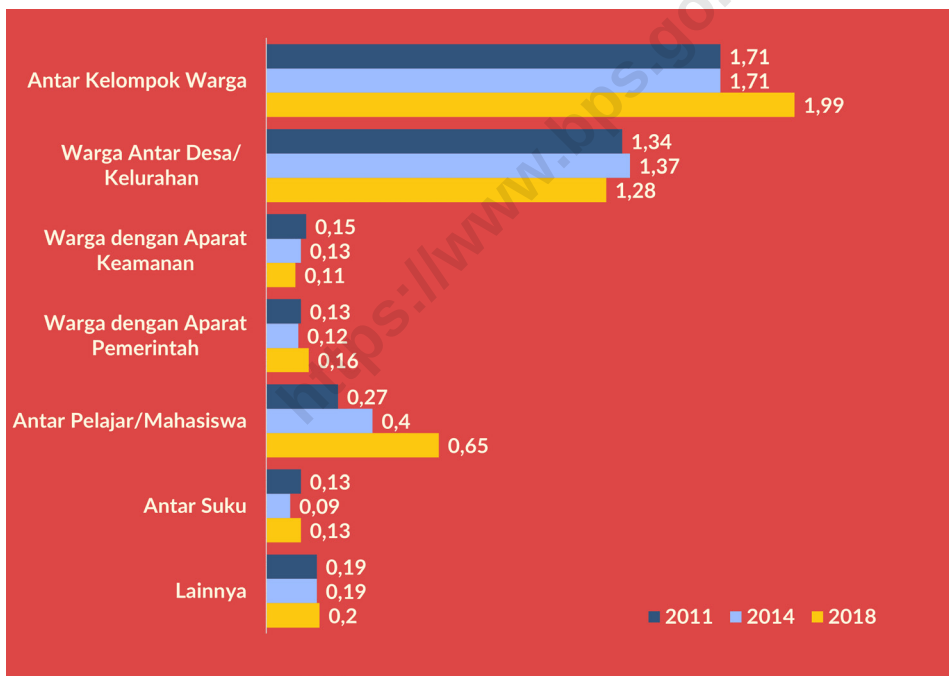
Gambar 2.27. Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal, 2011, 2014, dan 2018



Sumber: Podes 2018

Pada Podes 2018, jenis kejadian perkelahian massal yang dicakup meliputi perkelahian antar kelompok warga, perkelahian warga antar desa/kelurahan, perkelahian warga dengan aparat keamanan, perkelahian warga dengan aparat pemerintah, perkelahian antar pelajar, dan perkelahian antar suku. Hasil Pendataan Podes tahun 2018 menunjukkan bahwa perkelahian antar kelompok warga merupakan perkelahian massal yang paling sering terjadi, kemudian disusul oleh perkelahian warga antar desa/kelurahan. Apabila dikaji dari perkembangannya, persentase desa/kelurahan yang mengalami perkelahian antar kelompok warga adalah sebesar 1,71 persen di tahun 2011 dan 2014, kemudian meningkat menjadi 1,99 persen di tahun 2018 (Gambar 2.28).

Gambar 2.28. Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Tipenya, 2011, 2014, dan 2018

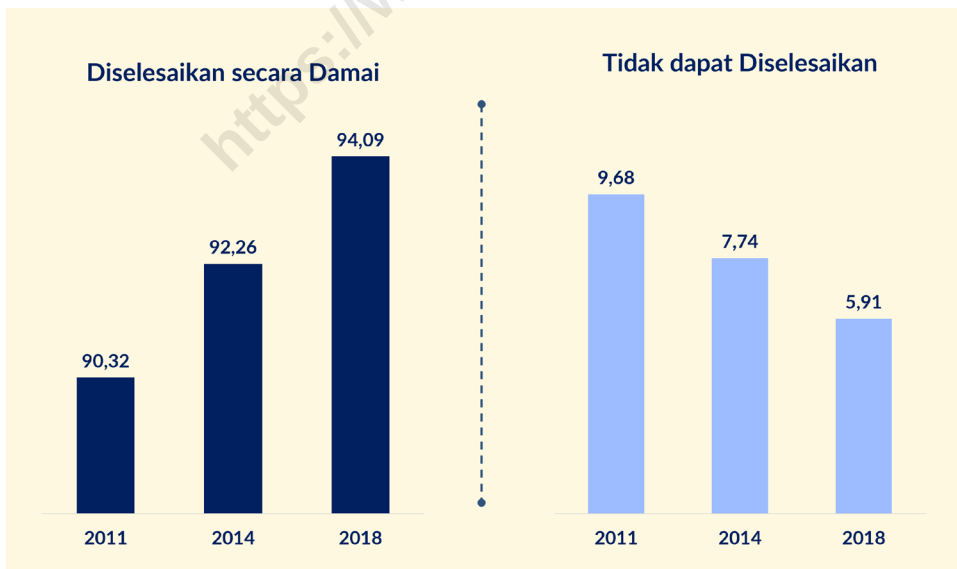


Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018

Pemerintah menyadari bahwa kerawanan konflik di Indonesia dapat menciptakan perpecahan. Oleh karena itu, pemerintah telah mengesahkan Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi isu konflik. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah berperan aktif dalam setiap penyelesaian segala bentuk konflik atau benturan fisik dan kekerasan lainnya yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial yang mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Gurr dalam Soetopo (2001) menjelaskan bahwa terdapat beberapa strategi yang dipandang lebih efektif dalam pengelolaan konflik, yaitu: (1) konsistensi damai, yaitu mengendalikan konflik dengan cara tidak saling mengganggu dan saling merugikan yang dilakukan dengan menetapkan peraturan yang mengacu pada perdamaian serta diterapkan secara ketat dan konsekuen; dan (2) mediasi (perantara). Strategi dengan mediasi (perantara) merupakan strategi yang dilakukan apabila konflik menemui jalan buntu, yaitu dengan menunjuk pada pihak ketiga untuk menjadi perantara yang berperan secara jujur dan adil serta tidak memihak.

Gambar 2.29. Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Penyelesaiannya, 2011, 2014, dan 2018

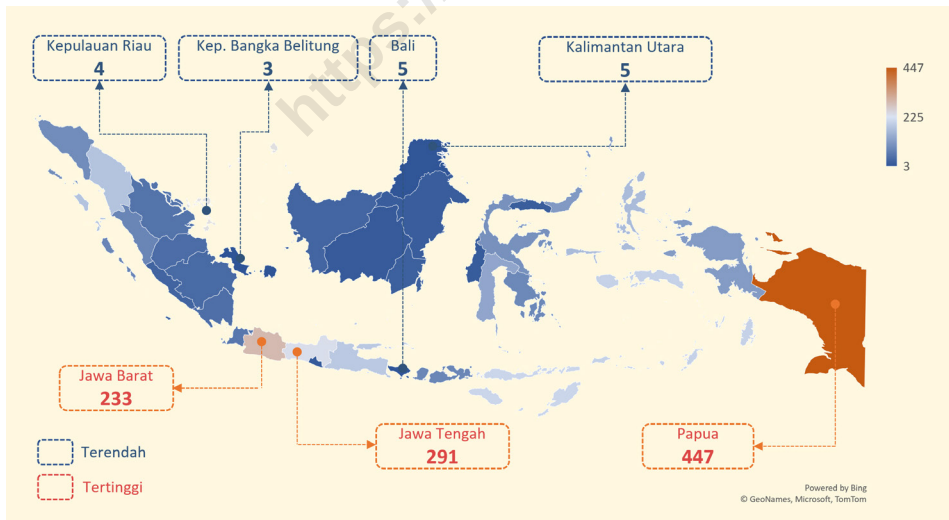


Sumber: Podes 2011, 2014, 2018

Wujud keberhasilan penanganan permasalahan perkelahian massal di Indonesia dapat terlihat dari persentase penyelesaian kasus tersebut yang telah mencapai lebih dari 90 persen dan terus meningkat hingga mencapai 94,09 persen di tahun 2018 (Gambar 2.29). Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 5,91 persen desa/kelurahan di Indonesia yang belum dapat menyelesaikan kasus perkelahian massal yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan adanya partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk tetap meningkatkan upaya penyelesaian perkelahian massal di wilayah desa/kelurahan tempat tinggalnya, sehingga konflik yang belum dapat diselesaikan tersebut akan segera menemukan solusinya.

Pengkajian secara lebih rinci pada level provinsi (Gambar 2.30 dan 2.31), dapat dilihat variasi dalam perkembangan kejadian konflik massal di beberapa daerah selama tahun 2018. Jika dilihat dari segi jumlah desa/kelurahan, provinsi dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak yang pernah mengalami perkelahian adalah Papua (447), Jawa Barat (291), dan Jawa Tengah (233). Sedangkan provinsi dengan jumlah desa/kelurahan terkecil yang pernah mengalami perkelahian adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (3), Kepulauan Riau (4), serta Bali dan Kalimantan Utara (5).

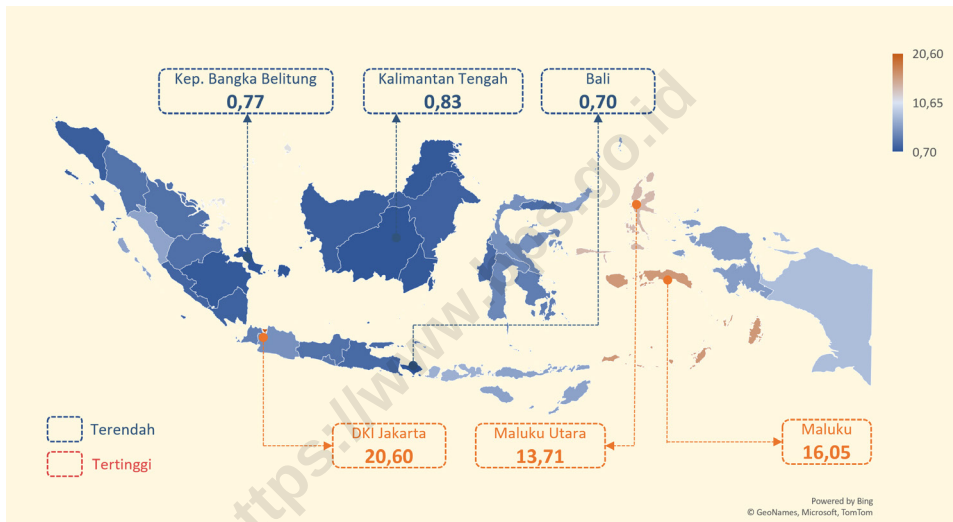
Gambar 2.30. Jumlah Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018



Sumber: Podes 2018

Pada 2018, Provinsi DKI Jakarta (20,60 persen), Maluku (16,05 persen), dan Maluku Utara (13,71 persen) merupakan provinsi dengan persentase terbesar untuk desa/kelurahan yang pernah mengalami perkelahian massal setahun terakhir. Sedangkan provinsi dengan persentase terkecil untuk desa/kelurahan yang pernah mengalami perkelahian massal setahun terakhir secara berurutan adalah Provinsi Bali (0,70 persen), Kepulauan Bangka Belitung (0,77 persen), dan Kalimantan Tengah (0,83 persen).

Gambar 2.31. Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2018

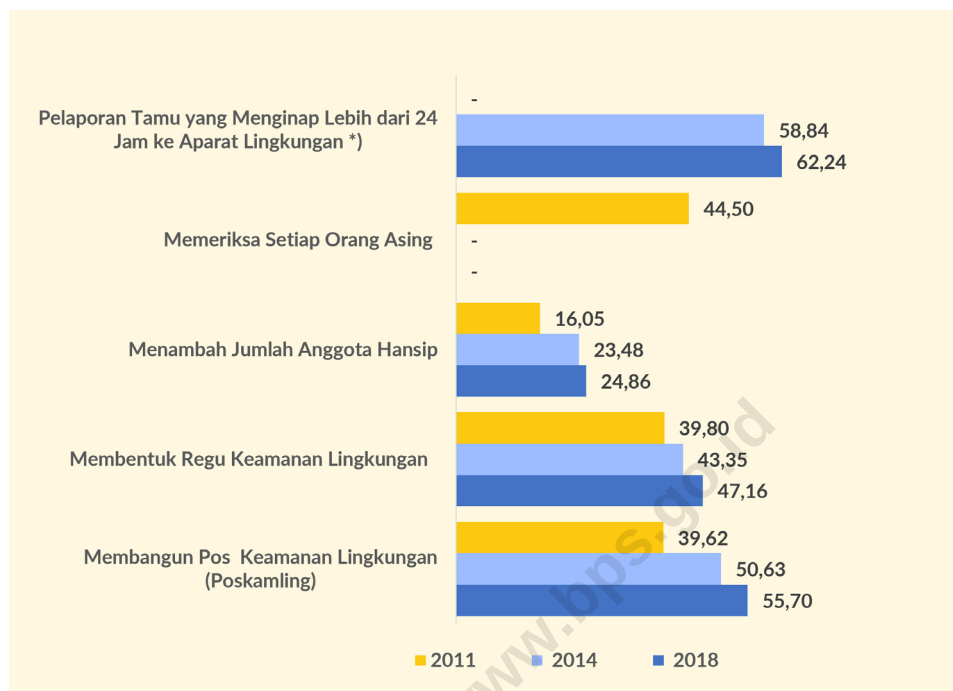


Sumber: Podes 2018

Upaya Menjaga Keamanan

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai upaya dan partisipasi masyarakat yang dilakukan untuk menjaga keamanan di lingkungan desa/kelurahan tempat tinggalnya dan perkembangannya selama satu dekade terakhir. Data yang digunakan untuk melihat upaya menjaga keamanan ini merupakan data kewilayahan (*spatial data*) dengan unit observasi berupa seluruh desa/kelurahan yang ada di wilayah Indonesia yang digunakan pada Pendataan Podes. Sejalan dengan itu, tingkat dan perkembangan upaya dan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan pada bagian ini akan dilihat dari cakupan dan perkembangan jumlah desa/kelurahan yang melakukan upaya tersebut.

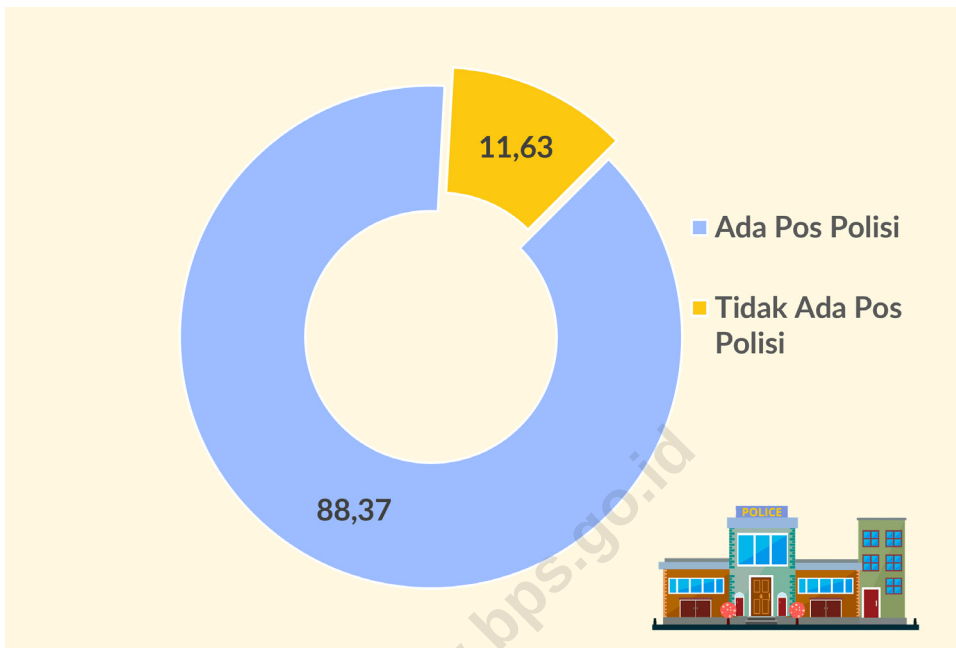
Gambar 2.32. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya yang Dilakukan Warganya untuk Menjaga Keamanan, 2011, 2014, dan 2018



Sumber: Podes 2011, 2014, 2018

Berdasarkan Gambar 2.32, terlihat bahwa upaya yang paling banyak dilakukan oleh warga desa untuk menjaga keamanan selama tahun 2018 secara berturut-turut adalah melakukan pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan (62,24 persen), membangun pos keamanan lingkungan (poskamling) (55,70 persen), membentuk regu keamanan lingkungan (47,16 persen), dan menambah jumlah anggota hansip/linmas (24,86 persen). Pada tahun 2018, terdapat lebih dari setengah desa/kelurahan di Indonesia yang menggiatkan pelaporan tamu dan membangun poskamling sebagai langkah menjaga keamanan di wilayah tempat tinggalnya. Secara lebih lanjut, tabel terkait upaya dan partisipasi masyarakat desa dalam menjaga keamanan dirinci menurut provinsi selama periode 2011-2018 yang dicantumkan di bagian lampiran juga menunjukkan bahwa upaya warga untuk menjaga keamanan dengan membangun poskamling meningkat hampir di seluruh provinsi.

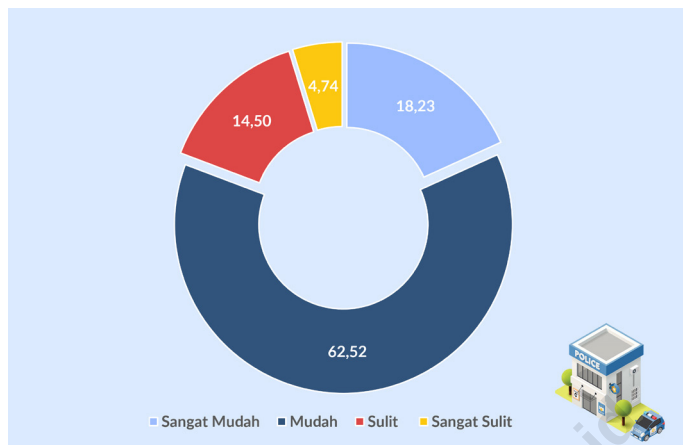
Gambar 2.33. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi, 2018



Sumber: Podes 2018

Upaya menjaga keamanan dan ketertiban juga merupakan fungsi dari aparat yang berwenang, dalam hal ini adalah polisi. Untuk mengukur hal tersebut, data Podes menyajikan persentase desa/kelurahan yang terdapat pos polisi. Gambar 2.33 menunjukkan bahwa pada tahun 2018, hanya sekitar 11,63 persen dari keseluruhan desa/kelurahan di Indonesia yang di wilayahnya terdapat pos polisi (termasuk Polsek, Polres, dan Polda). Meskipun demikian, dari sekitar 88,37 persen desa/kelurahan yang tidak ada pos polisi, terdapat sekitar 80,75 persen di antaranya yang menyatakan bahwa akses ke pos polisi terdekat mudah dan sangat mudah (Gambar 2.34).

Gambar 2.34. Persentase Desa/Kelurahan yang Tidak Memiliki Pos Polisi Menurut Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat, 2018



Sumber: Podes 2018

KORBAN KEJAHATAN

64,46 persen korban kejahatan berjenis kelamin **LAKI-LAKI**



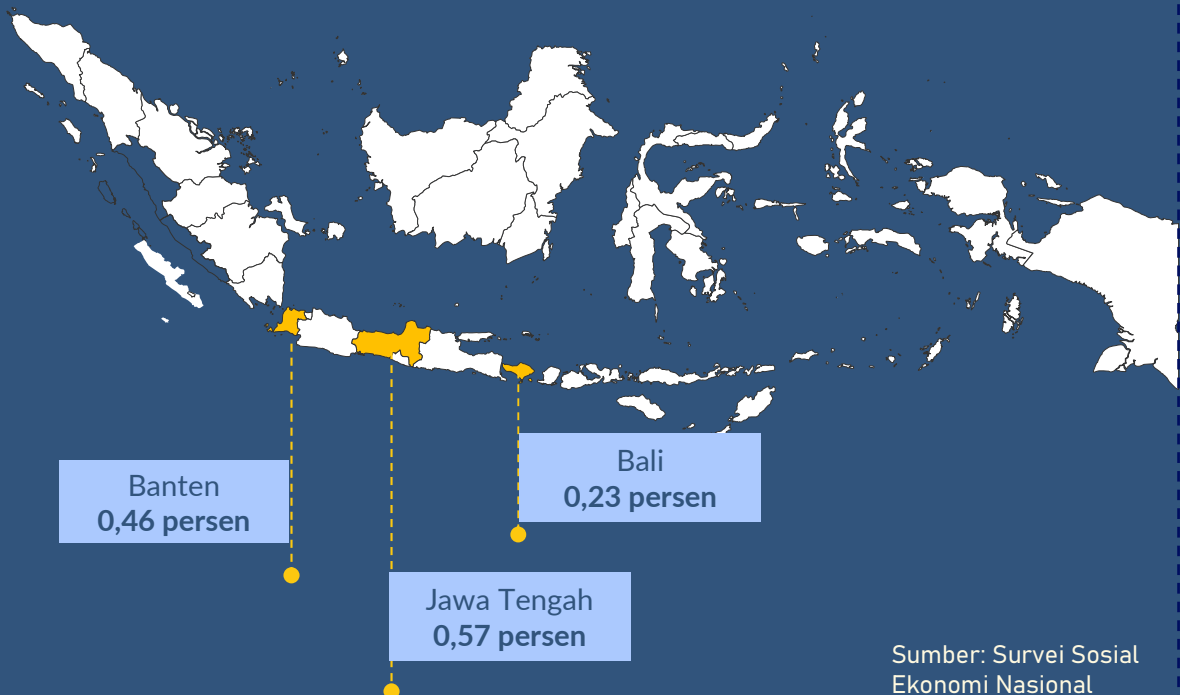
35,54 persen korban kejahatan berjenis kelamin **PEREMPUAN**

94,32 persen korban kejahatan berusia **DEWASA**



6,58 persen korban kejahatan berusia **ANAK**

Provinsi dengan Persentase Korban Kejahatan Terendah adalah Bali, Banten, dan Jawa Tengah





<https://www.bps.go.id>



BAB III

Korban Kejahatan

Penduduk Korban Kejahatan

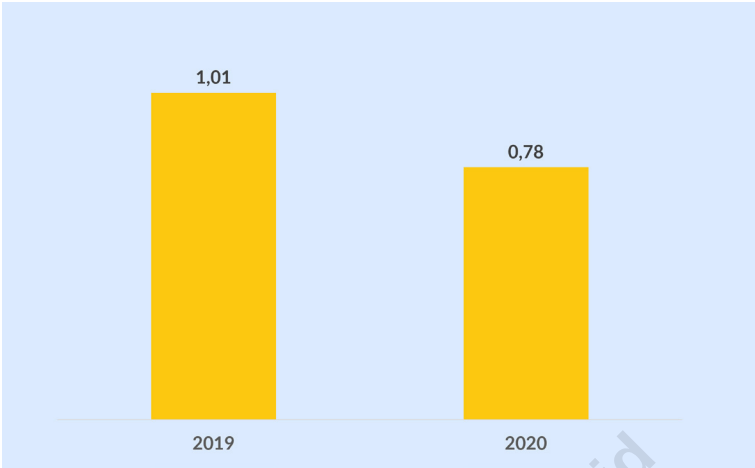
Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban didefinisikan sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Seseorang dikatakan menjadi korban kejahatan bila dalam satu tahun terakhir dirinya atau harta bendanya mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan. Tindak kejahatan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang dan harta bendanya, misalnya penipuan, pencurian, pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan dan perampokan), penganiayaan, pelecehan seksual (termasuk perkosaan dan pencabulan), dan lainnya seperti penculikan, pemerasan, dan sebagainya.

Data mengenai jumlah korban kejahatan dan karakteristiknya diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yakni pada Blok IX. Keterangan Korban Kejahatan. Susenas 2020 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari sampai 31 Desember 2019. Sedangkan Susenas 2021 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari sampai 31 Desember 2020.

Gambar 3.1 menunjukkan pada tahun 2020, persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan sebesar 0,78 persen dari populasi penduduk Indonesia. Persentase tersebut menurun dibandingkan pengalaman masyarakat pada tahun 2019 (1,01 persen).



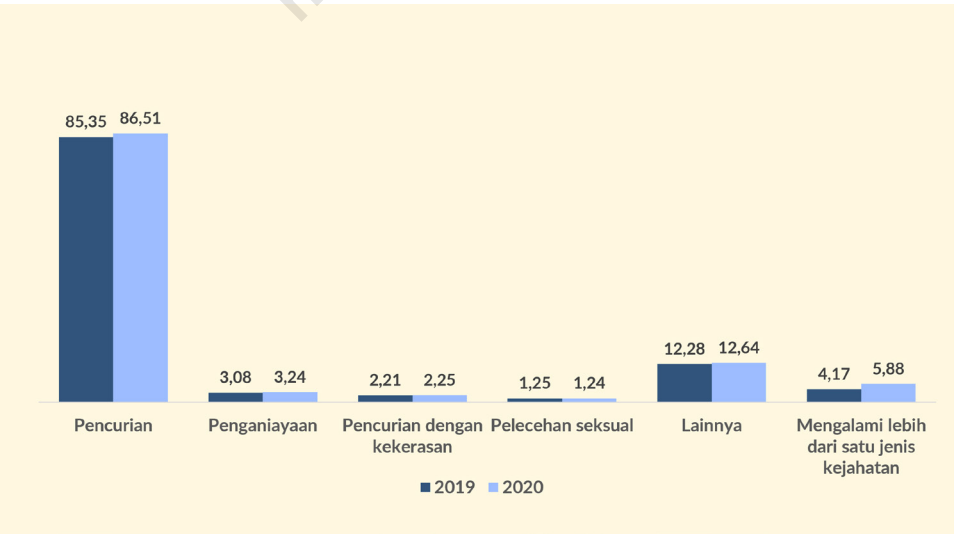
Gambar 3.1. Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan 2019-2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2021, BPS

Berdasarkan jenis kejahatannya, sebagian besar penduduk korban kejahatan mengalami pencurian, baik di tahun 2019 (85,35 persen) maupun tahun 2020 (86,51 persen). Persentase korban kejahatan terendah terdapat pada jenis kejahatan pelecehan seksual dengan persentase kurang dari 1,50 persen. Persentase korban kejahatan yang mengalami lebih dari satu jenis kejahatan meningkat dari 4,17 persen di tahun 2019 menjadi 5,88 persen di tahun 2020.

Gambar 3.2. Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kejahatan yang Dialami, 2019-2020

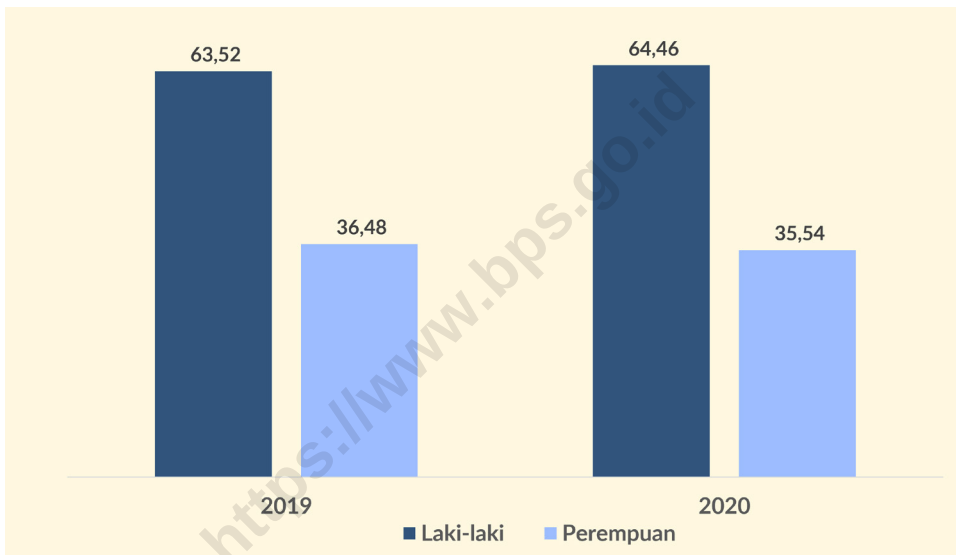


Sumber: Susenas 2020-2021

Keterangan: Persentase dihitung terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

Penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan dapat dilihat polanya berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. Komposisi penduduk korban kejahatan menurut jenis kelamin disajikan pada Gambar 3.3. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 dan 2020, sebagian besar penduduk yang menjadi korban kejahatan berjenis kelamin laki-laki dengan persentase lebih dari 60 persen. Pada tahun 2020, persentase perempuan yang menjadi korban kejahatan sedikit mengalami penurunan.

Gambar 3.3. Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin, 2019-2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2021, BPS

Keterangan: Persentase dihitung terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

Selama periode 2019-2020, sebagian besar penduduk yang menjadi korban kejahatan adalah kalangan dewasa. Dari Gambar 3.4 terlihat bahwa terdapat peningkatan persentase penduduk dewasa yang menjadi korban kejahatan dari 93,14 persen pada tahun 2019 menjadi 94,32 persen pada tahun 2020.



Gambar 3.4. Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Umur, 2019-2020

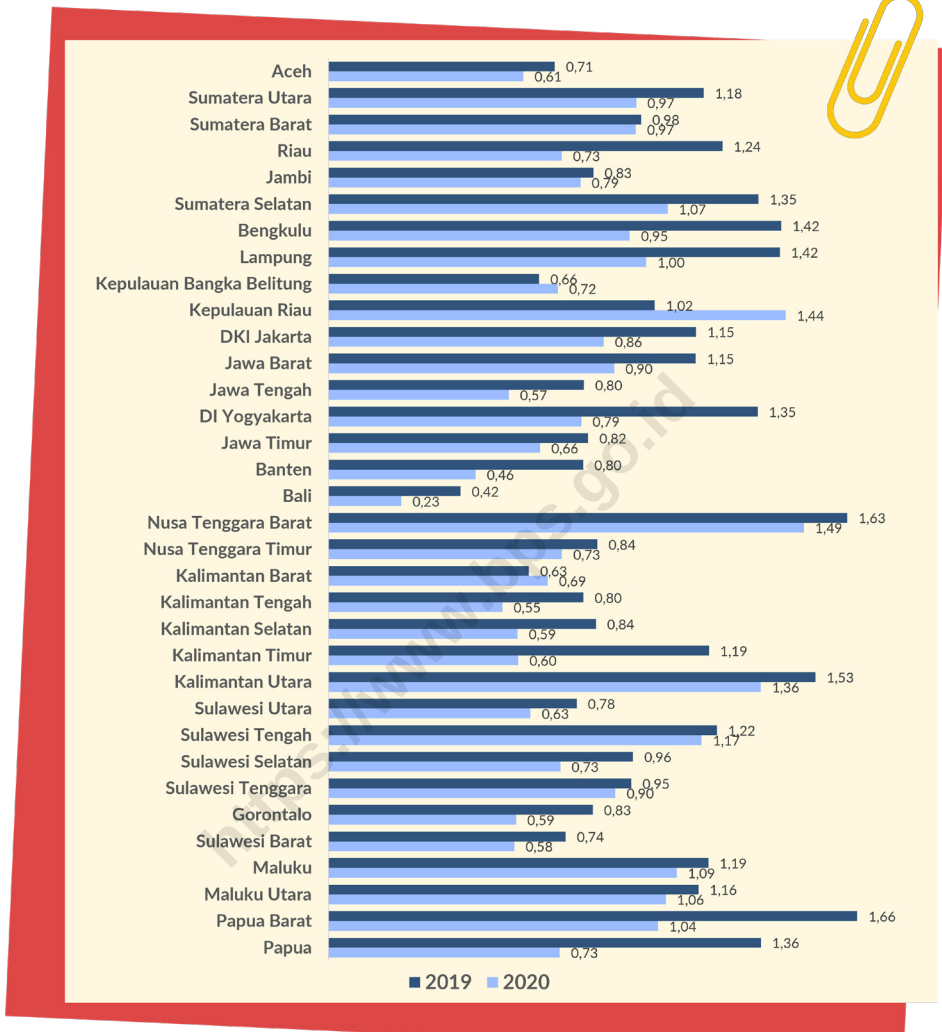


Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2021, BPS
Keterangan: Persentase dihitung terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

Berdasarkan wilayah, persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan menurun di seluruh provinsi. Penurunan terbesar terjadi di Provinsi Papua dari sebelumnya 1,36 persen di tahun 2019 menjadi 0,73 persen di tahun 2020. Di sisi lain, Provinsi Bali memiliki persentase penduduk korban kejahatan terendah, baik pada tahun 2019 (0,42 persen) maupun tahun 2020 (0,23 persen).



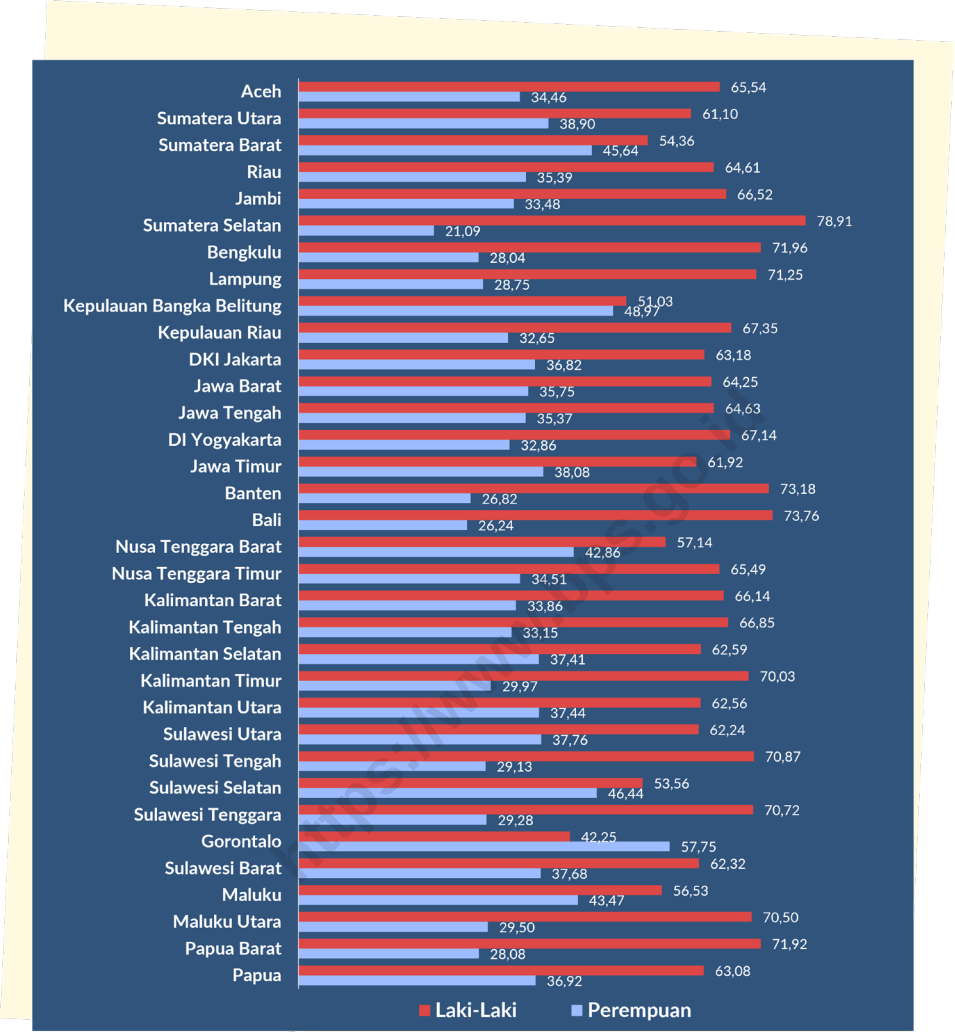
Gambar 3.5. Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Provinsi, 2019-2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2021, BPS

Komposisi penduduk korban kejahatan selama periode tahun 2020 pada setiap provinsi secara umum serupa dengan komposisi secara nasional. Berdasarkan jenis kelamin, persentase laki-laki yang menjadi korban kejahatan lebih banyak dibandingkan perempuan di sebagian besar provinsi. Pada tahun 2020, persentase penduduk korban kejahatan yang berjenis kelamin perempuan terbesar berturut-turut adalah Provinsi Gorontalo (57,75 persen), Kepulauan Bangka-Belitung (48,97 persen), dan Sulawesi Selatan (46,44 persen).

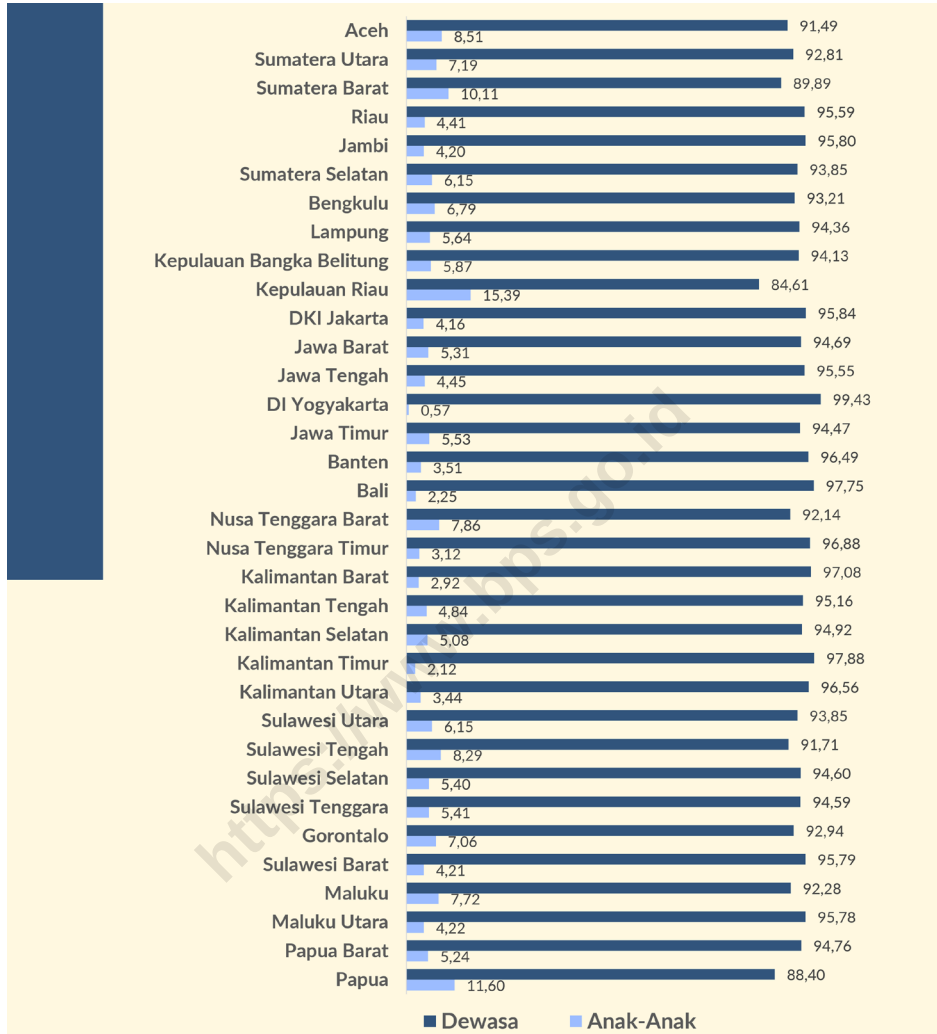
Gambar 3.6. Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Provinsi, 2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021, BPS

Komposisi penduduk korban kejahatan menurut kelompok umur secara keseluruhan untuk semua provinsi menunjukkan bahwa persentase anak-anak yang menjadi korban kejahatan lebih kecil dibandingkan penduduk dewasa (Gambar 3.7). Pada tahun 2020, provinsi dengan persentase penduduk korban kejahatan pada kelompok umur anak-anak terbesar berturut-turut adalah Provinsi Kepulauan Riau (15,39 persen), Papua (11,60 persen), dan Sumatera Barat (10,11 persen).

Gambar 3.7. Persentase Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Berdasarkan Kelompok Umur dan Provinsi, 2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021, BPS

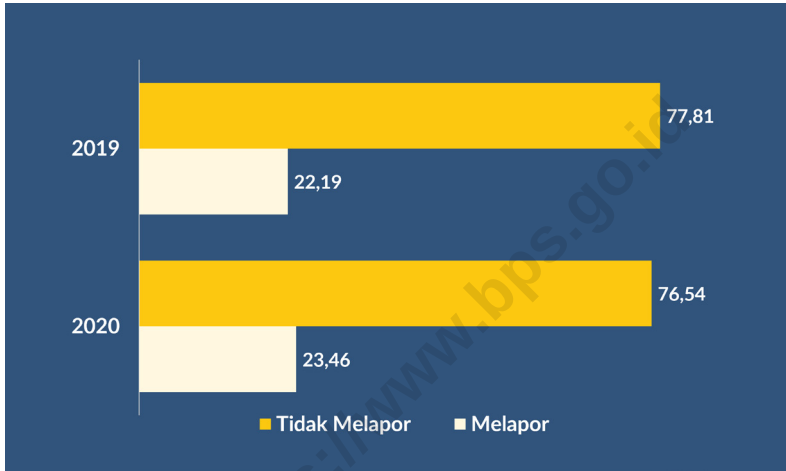
Tingkat Pelaporan kepada Polisi

Tingkat pelaporan kepada polisi digunakan untuk melihat akses kepada keadilan yang dicari dan dilakukan oleh korban kepada pihak yang berwenang. Jika pihak yang berwenang tidak menerima laporan atau diperingatkan mengenai terjadinya korban kejahatan, maka tindakan penyelidikan dan pengadilan tidak dapat dilakukan. Selain itu, indikator ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga penegak hukum dalam membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dialami.



Data Susenas menunjukkan tingkat pelaporan ke polisi (*police report rate*) setiap tahun masih relatif rendah. Pada periode 2019-2020, persentase penduduk Indonesia yang mengalami kejadian kejahatan kemudian melaporkannya ke polisi tidak lebih dari 25 persen (Gambar 3.8). Pada tahun 2020 persentasenya sebesar 23,46 persen, sedikit mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 (22,19 persen).

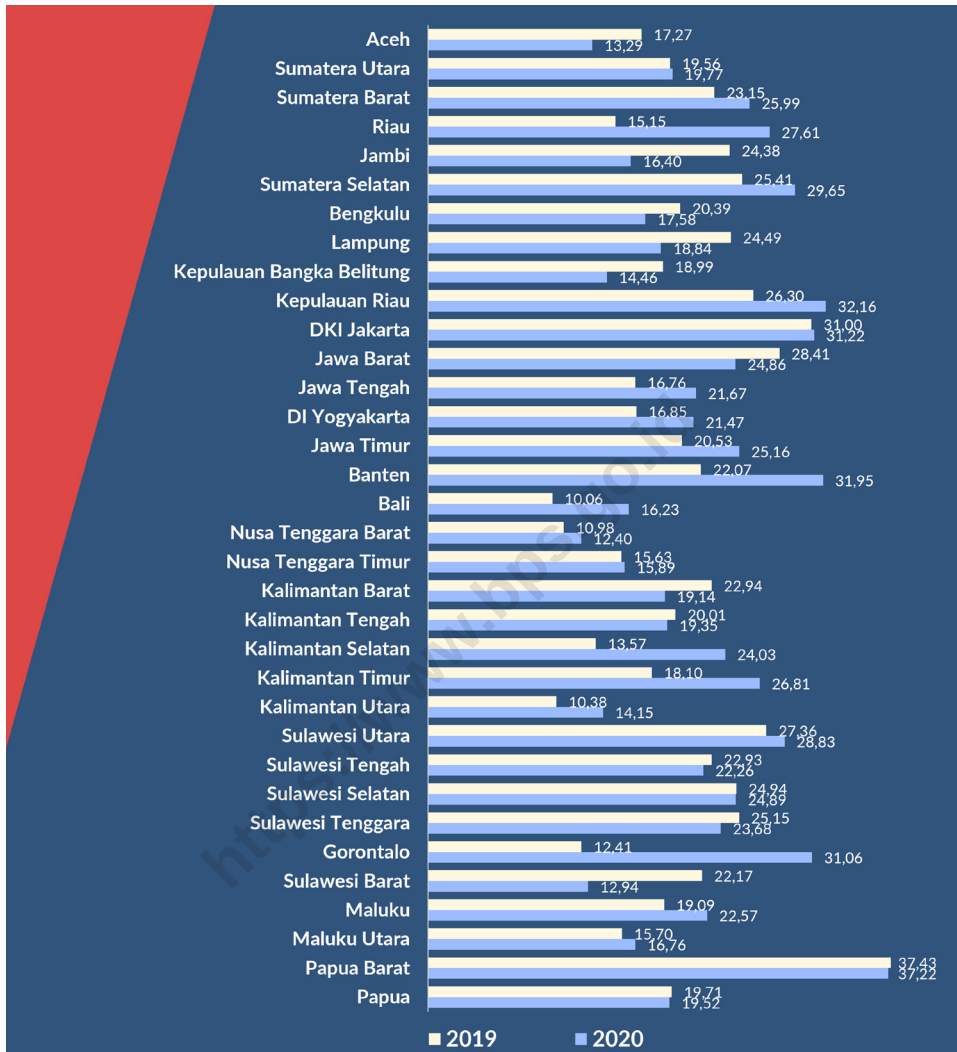
Gambar 3.8. Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi, 2019-2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2021, BPS

Berdasarkan wilayah, persentase penduduk korban kejahatan yang melaporkan ke polisi mengalami peningkatan di 20 provinsi (Gambar 3.9). Peningkatan terbesar berturut-turut terdapat pada Provinsi Gorontalo (18,65 persen), Riau (12,46 persen), dan Kalimantan Selatan (10,46 persen).

Gambar 3.8. Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Berdasarkan Provinsi, 2019-2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2021, BPS

Tingkat pelaporan masyarakat yang mengalami kejahatan masih tergolong rendah, meskipun mengalami peningkatan. Hal tersebut menyebabkan data registrasi polisi masih belum dapat menggambarkan keseluruhan kejadian yang dialami oleh masyarakat. Dengan kata lain, angka gelap kejahatan (*dark number of crimes*) masih relatif tinggi.

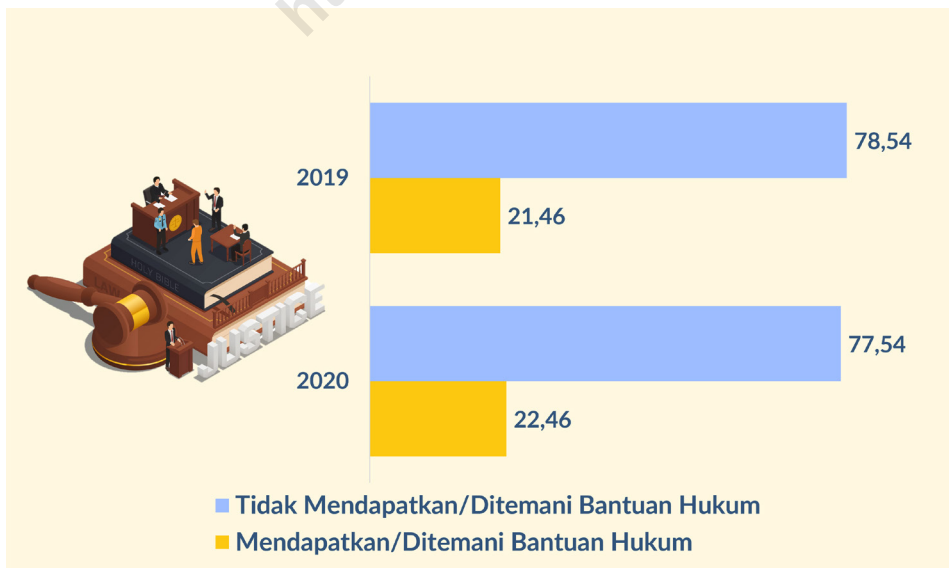


Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal dan dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi.

Bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara, namun ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Gambar 3.10 menunjukkan bahwa persentase penduduk korban kejahatan yang melaporkan ke polisi dan mendapatkan/ditemani bantuan hukum pada tahun 2020 sebesar 22,46 persen, sedikit mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 21,46 persen.

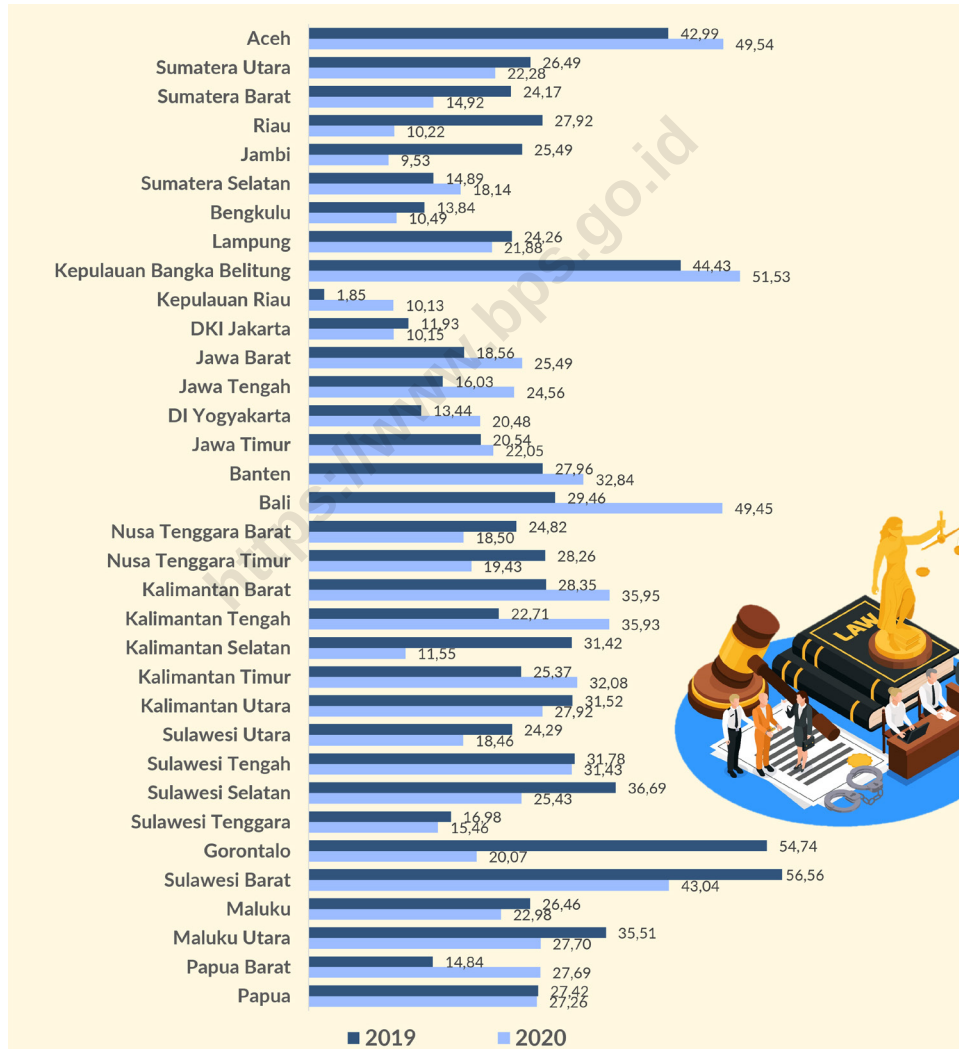
Gambar 3.10. Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi dan Mendapatkan/Ditemani Bantuan Hukum, 2019-2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2021, BPS

Berdasarkan wilayah, persentase penduduk korban kejahatan yang melaporkan ke polisi dan mendapatkan/ditemani bantuan hukum mengalami peningkatan di 14 provinsi (Gambar 3.11). Peningkatan terbesar berturut-turut terdapat pada Provinsi Bali (19,99 persen), Kalimantan Tengah (13,22), dan Papua Barat (12,85 persen).

Gambar 3.11. Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi dan Mendapatkan/Ditemani Bantuan Hukum Berdasarkan Provinsi, 2019-2020



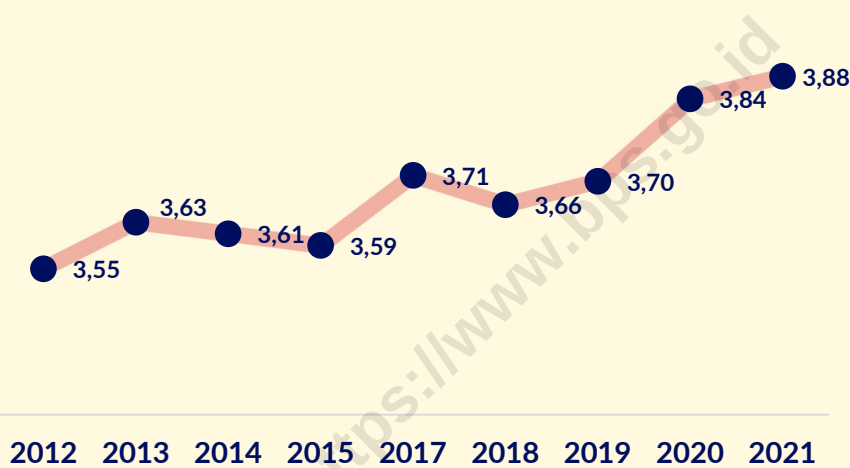
Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020-2021, BPS



<https://www.bps.go.id>



INDIKATOR SDGs TERKAIT KEAMANAN



IPAK 2021 sebesar **3,88** mengalami kenaikan 0,04 poin dibandingkan IPAK 2020

19,62 persen pelaku usaha membayar melebihi ketentuan, baik ketika mengakses layanan sendiri maupun melalui perantara pada tahun 2021





<https://www.bps.go.id>



BAB IV

INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs) TERKAIT KEAMANAN

Deklarasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) dilaksanakan pada 25-27 September 2015 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk dari Indonesia untuk mengesahkan Agenda SDGs. SDGs memiliki 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (2016 hingga 2030) untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku universal untuk seluruh negara, sehingga seluruh negara memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs. Tujuan dan Target SDGs menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global.

Beberapa indikator SDGs terkait dengan kondisi keamanan, terutama ada pada tujuan ke-16. Tujuan 16 SDGs adalah mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua level. Target pada tujuan 16 terkait dengan publikasi ini antara lain secara signifikan mengurangi segala macam bentuk kekerasan dan angka kematian terkait dimana pun, mendukung perangkat hukum di tingkat nasional dan internasional dan akses keadilan yang sama untuk semua, dan secara substansial mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuk. Indikator-indikator yang terkait keamanan diantaranya sebagai berikut:

Indikator	Sumber Data	Frekuensi Waktu Pengumpulan Data
16.1.1.(a). Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Kepolisian Republik Indonesia	Tahunan
16.1.3.(a). Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Tahunan



Indikator	Sumber Data	Frekuensi Waktu Pengumpulan Data
16.1.4*. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	Modul Ketahanan Sosial	Tiga Tahunan
16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)	Tahunan
16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)	Tahunan
16.5.2. Proporsi pelaku bisnis yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap kepada pejabat publik, atau diminta untuk menerima suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan terakhir	Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK)	Tahunan

Target 16.1.1.(a)

Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan pada Satu Tahun Terakhir

Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku Kedua–Kejahatan, Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa yang mengakibatkan kematian, kasus kejahatan pembunuhan adalah kasus-kasus yang terjadi akibat kejahatan tindakan pembunuhan. Jumlah kasus kejahatan pembunuhan yang diukur adalah dalam kurun waktu satu tahun terakhir atau 12 bulan terakhir.

Jumlah kejadian kejahatan pembunuhan yang dicatat terus mengalami penurunan dalam kurun waktu 2016–2020. Terdapat 1.292 kejadian kejahatan pembunuhan pada tahun 2016; 1.150 kejadian di tahun 2017; 1.024 kejadian di tahun 2018; 964 kejadian di tahun 2019; dan 898 di tahun 2020.

Indikator ini dipergunakan untuk mengukur kejahatan kekerasan yang paling ekstrem dan mengindikasikan lemah dan kurangnya tingkat keamanan di masyarakat. Keamanan dari kekerasan adalah salah satu prasyarat bagi individu untuk merasakan hidup yang aman dan aktif. Data ini menunjukkan risiko yang dihadapi masyarakat terhadap kematian akibat pembunuhan.

Target 16.1.3.(a)

Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir

Korban kejahatan kekerasan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan kekerasan. Kejahatan kekerasan yang dimaksud adalah semua tindakan kejahatan kekerasan yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi seseorang, yakni pencurian dengan kekerasan (termasuk penodongan dan perampokan), penganiayaan, dan pelecehan seksual (termasuk perkosaan, pencabulan, dan sebagainya). Sehingga, cakupan korban kejahatan kekerasan adalah penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, dan pelecehan seksual.

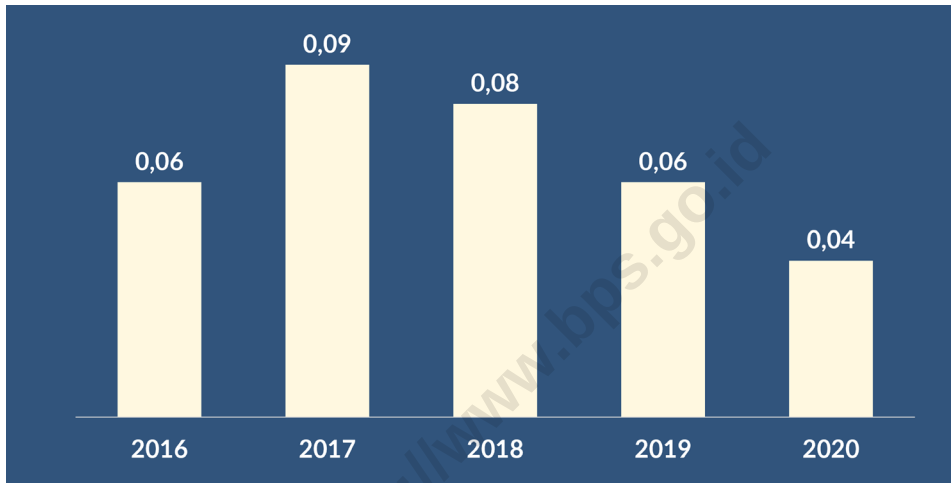
Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan fisik orang lain baik menimbulkan penyakit (luka/cacat/sakit) atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari (luka berat) maupun tidak. Pemukulan, penamparan, pengeroyokan, termasuk kategori penganiayaan.

Pencurian dengan kekerasan adalah mengambil sesuatu barang atau ternak, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya dia dan kawannya yang turut melakukan kejahatan itu sempat melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya. Perampokan, penodongan, pemalakan, penjambretan, termasuk dalam kategori pencurian dengan kekerasan.

Pelecehan seksual adalah perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (cubitan, colekan, tepukan, sentuhan di bagian tubuh tertentu atau gerakan) maupun perbuatan cabul yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh korban. Perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan kekerasan fisik, ancaman kekerasan, maupun tidak. Perkosaan (perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa korban untuk bersetubuh dengannya) termasuk kategori pelecehan seksual.

Penghitungan proporsi jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan adalah jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut dikali 100 persen. Pada tahun 2019, terdapat 0,06 persen penduduk menjadi korban kejahatan kekerasan. Proporsi korban kejahatan kekerasan mengalami penurunan menjadi 0,04 di tahun 2020.

Gambar 4.1. Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir, 2016– 2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017-2021, BPS

Target 16.1.4*

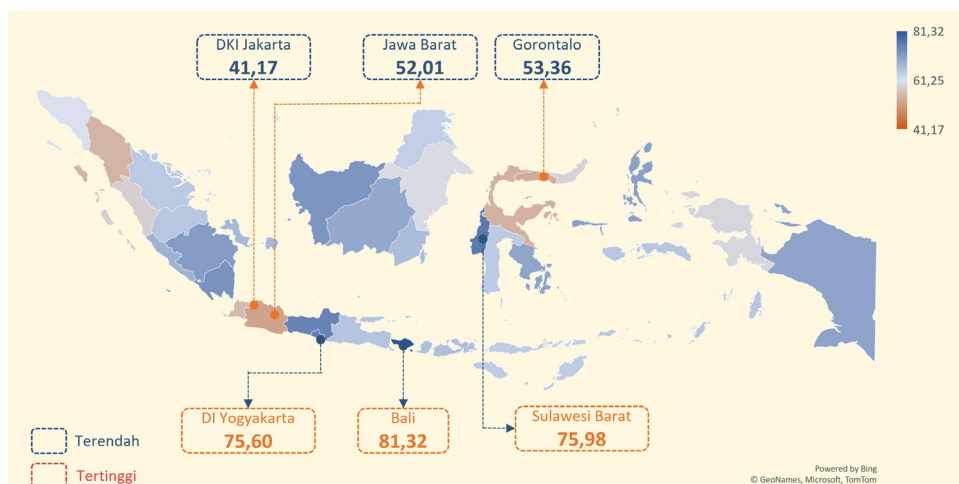
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya

Berdasarkan UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Rasa aman adalah kebutuhan dasar dan merupakan hak dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan yang menempati posisi kedua dari hierarki Maslow. Kebutuhan rasa aman ini meliputi kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosi. Kebutuhan rasa aman dipenuhi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan lain agar bisa terus berjalan dengan baik. Dalam *Universal Declaration of Human Rights* mencantumkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan hak akan kemerdekaan dan keamanan badan.

Proporsi rumah tangga yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya merupakan target 16.1.4* dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Indikator ini merupakan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Rasa aman diukur dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Ketahanan Sosial yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tiga tahun.

Pada tahun 2020, persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya sebesar 62,80 persen pada level nasional. Sehingga bisa dikatakan, lebih dari separuh masyarakat merasa tidak khawatir ketika berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Dilihat lebih rinci pada level provinsi, terdapat variasi dalam persentase rumah tangga yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya. Selama periode 2020, Provinsi Bali merupakan provinsi dengan persentase terbesar masyarakatnya yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya (81,32 persen) diikuti oleh Provinsi Sulawesi Barat (75,98 persen), dan Provinsi DI Yogyakarta (75,60 persen). Provinsi dengan persentase terkecil masyarakatnya yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya adalah Provinsi DKI Jakarta (41,17 persen), diikuti masing-masing oleh Provinsi Jawa Barat (52,01 persen) dan Provinsi Gorontalo (53,36 persen).

Gambar 4.2. Persentase Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendiri di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, 2020



Sumber: Susenas Modul Ketahanan Sosial 2020, BPS

Target 16.3.1.(a)**Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan kepada Polisi**

Indikator ini bertujuan melihat akses terhadap keadilan yang dicari dan dilakukan oleh korban kepada pihak berwenang. Jika pihak berwenang tidak menerima laporan atau diperingatkan terjadinya korban maka tidak akan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk melakukan penyelidikan dan tindakan pengadilan. Selain itu juga untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga berwenang maupun polisi dan lembaga penegak hukum lainnya untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukumnya. Peningkatan jumlah pelapor dan laporan menunjukkan bahwa kekerasan tidak dapat diterima dan harus dilaporkan. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan dan kesadaran untuk melapor, serta kepercayaan kepada pihak berwenang telah meningkat.

Cara perhitungan proporsi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi adalah jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi dibagi dengan jumlah korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir dikalikan 100 persen. Tahun 2019, proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dan melaporkan kepada polisi sebesar 37,50 persen. Terjadi kenaikan pada 2020 menjadi 52,43 persen.

Gambar 4.3. Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 bulan Terakhir yang Melaporkan kepada Polisi, 2016–2020



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017-2021, BPS

Target 16.5.1.(a)

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)

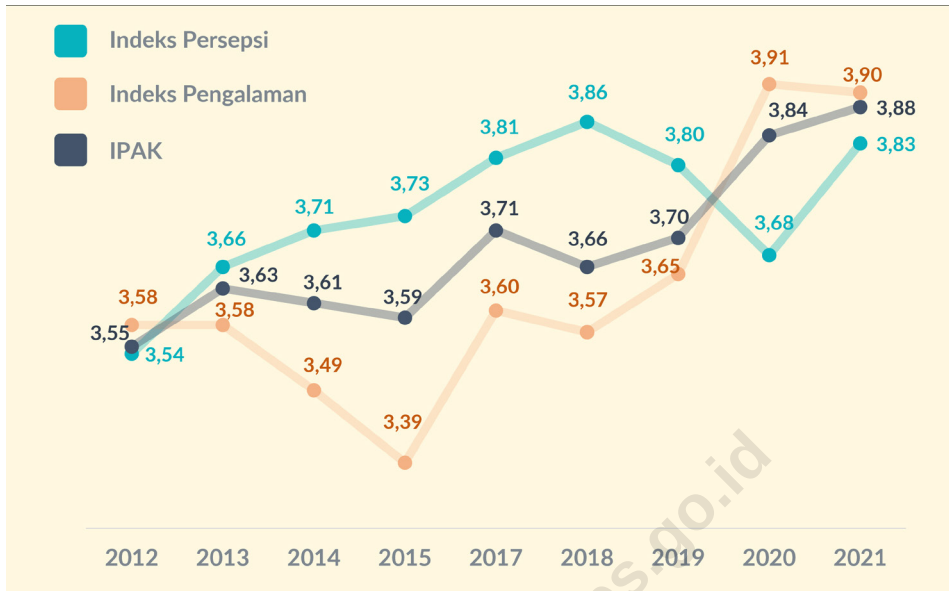
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur Indeks Perilaku Anti Korupsi melalui Survei Perilaku Anti Korupsi. Survei ini telah dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, kecuali tahun 2016. Pada tahun 2021, SPAK dilaksanakan di 34 provinsi dan 171 kabupaten/kota. Estimasi Survei Perilaku Anti Korupsi hanya dapat dilakukan sampai level nasional.

Survei Perilaku Anti Korupsi bertujuan mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku antikorupsi dengan menggunakan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Survei ini mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil (*petty corruption*) dan tidak mencakup korupsi skala besar (*grand corruption*). Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*).

IPAK disusun dari dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa penilaian/pendapat terhadap kebiasaan perilaku antikorupsi di masyarakat yang terdiri dari 3 subdimensi yaitu persepsi keluarga, persepsi komunitas, dan persepsi publik. Dimensi Pengalaman berupa pengalaman antikorupsi yang terjadi di masyarakat yang terdiri atas subdimensi pengalaman publik dan subdimensi pengalaman lainnya.

IPAK cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2012 sampai tahun 2021 (Gambar 4.4). IPAK 2021 sebesar 3,88 mengalami kenaikan sebesar 0,04 poin dibandingkan IPAK 2020 (3,84). Nilai IPAK semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

Gambar 4.4. Perkembangan IPAK Tahun 2012 – 2021



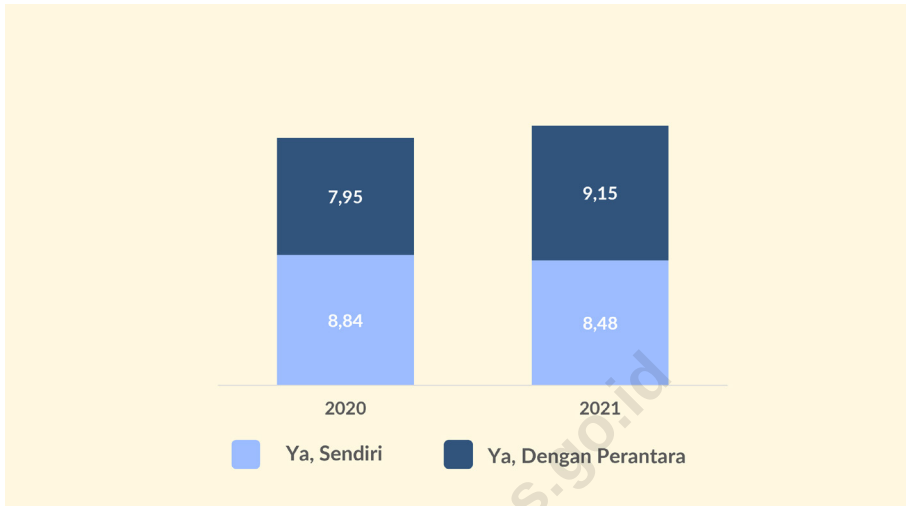
Sumber: Survei Perilaku Anti Korupsi, BPS

Proporsi Masyarakat yang Mengeluarkan Uang/Barang/Fasilitas Melebihi Ketentuan ketika Berurusan dengan Layanan Publik, Selama 12 Bulan Terakhir.

Pada tahun 2021 masih terdapat 17,63 persen masyarakat yang pernah mengeluarkan uang/barang/fasilitas melebihi ketentuan ketika berurusan dengan layanan publik. Angka tersebut naik 0,84 persen dibandingkan tahun 2020 (16,79 persen). Lebih rinci dapat dilihat bahwa persentase masyarakat yang mengeluarkan uang/barang/fasilitas ketika mengakses layanan publik sendiri turun dari 8,84 persen di tahun 2020 menjadi 8,48 persen di tahun 2021. Sementara itu, persentase masyarakat yang mengeluarkan uang/barang/fasilitas ketika mengakses layanan publik melalui perantara naik 1,20 persen dari 7,95 di tahun 2020 menjadi 9,15 di tahun 2021. Kenaikan persentase tersebut diduga disebabkan oleh situasi pandemi Covid-19 yang memungkinkan seseorang enggan mengakses layanan publik sendiri.

Meskipun korupsi masih banyak ditemukan di tempat penyelenggaraan layanan publik, sebagian besar masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil SPAK 2021 yang menunjukkan bahwa 82,37 persen masyarakat yang mengakses layanan publik tidak membayar melebihi ketentuan.

Gambar 4.5. Persentase Masyarakat yang Pernah Berurusan dengan Layanan Publik dan Mengeluarkan Uang/Barang/Fasilitas Melebihi Ketentuan, 2020-2021



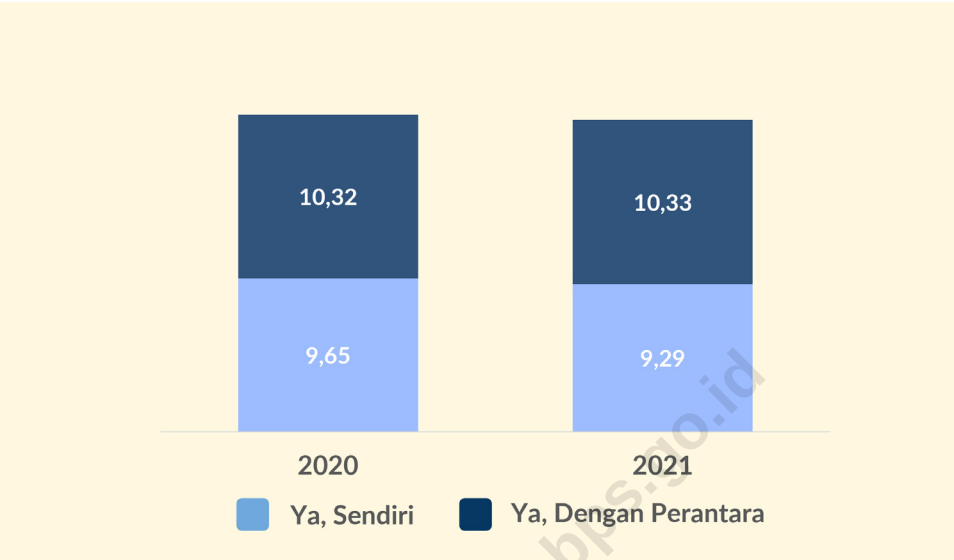
Sumber: Survei Perilaku Anti Korupsi 2021, BPS

Target 16.5.2

Proporsi Pelaku Usaha yang Memiliki Setidaknya Satu Kontak Dengan Pejabat Publik dan yang Membayar Suap kepada Pejabat Publik, atau Diminta untuk Menerima Suap oleh Pejabat Publik Tersebut, Selama 12 Bulan Terakhir.

Pelaku usaha juga sering disebutkan melakukan penyuapan kepada petugas pelayanan publik atau diminta untuk melakukan suap oleh petugas. 19,62 persen pelaku usaha membayar melebihi ketentuan, baik ketika mengakses layanan sendiri maupun melalui perantara pada tahun 2021. Pada gambar 4.6, pelaku usaha tersebut mengeluarkan uang/barang/fasilitas baik ketika mengakses layanan publik sendiri (9,29 persen) maupun melalui perantara (10,33 persen). Meskipun demikian, terdapat 80,38 persen pelaku usaha yang tidak pernah mengeluarkan uang/barang/fasilitas melebihi ketentuan ketika berurusan dengan layanan publik 12 bulan terakhir.

Gambar 4.6. Persentase Masyarakat Pelaku Usaha yang Pernah Berurusan dengan Layanan Publik dan Mengeluarkan Uang/Barang/Fasilitas Melebihi Ketentuan, 2020-2021



Sumber: Survei Perilaku Anti Korupsi 2020-2021, BPS

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.bps.go.id>



<https://www.bps.go.id>



Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2011). Statistik Potensi Desa Indonesia 2011. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2014). Statistik Potensi Desa Indonesia 2014. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Statistik Potensi Desa Indonesia 2018. Jakarta : BPS.
- Hafidhuddin, Didin. et.al. (2001). Berbangsa dan Bernegara Menurut Islam. Jakarta: Pustaka Zaman.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) Indonesia Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Jakarta: Bappenas.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2013). Bandung: Citra Umbara.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2016). Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2015. Jakarta: Mabes POLRI.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2017). Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2016. Jakarta: Mabes POLRI.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2018). Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2017. Jakarta: Mabes POLRI.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2019). Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2018. Jakarta: Mabes POLRI.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2020). Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2019. Jakarta: Mabes POLRI.
- Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes POLRI). (2021). Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas Tahun 2020. Jakarta: Mabes POLRI.
- Maslow, A.H. (1943). *A Theory of Human Motivation*. New York: Psychological Review.
- Savitz. (1978). *Official Police Statistics and Their Limitations*. In L.D. Savitz & N. Johnson (Eds.), *Crime and Society* (pp. 69-81). New York: John Wiley.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
- Soekanto. (2005), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.



Soetopo, H. (2001). Manajemen Konflik. Malang: Universitas Negeri Malang.

The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Tahun 1966 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC). (2015). International Classification Of Crimes For Statistical Purposes. Version 1.0.

<https://www.bps.go.id>



TIM PENYUSUN

Pengarah:

Harmawanti Marhaeni

Editor:

N. Iriana S.Si, M.Si

Pengolah Data:

Devy Setiyowati, S.Si, M.Si.

Hendry Syaputra S.Sos

Riyana Dewi S.ST.

Binda Amanti S.Tr.Stat.

Novita Sari, S.Tr.Stat.

Nawang Indah Cahyaningrum, S.Tr.Stat.

Penulis Naskah:

Devy Setiyowati, S.Si, M.Si.

Hendry Syaputra S.Sos

Riyana Dewi S.ST.

Binda Amanti S.Tr.Stat.

Novita Sari, S.Tr.Stat.

Nawang Indah Cahyaningrum, S.Tr.Stat.

Penata Letak:

Binda Amanti S.Tr.Stat.



<https://www.bps.go.id>



CATATAN TEKNIS

<https://www.bps.go.id>



<https://www.bps.go.id>



Catatan Teknis

Jenis dan Sumber Data

Publikasi ini menggunakan tiga sumber data yang berbeda, yaitu:

1. Data karakteristik kejadian dan pelaku kejahatan yang bersumber dari Laporan dan Evaluasi Situasi Kamtibmas yang diterbitkan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) Tahun 2018, 2019, dan 2020;
2. Data korban kejahatan yang bersumber dari Susenas Tahun 2019 dan 2020; dan
3. Data jumlah desa menurut kejadian kejahatan, kejadian konflik massal dan karakteristiknya, serta upaya dalam menjaga keamanan, bersumber dari Pendataan Potensi Desa (Podes) 2011, 2014, dan 2018.

Laporan Evaluasi Data Kriminalitas Polri

Laporan Evaluasi Data Kriminalitas Polri merupakan laporan tahunan Mabes Polri yang menyajikan gambaran mengenai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat pada level nasional dan provinsi. Laporan yang disajikan meliputi aspek kejahatan/kriminalitas dan bukan kejahatan. Data kriminalitas yang disajikan meliputi karakteristik kejadian kejahatan, pelaku, dan jumlah kerugian.

Data kriminalitas ini hanya mencakup seluruh peristiwa atau kejadian kriminalitas yang dilaporkan oleh masyarakat, atau aksi kriminalitas yang pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Mengingat masih tingginya keengganan masyarakat untuk melapor, diduga data yang dihasilkan cenderung "*under-estimate*". Artinya, kejadian kriminalitas yang sesungguhnya diduga lebih besar dari yang dilaporkan. Dengan kata lain, angka gelap (*dark number*) kejahatan masih relatif besar.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) Tahun 2020 dan 2021

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) merupakan survei yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) secara berkala setiap tahun. Data Susenas mencakup dua kelompok data, yaitu Kor dan Modul. Data Kor mencakup data pokok dari beberapa aspek kesejahteraan rakyat, termasuk kriminalitas. Data



kriminalitas yang dikumpulkan adalah data jumlah dan karakteristik rumah tangga/individu yang menjadi korban kejahatan. Jumlah sampel Kor Susenas adalah sebanyak 300.000 rumah tangga, sehingga bisa dilakukan estimasi hingga level kabupaten/kota.

Data yang dikumpulkan dalam Modul Susenas hanya terfokus pada salah satu aspek kesejahteraan rakyat. Namun demikian, cakupannya lebih lengkap dan lebih rinci dibandingkan dengan data serupa yang dicakup dalam Kor. Modul Susenas umumnya diberi nama sesuai dengan aspek yang menjadi fokusnya, misalnya Modul Kesehatan, Modul Pendidikan, dan Modul Ketahanan Sosial. Data Modul Susenas dikumpulkan setiap tahun dan untuk modul yang sama akan berulang setiap tiga tahun sekali. Jumlah sampel Modul Susenas adalah sebanyak 75.000 rumah tangga, sehingga hanya dimungkinkan untuk menghasilkan estimasi hingga wilayah provinsi.

Sejak pertama kali kegiatan Susenas diselenggarakan tahun 1963, Susenas telah memiliki modul kriminalitas. Modul ini mencakup data-data kriminal secara lengkap dan rinci dengan pendekatan korban rumah tangga/individu. Data yang dikumpulkan antara lain, meliputi data jenis dan frekuensi kejahatan, pelaku kejahatan, akibat yang ditimbulkan secara fisik maupun psikis, serta kerugian yang diderita. Namun, karena beberapa hal, modul kriminalitas sejak tahun 1995 tidak dilakukan lagi.

Pada 2015, demi penyempurnaan alat ukur dan agar survei korban bisa semakin akurat dalam menangkap pengalaman individu, dilakukan perubahan dalam instrumen kor Susenas. Sebelumnya hanya terdapat empat jenis kejahatan yang terdapat di Susenas kor yakni pencurian, pencurian dengan kekerasan, penipuan, dan lainnya. Sementara pada 2015, BPS melakukan perluasan cakupan instrumen menjadi lima jenis kejahatan yakni pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, dan lainnya.

Perubahan ini menjadikan data Susenas bisa menangkap lebih banyak pengalaman korban kejahatan. Namun, implikasinya pengguna data tidak bisa serta merta melakukan perbandingan antara data hasil Susenas 2015 dengan data tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada jumlah kejahatan berdasarkan jenisnya. Data Susenas 2020 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari-31 Desember 2019. Sedangkan Data Susenas 2021 menggambarkan pengalaman responden pada kurun waktu 1 Januari-31 Desember 2020.

Statistik Podes (Potensi Desa) 2011, 2014, dan 2018

Data Statistik Potensi Desa (Podes) merupakan satu-satunya data kewilayahan yang dikumpulkan BPS. Pendataan Podes dilakukan di seluruh desa/kelurahan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk desa persiapan, desa definitif, Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT), Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Pemukiman Masyarakat Terasing (SPMT). Responden untuk pendataan Podes adalah Kepala Desa/Lurah atau aparat desa/kelurahan lainnya dan narasumber lainnya, seperti petugas kesehatan yang bertugas di desa/kelurahan (dokter puskesmas/bidan desa), guru/kepala sekolah, Petugas Penyuluh Pertanian (PPL), dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).

Salah satu fungsi pendataan Podes adalah menyajikan data atau informasi tentang desa/kelurahan untuk memenuhi keperluan perencanaan kegiatan sensus. Data atau informasi tersebut antara lain adalah tentang luas wilayah, jumlah RW, jumlah RT, dan satuan lingkungan setempat (SLS) yang merupakan bagian wilayah desa/kelurahan beserta batas-batas wilayahnya, keadaan geografis, keadaan topografis, jumlah dan struktur penduduk, dan struktur perekonomian. Sejalan dengan fungsinya tersebut, pelaksanaan pendataan Podes biasanya dilakukan menjelang penyelenggaraan suatu sensus.

Data yang dikumpulkan dalam Podes juga mencakup data tentang jenis dan jumlah fasilitas umum yang ada di desa/kelurahan, baik fasilitas sosial seperti posyandu, puskesmas, sekolah, mesjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya, maupun fasilitas ekonomi seperti pasar, pertokoan, supermarket, KUD, sarana transportasi, Bank, dan lembaga keuangan/perkreditan lainnya.

Pendataan Podes juga mencakup pengumpulan data tentang jenis dan jumlah kejadian-kejadian penting yang sedang atau pernah terjadi di desa, seperti jenis dan jumlah bencana alam, wabah penyakit, kejadian kejahatan, dan konflik massal, baik antarwarga desa maupun antardesa.

Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi dari berbagai variabel atau karakteristik yang digunakan dalam publikasi ini merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data yang bersangkutan. Sejalan dengan itu, penjelasan mengenai konsep dan definisi pada bagian ini akan diuraikan sesuai dengan urutan sumber data.



Konsep-Konsep Kriminalitas dalam Data Polri

A. Peristiwa Kejahatan (Kriminalitas)/Pelanggaran

1. Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
2. Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindak-lanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.
3. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah :
 - Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa;
 - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang;
 - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichtmatigheid* (setiap tindakan polisi sudah dianggap sah berdasarkan atau bersumber kepada kekuasaan atau kewenangan umum);
 - Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian;
 - Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia; dan
 - Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

B. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah:

- Orang yang melakukan kejahatan
- Orang yang turut melakukan kejahatan
- Orang yang menyuruh melakukan kejahatan
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan
- Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan

C. Tahanan

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan kurang dari 20 hari.

D. Kerugian

Kerugian adalah hilang, rusak, atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

E. Korban

Korban kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

Konsep-Konsep Kejahatan dalam Susenas dan Podes

A. Kejahatan

Konsep dan definisi kejahatan yang digunakan dalam Susenas dan Podes pada dasarnya merujuk pada konsep kejahatan yang digunakan oleh Polri maupun KUHP. Namun, karena konsep ini ditanyakan pada responden yang umumnya awam tentang hukum, pengertian tentang konsep kejahatan ini lebih didasarkan pada pengakuan, pemahaman, dan persepsi responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya. Sejalan dengan itu, jenis-jenis tindak kejahatan yang dicakup Susenas atau Podes lebih fokus pada jenis kejahatan yang dikenal masyarakat, misalnya perampokan untuk menggantikan konsep pencurian dengan kekerasan yang biasa digunakan Polri.

B. Korban Kejahatan

Konsep korban kejahatan dalam Susenas adalah korban/sasaran dari tindak kejahatan yang terjadi dalam rentang waktu selama setahun yang lalu. Korban kejahatan dalam Susenas dikelompokkan menjadi dua klasifikasi, yaitu rumah tangga dan individu. Penentuan kriteria korban kejahatan ini hanya berdasarkan pada pengakuan responden tanpa melihat lagi aspek hukumnya.

Klasifikasi korban kejahatan menurut umur:

- Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 18 tahun
- Dewasa adalah orang yang berumur 18 tahun dan lebih

C. Konflik Massal

Konsep konflik massal yang digunakan dalam Podes merujuk pada konflik fisik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah desa/kelurahan yang meliputi:

- Perkelahian antarkelompok warga adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari;



- Perkelahian warga antar desa/kelurahan adalah perkelahian antara warga desa /kelurahan/nagari dengan warga desa/kelurahan/nagari lainnya;
- Perkelahian warga dengan aparat keamanan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat keamanan;
- Perkelahian warga dengan aparat pemerintah adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah;
- Perkelahian antar pelajar/mahasiswa adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain;
- Perkelahian antar suku/etnis adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/kelurahan/nagari; dan
- Lainnya: perkelahian antar warga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antar agama, perkelahian antar aparat keamanan, dan sebagainya.

Penjelasan Teknis

1. Angka Indeks Kejahatan/*Crime Index* (I_t)

$$I_t = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$$

di mana

t_0 = tahun dasar

t = tahun t

2. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk/*Crime Rate*

$$\text{Crime Rate} = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100.000$$

3. Skala Waktu Kejahatan Tahun t /*Crime Clock*

$$\text{Crime Clock} = \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan tahun } t} \times (\text{detik})$$

4. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan/*Crime Clearence*

$$\text{Crime Clearence} = \frac{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Peristiwa Kejahatan yang Dilaporkan}} \times 100$$

LAMPIRAN

<https://www.bps.go.id>



<https://www.bps.go.id>





DATA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

<https://www.kns.go.id/>



Tabel 2.1.1 Indikator Kriminalitas Nasional, 2018-2020

Jenis Indikator	Tahun		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>)	294 281	269 324	247 218
Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>)	191 112	183 605	176 726
Persentase Penyelesaian Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>)	64,94	68,17	71,00
Selang Waktu Terjadinya Kejahatan (<i>Crime Clock</i>)	0.01'47"	0.01'57"	0.02'07"
Risiko Penduduk Terkena Kejahatan (<i>Crime Rate</i>)	113	103	94

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Catatan:
Polda Metro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3 (Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan)

Tabel 2.1.2 Peringkat Polda Menurut Jumlah Kejahatan dan Risiko Penduduk Terkena Kejahatan, 2020

No	Polda	Jumlah Kejahatan	No	Polda	Risiko Penduduk Terkena Kejahatan
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1	Sumatera Utara	32 990	1	Papua Barat	328
2	Metro Jaya	26 585	2	Maluku	303
3	Jawa Timur	17 642	3	Sulawesi Utara	252
4	Sulawesi Selatan	12 815	4	Sumatera Utara	231
5	Sumatera Selatan	12 189	5	Gorontalo	214
6	Jawa Barat	11 256	6	Papua	208
7	Jawa Tengah	10 712	7	DI Yogyakarta	200
8	Nusa Tenggara Barat	8 591	8	Kalimantan Selatan	196
9	Riau	8 194	9	Sulawesi Tengah	179
10	Sumatera Barat	7 992	10	Bengkulu	172
11	Aceh	7 745	11	Nusa Tenggara Barat	167
12	DI Yogyakarta	7 721	12	Sumatera Barat	150
13	Lampung	7 594	13	Aceh	149
14	Papua	6 962	14	Sumatera Selatan	147
15	Sulawesi Utara	6 274	15	Kalimantan Utara	146
16	Sulawesi Tengah	5 454	16	Sulawesi Selatan	145
17	Maluku	5 350	17	Jambi	134
18	Kalimantan Selatan	5 206	18	Kep. Bangka Belitung	133
19	Nusa Tenggara Timur	4 790	19	Kepulauan Riau	127
20	Jambi	4 709	20	Sulawesi Barat	126
21	Banten	4 250	21	Riau	123
22	Kalimantan Barat	3 858	22	Metro Jaya	105
23	Kalimantan Timur	3 609	23	Kalimantan Timur	100
24	Bengkulu	3 333	24	Lampung	92
25	Papua Barat	3 162	25	Nusa Tenggara Timur	88
26	Kepulauan Riau	2 843	26	Sulawesi Tenggara	80
27	Kalimantan Tengah	2 629	27	Kalimantan Barat	76
28	Bali	2 597	28	Maluku Utara	68
29	Gorontalo	2 518	29	Banten	63
30	Sulawesi Tenggara	2 148	30	Kalimantan Tengah	62
31	Kep. Bangka Belitung	1 931	31	Bali	59
32	Sulawesi Barat	1 704	32	Jawa Timur	44
33	Kalimantan Utara	1 015	33	Jawa Tengah	31
34	Maluku Utara	850	34	Jawa Barat	29
INDONESIA		247 218	INDONESIA		94

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri



Tabel 2.1.3 Jumlah Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2018-2020

Kepolisian Daerah	Tahun		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	8 758	7 483	7 745
Sumatera Utara	32 922	30 831	32 990
Sumatera Barat	12 953	11 064	7 992
Riau	7 246	6 570	8 194
Jambi	6 313	6 848	4 709
Sumatera Selatan	13 558	12 861	12 189
Bengkulu	3 389	3 453	3 333
Lampung	8 963	8 534	7 594
Kep. Bangka Belitung	2 048	1 953	1 931
Kepulauan Riau	3 409	3 159	2 843
Metro Jaya	34 655	31 934	26 585
Jawa Barat	16 209	13 145	11 256
Jawa Tengah	9 127	10 317	10 712
DI Yogyakarta	6 731	6 650	7 721
Jawa Timur	26 295	26 985	17 642
Banten	3 623	3 287	4 250
Bali	3 212	3 047	2 597
Nusa Tenggara Barat	6 451	8 185	8 591
Nusa Tenggara Timur	6 257	5 865	4 790
Kalimantan Barat	5 814	4 721	3 858
Kalimantan Tengah	5 699	2 444	2 629
Kalimantan Selatan	2 667	5 375	5 206
Kalimantan Timur	6 287	4 417	3 609
Kalimantan Utara	396	876	1 015
Sulawesi Utara	10 247	7 425	6 274
Sulawesi Tengah	9 379	6 265	5 454
Sulawesi Selatan	21 498	16 008	12 815
Sulawesi Tenggara	1 263	1 213	2 148
Gorontalo	2 836	2 367	2 518
Sulawesi Barat	1 817	1 863	1 704
Maluku	2 751	3 495	5 350
Maluku Utara	722	718	850
Papua Barat	3 475	2 972	3 162
Papua	7 311	6 994	6 962
INDONESIA	294 281	269 324	247 218

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Tabel 2.1.4 Jumlah Kejahatan yang Diselesaikan Menurut Kepolisian Daerah, 2018-2020

Kepolisian Daerah	Tahun		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	3 352	2 648	2 936
Sumatera Utara	22 443	23 094	22 665
Sumatera Barat	5 864	5 996	6 708
Riau	3 743	2 938	3 122
Jambi	4 347	4 711	4 028
Sumatera Selatan	10 144	8 902	9 356
Bengkulu	2 833	2 332	2 278
Lampung	6 439	6 438	4 873
Kep. Bangka Belitung	1 137	1 066	1 303
Kepulauan Riau	2 037	2 000	1 900
Metro Jaya	30 577	31 836	31 225
Jawa Barat	12 150	10 995	9 931
Jawa Tengah	6 980	6 668	3 894
DI Yogyakarta	2 486	4 506	7 383
Jawa Timur	15 446	12 057	9 305
Banten	2 223	2 071	3 106
Bali	2 407	2 537	2 344
Nusa Tenggara Barat	3 811	4 011	4 233
Nusa Tenggara Timur	4 400	3 209	2 360
Kalimantan Barat	4 478	4 216	3 933
Kalimantan Tengah	4 114	2 131	2 074
Kalimantan Selatan	2 025	4 371	4 284
Kalimantan Timur	4 763	3 724	3 224
Kalimantan Utara	277	739	827
Sulawesi Utara	5 507	4 717	4 860
Sulawesi Tengah	5 289	4 095	3 740
Sulawesi Selatan	11 521	11 451	10 632
Sulawesi Tenggara	879	418	567
Gorontalo	1 829	1 718	1 781
Sulawesi Barat	1 021	1 137	1 082
Maluku	667	1 538	1 421
Maluku Utara	405	437	470
Papua Barat	955	1 314	1 005
Papua	4 563	3 584	3 876
INDONESIA	191 112	183 605	176 726

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri



Tabel 2.1.5 Persentase Penyelesaian Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2018-2020

Kepolisian Daerah	Tahun		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	38,27	35,39	37,91
Sumatera Utara	68,17	74,91	68,70
Sumatera Barat	45,27	54,19	83,93
Riau	51,66	44,72	38,10
Jambi	68,86	68,79	85,54
Sumatera Selatan	74,82	69,22	76,76
Bengkulu	83,59	67,54	68,35
Lampung	71,84	75,44	64,17
Kep. Bangka Belitung	55,52	54,58	67,48
Kepulauan Riau	59,75	63,31	66,83
Metro Jaya	88,23	99,69	100,00
Jawa Barat	74,96	83,64	88,23
Jawa Tengah	76,48	64,63	36,35
DI Yogyakarta	36,93	67,76	95,62
Jawa Timur	58,74	44,68	52,74
Banten	61,36	63,01	73,08
Bali	74,93	83,26	90,26
Nusa Tenggara Barat	59,08	49,00	49,27
Nusa Tenggara Timur	70,32	54,71	49,27
Kalimantan Barat	77,02	89,30	100,00
Kalimantan Tengah	72,19	87,19	78,89
Kalimantan Selatan	75,93	81,32	82,29
Kalimantan Timur	75,76	84,31	89,33
Kalimantan Utara	69,95	84,36	81,48
Sulawesi Utara	53,74	63,53	77,46
Sulawesi Tengah	56,39	65,36	68,57
Sulawesi Selatan	53,59	71,53	82,97
Sulawesi Tenggara	69,60	34,46	26,40
Gorontalo	64,49	72,58	70,73
Sulawesi Barat	56,19	61,03	63,50
Maluku	24,25	44,01	26,56
Maluku Utara	56,09	60,86	55,29
Papua Barat	27,48	44,21	31,78
Papua	62,41	51,24	55,67
INDONESIA	64,94	68,17	71,49

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Tabel 2.1.6 Selang Waktu Terjadinya Kejahatan Menurut Kepolisian Daerah, 2018-2020

Kepolisian Daerah	Tahun		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	01.00'00"	01.10'14"	01.07'51"
Sumatera Utara	00.15'57"	00.17'02"	00.15'55"
Sumatera Barat	00.40'34"	00.47'30"	01.05'45"
Riau	01.12'32"	01.20'00"	01.04'08"
Jambi	01.23'15"	01.16'45"	01.51'36"
Sumatera Selatan	00.38'46"	00.40'52"	00.43'07"
Bengkulu	02.35'05"	02.32'12"	02.37'41"
Lampung	00.58'38"	01.01'35"	01.09'12"
Kep. Bangka Belitung	04.16'38"	04.29'07"	04.32'11"
Kepulauan Riau	02.34'10"	02.46'22"	03.04'52"
Metro Jaya	00.15'09"	00.16'27"	00.19'46"
Jawa Barat	00.32'25"	00.39'59"	00.46'41"
Jawa Tengah	00.57'35"	00.50'56"	00.49'03"
DI Yogyakarta	01.18'05"	01.19'02"	01.08'04"
Jawa Timur	00.19'59"	00.19'28"	00.29'47"
Banten	02.25'04"	02.39'54"	02.03'40"
Bali	02.43'37"	02.52'29"	03.22'23"
Nusa Tenggara Barat	01.21'28"	01.04'12"	01.01'10"
Nusa Tenggara Timur	01.24'00"	01.29'36"	01.49'43"
Kalimantan Barat	01.30'24"	01.51'19"	02.16'14"
Kalimantan Tengah	01.32'13"	03.35'03"	03.19'55"
Kalimantan Selatan	03.17'04"	01.37'47"	01.40'57"
Kalimantan Timur	01.23'36"	01.58'59"	02.25'38"
Kalimantan Utara	22.17'16"	10.00'00"	22.07'16"
Sulawesi Utara	00.51'17"	01.10'47"	01.23'46"
Sulawesi Tengah	00.56'02"	01.23'53"	01.36'22"
Sulawesi Selatan	00.24'26"	00.32'50"	00.41'00"
Sulawesi Tenggara	06.56'09"	07.13'18"	04.04'41"
Gorontalo	03.05'19"	03.42'03"	03.28'44"
Sulawesi Barat	04.49'16"	04.42'07"	05.08'27"
Maluku	03.11'03"	02.30'23"	01.38'14"
Maluku Utara	12.07'58"	12.12'02"	10.24'13"
Papua Barat	02.31'15"	02.56'51"	02.46'13"
Papua	01.11'53"	01.15'09"	01.15'29"
INDONESIA	00.01'47"	00.01'57"	00.02'07"

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Tabel 2.1.7 Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk Menurut Kepolisian Daerah, 2018-2020

Kepolisian Daerah	Tahun		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	169	144	149
Sumatera Utara	231	216	231
Sumatera Barat	243	208	150
Riau	109	99	123
Jambi	180	195	134
Sumatera Selatan	164	156	147
Bengkulu	175	179	172
Lampung	108	103	92
Kep. Bangka Belitung	143	136	133
Kepulauan Riau	164	152	127
Metro Jaya	137	127	105
Jawa Barat	42	34	29
Jawa Tengah	27	30	31
DI Yogyakarta	179	177	200
Jawa Timur	67	69	44
Banten	54	49	63
Bali	76	72	60
Nusa Tenggara Barat	130	165	167
Nusa Tenggara Timur	118	111	88
Kalimantan Barat	118	96	76
Kalimantan Tengah	138	94	62
Kalimantan Selatan	102	130	196
Kalimantan Timur	176	124	100
Kalimantan Utara	57	127	146
Sulawesi Utara	416	302	252
Sulawesi Tengah	316	211	179
Sulawesi Selatan	255	190	145
Sulawesi Tenggara	49	47	81
Gorontalo	243	203	214
Sulawesi Barat	144	148	125
Maluku	158	200	303
Maluku Utara	60	59	69
Papua Barat	380	325	328
Papua	224	214	208
INDONESIA	113	103	94

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Tabel 2.1.8 Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok Jenis Kejahatan, 2018-2020

Kelompok/Jenis Kejahatan	Tahun		
	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	1 024	964	898
Kejahatan terhadap Fisik/Badan			
Penganiayaan Berat	11 191	10 323	8 373
Penganiayaan Ringan	20 309	20 431	20 195
Kekerasan dalam Rumah Tangga	8 067	8 229	8 104
Kejahatan terhadap Kesusilaan			
Perkosaan	1 288	1 172	1 336
Pencabulan	3 970	4 061	5 536
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang			
Penculikan	222	189	254
Memperkerjakan Anak di Bawah Umur	2 323	2 114	1 716
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	7 410	6 421	5 647
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api	151	143	151
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	862	757	740
Kejahatan terhadap Hak Milik /Barang Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian	25 269	22 271	23 984
Pencurian dengan Pemberatan	31 571	26 931	25 686
Pencurian Kendaraan Bermotor	27 731	23 476	18 557
Pengrusakan/Penghancuran Barang	4 910	4 342	3 720
Pembakaran dengan Sengaja	521	715	518
Penadahan	755	595	799
Kejahatan Terkait Narkotika			
Narkotika dan Psikotropika	39 588	36 478	36 611
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	25 543	22 220	21 175
Penggelapan	17 813	16 612	15 546
Korupsi	496	488	376
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	3 600	2 964	3 662

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Tabel 2.1.9 Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok/Jenis Kejahatan dan Bulan, 2020

Kelompok/Jenis Kejahatan	Bulan		
	Januari	Februari	Maret
(1)	(2)	(3)	(4)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	56	67	78
Kejahatan terhadap Fisik/Badan			
Penganiayaan Berat	891	980	846
Penganiayaan Ringan	1 931	1 342	1 768
Kekerasan dalam Rumah Tangga	757	770	767
Kejahatan terhadap Kesusilaan			
Perkosaan	108	96	89
Pencabulan	458	387	445
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang			
Penculikan	13	23	25
Memperkerjakan Anak di Bawah Umur	213	176	247
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	475	452	491
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api	17	9	10
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	84	97	124
Kejahatan terhadap Hak Milik /Barang Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian	2 338	2 152	2 294
Pencurian dengan Pemberatan	2 404	2 455	2 409
Pencurian Kendaraan Bermotor	1 880	1 584	1 739
Pengrusakan/Penghancuran Barang	347	285	341
Pembakaran dengan Sengaja	34	34	59
Penadahan	58	92	72
Kejahatan Terkait Narkotika			
Narkotika dan Psikotropika	3 558	4 119	3 276
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	1 930	1 684	1 821
Penggelapan	1 348	1 305	1 235
Korupsi	29	30	31
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	320	216	235

Tabel 2.1.9 Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok/Jenis Kejahatan dan Bulan, 2020 (lanjutan)

Kelompok/Jenis Kejahatan	Bulan		
	April	Mei	Juni
(1)	(5)	(6)	(7)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	61	82	76
Kejahatan terhadap Fisik/Badan			
Penganiayaan Berat	611	680	788
Penganiayaan Ringan	1 515	1 796	1 863
Kekerasan dalam Rumah Tangga	769	703	718
Kejahatan terhadap Kesusilaan			
Perkosaan	101	85	113
Pencabulan	1 543	325	417
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang			
Penculikan	22	20	19
Memperkerjakan Anak di Bawah Umur	124	113	211
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	518	514	536
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api	17	16	16
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	47	85	56
Kejahatan terhadap Hak Milik /Barang Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian	2 019	1 695	1 892
Pencurian dengan Pemberatan	2 355	1 940	2 165
Pencurian Kendaraan Bermotor	1 836	1 390	1 769
Pengrusakan/Penghancuran Barang	332	295	334
Pembakaran dengan Sengaja	39	51	47
Penadahan	72	40	75
Kejahatan Terkait Narkotika			
Narkotika dan Psikotropika	2 638	2 186	3 371
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	1 854	1 511	1 697
Penggelapan	1 166	1 109	1 386
Korupsi	35	26	31
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	189	194	210

Tabel 2.1.9 Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok/Jenis Kejahatan dan Bulan, 2020 (lanjutan)

Kelompok/Jenis Kejahatan	Bulan		
	Juli	Agustus	September
(1)	(8)	(9)	(10)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	112	71	83
Kejahatan terhadap Fisik/Badan			
Penganiayaan Berat	889	839	708
Penganiayaan Ringan	1 531	1 632	1 639
Kekerasan dalam Rumah Tangga	673	792	735
Kejahatan terhadap Kesusilaan			
Perkosaan	81	109	92
Pencabulan	362	345	430
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang			
Penculikan	17	21	14
Memperkerjakan Anak di Bawah Umur	140	138	155
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	514	542	437
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api	17	10	15
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	77	45	60
Kejahatan terhadap Hak Milik /Barang Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian	1 955	1 931	1 855
Pencurian dengan Pemberatan	2 094	2 028	1 739
Pencurian Kendaraan Bermotor	1 635	1 884	1 621
Pengrusakan/Penghancuran Barang	346	336	295
Pembakaran dengan Sengaja	43	35	47
Penadahan	81	63	74
Kejahatan Terkait Narkotika			
Narkotika dan Psikotropika	3 011	3 468	3 631
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	1 828	1 718	1 697
Penggelapan	1 406	1 333	1 323
Korupsi	38	37	35
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	227	274	214

Tabel 2.1.9 Jumlah Kejahatan Menurut Kelompok/Jenis Kejahatan dan Bulan, 2020 (lanjutan)

Kelompok/Jenis Kejahatan	Bulan		
	Oktober	November	Desember
(1)	(11)	(12)	(13)
Kejahatan terhadap Nyawa			
Pembunuhan	72	70	70
Kejahatan terhadap Fisik/Badan			
Penganiayaan Berat	653	261	227
Penganiayaan Ringan	1 698	1 808	1 672
Kekerasan dalam Rumah Tangga	637	420	363
Kejahatan terhadap Kesusilaan			
Perkosaan	96	204	162
Pencabulan	386	0	438
Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang			
Penculikan	12	31	37
Memperkerjakan Anak di Bawah Umur	178	13	8
Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian dengan Kekerasan	412	387	369
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Api	6	10	7
Pencurian dengan Kekerasan Menggunakan Senjata Tajam	55	6	4
Kejahatan terhadap Hak Milik /Barang Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan			
Pencurian	1 838	2 080	1 935
Pencurian dengan Pemberatan	1 754	2 242	2 101
Pencurian Kendaraan Bermotor	1 515	829	875
Pengrusakan/Penghancuran Barang	351	231	227
Pembakaran dengan Sengaja	44	46	39
Penadahan	54	53	65
Kejahatan Terkait Narkotika			
Narkotika dan Psikotropika	2 799	2 582	1 972
Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			
Penipuan/Perbuatan Curang	1 558	2 044	1 833
Penggelapan	1 188	1 483	1 264
Korupsi	37	30	17
Kejahatan terhadap Ketertiban Umum			
Terhadap Ketertiban Umum	154	743	686

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Tabel 2.1.10 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2018

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Nyawa	Kejahatan terhadap Fisik		
	Pembunuhan	Penganiayaan Berat	Penganiayaan Ringan	KDRT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	22	310	881	284
Sumatera Utara	107	2 524	2 716	-
Sumatera Barat	14	291	1 558	304
Riau	30	234	439	179
Jambi	23	169	219	183
Sumatera Selatan	111	1 006	279	468
Bengkulu	26	222	65	137
Lampung	11	113	54	142
Kep. Bangka Belitung	9	62	-	34
Kepulauan Riau	6	165	304	117
Metro Jaya	75	830	139	1 037
Jawa Barat	35	617	656	373
Jawa Tengah	34	212	303	116
DI Yogyakarta	2	50	164	120
Jawa Timur	72	921	739	685
Banten	5	152	187	40
Bali	10	5	383	159
Nusa Tenggara Barat	3	72	-	308
Nusa Tenggara Timur	45	15	1 970	382
Kalimantan Barat	26	112	0	139
Kalimantan Tengah	14	41	154	36
Kalimantan Selatan	43	187	135	50
Kalimantan Timur	16	288	163	101
Kalimantan Utara	4	22	9	8
Sulawesi Utara	68	959	1 139	277
Sulawesi Tengah	13	54	1 190	329
Sulawesi Selatan	72	203	3 378	1 119
Sulawesi Tenggara	7	3	378	106
Gorontalo	15	8	1 175	223
Sulawesi Barat	12	6	457	74
Maluku	15	355	138	173
Maluku Utara	23	79	72	59
Papua Barat	13	441	169	94
Papua	43	463	696	211
INDONESIA	1 024	11 191	20 309	8 067

Tabel 2.1.10 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2018 (lanjutan)

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Kesusilaan		Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	
	Perkosaan	Pencabulan	Penculikan	Mempekerjakan Anak di Bawah Umur
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	39	223	29	12
Sumatera Utara	264	57	15	73
Sumatera Barat	31	361	1	131
Riau	95	3	1	15
Jambi	33	57	4	49
Sumatera Selatan	82	93	3	129
Bengkulu	14	63	2	4
Lampung	39	26	5	2
Kep. Bangka Belitung	6	46	–	33
Kepulauan Riau	11	114	2	–
Metro Jaya	33	103	34	4
Jawa Barat	46	466	12	21
Jawa Tengah	18	208	7	192
DI Yogyakarta	9	40	1	13
Jawa Timur	68	224	12	149
Banten	6	82	–	136
Bali	16	83	3	26
Nusa Tenggara Barat	36	–	2	52
Nusa Tenggara Timur	65	150	6	72
Kalimantan Barat	20	100	1	128
Kalimantan Tengah	12	75	–	3
Kalimantan Selatan	15	44	–	2
Kalimantan Timur	14	85	–	–
Kalimantan Utara	3	23	–	1
Sulawesi Utara	50	271	51	–
Sulawesi Tengah	35	170	–	15
Sulawesi Selatan	66	250	6	434
Sulawesi Tenggara	11	79	1	11
Gorontalo	24	196	6	32
Sulawesi Barat	10	36	–	10
Maluku	22	97	12	193
Maluku Utara	18	80	2	18
Papua Barat	28	11	–	129
Papua	49	54	4	234
INDONESIA	1 288	3 970	222	2 323

Tabel 2.1.10 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2018 (lanjutan)

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
	Pencurian dengan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan (Senpi)	Pencurian dengan Kekerasan (Sajam)
(1)	(10)	(11)	(12)
Aceh	150	1	5
Sumatera Utara	696	6	–
Sumatera Barat	379	1	7
Riau	282	11	8
Jambi	106	10	3
Sumatera Selatan	628	30	36
Bengkulu	114	–	2
Lampung	460	26	13
Kep. Bangka Belitung	35	1	2
Kepulauan Riau	103	1	5
Metro Jaya	335	17	53
Jawa Barat	327	12	26
Jawa Tengah	152	8	43
DI Yogyakarta	132	2	4
Jawa Timur	663	2	3
Banten	119	4	5
Bali	50	4	9
Nusa Tenggara Barat	256	3	2
Nusa Tenggara Timur	66	–	–
Kalimantan Barat	97	1	–
Kalimantan Tengah	47	1	63
Kalimantan Selatan	79	4	417
Kalimantan Timur	78	1	83
Kalimantan Utara	4	–	–
Sulawesi Utara	87	–	12
Sulawesi Tengah	243	2	2
Sulawesi Selatan	1.173	2	26
Sulawesi Tenggara	18	–	19
Gorontalo	11	–	–
Sulawesi Barat	17	–	7
Maluku	25	–	–
Maluku Utara	1	–	1
Papua Barat	170	–	1
Papua	307	1	5
INDONESIA	7 410	151	862

Tabel 2.1.10 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2018 (lanjutan)

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang Tanpa Penggunaan Kekerasan			
	Pencurian	Pencurian dengan Pemberatan	Pencurian Kendaraan Bermotor	Penadahan
(1)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	1 259	620	892	116
Sumatera Utara	2 692	4 683	2 956	323
Sumatera Barat	1 951	2 471	2 379	408
Riau	501	1 047	606	99
Jambi	676	972	490	122
Sumatera Selatan	450	2 264	928	148
Bengkulu	220	575	282	33
Lampung	414	1 247	127	84
Kep. Bangka Belitung	145	369	128	18
Kepulauan Riau	575	268	557	56
Metro Jaya	987	1 668	1 269	209
Jawa Barat	675	1 429	2 588	131
Jawa Tengah	663	1 667	1 305	59
DI Yogyakarta	646	520	393	81
Jawa Timur	1 612	2 677	2 384	306
Banten	139	527	876	13
Bali	503	372	306	47
Nusa Tenggara Barat	442	841	-	163
Nusa Tenggara Timur	1 117	364	264	323
Kalimantan Barat	771	948	509	55
Kalimantan Tengah	122	360	324	16
Kalimantan Selatan	418	553	395	37
Kalimantan Timur	379	582	516	50
Kalimantan Utara	33	104	18	1
Sulawesi Utara	1 117	458	478	331
Sulawesi Tengah	2 180	904	1 730	225
Sulawesi Selatan	4 151	1 794	2 047	697
Sulawesi Tenggara	208	53	105	31
Gorontalo	602	10	125	130
Sulawesi Barat	446	144	137	80
Maluku	437	89	124	85
Maluku Utara	86	11	9	18
Papua Barat	466	397	377	121
Papua	886	583	2 107	294
INDONESIA	27 969	31 571	27 731	4 910

Tabel 2.1.10 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2018 (lanjutan)

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang Tanpa Penggunaan Kekerasan		Kejahatan terkait Narkotika
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang	Pembakaran dengan Sengaja	Narkotika dan Psikotropika
(1)	(17)	(18)	(19)
A c e h	37	35	1 625
Sumatera Utara	110	54	6 262
Sumatera Barat	21	–	806
Riau	26	54	1 717
Jambi	20	3	439
Sumatera Selatan	18	4	2 001
Bengkulu	1	14	165
Lampung	3	7	2 511
Kep. Bangka Belitung	3	3	377
Kepulauan Riau	–	6	410
Metro Jaya	–	216	8 715
Jawa Barat	5	13	1 604
Jawa Tengah	4	29	991
DI Yogyakarta	1	2	250
Jawa Timur	28	83	2 712
Banten	–	11	339
Bali	1	4	746
Nusa Tenggara Barat	6	7	193
Nusa Tenggara Timur	28	8	6
Kalimantan Barat	5	17	720
Kalimantan Tengah	50	36	640
Kalimantan Selatan	5	29	1 650
Kalimantan Timur	3	2	2 108
Kalimantan Utara	2	–	77
Sulawesi Utara	20	70	888
Sulawesi Tengah	19	1	311
Sulawesi Selatan	20	19	707
Sulawesi Tenggara	6	4	83
Gorontalo	9	–	43
Sulawesi Barat	14	–	185
Maluku	15	1	113
Maluku Utara	–	1	84
Papua Barat	1	3	81
Papua	40	19	29
INDONESIA	521	755	39 588

Tabel 2.1.10 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2018 (lanjutan)

Kepolisian Daerah	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			Kejahatan terhadap Ketertiban Umum
	Penipuan/ Perbuatan Curang	Penggelapan	Korupsi	Terhadap Ketertiban Umum
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)
Aceh	867	589	15	6
Sumatera Utara	2 067	2 584	29	-
Sumatera Barat	974	861	12	101
Riau	454	585	21	-
Jambi	424	516	19	126
Sumatera Selatan	1 064	1 022	22	214
Bengkulu	196	175	24	15
Lampung	612	519	4	-
Kep. Bangka Belitung	70	69	4	1
Kepulauan Riau	391	251	7	1
Metro Jaya	3 546	1 971	9	223
Jawa Barat	2 808	1 234	28	65
Jawa Tengah	623	648	29	207
DI Yogyakarta	758	350	3	44
Jawa Timur	2 906	1 271	35	125
Banten	371	138	5	-
Bali	268	197	21	5
Nusa Tenggara Barat	344	240	5	-
Nusa Tenggara Timur	499	301	18	962
Kalimantan Barat	202	397	29	17
Kalimantan Tengah	70	143	38	3
Kalimantan Selatan	141	228	23	-
Kalimantan Timur	290	344	35	468
Kalimantan Utara	19	30	1	-
Sulawesi Utara	862	672	5	19
Sulawesi Tengah	704	593	8	1
Sulawesi Selatan	2 615	1 118	14	1
Sulawesi Tenggara	64	38	3	-
Gorontalo	269	219	5	14
Sulawesi Barat	188	96	1	2
Maluku	219	76	4	212
Maluku Utara	29	16	-	1
Papua Barat	274	151	6	277
Papua	355	171	14	490
INDONESIA	25 543	17 813	496	3 600

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Tabel 2.1.11 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2019

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Nyawa	Kejahatan terhadap Fisik		
	Pembunuhan	Penganiayaan Berat	Penganiayaan Ringan	KDRT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	26	235	764	257
Sumatera Utara	104	2 251	2 561	5
Sumatera Barat	16	288	1 480	220
Riau	19	232	387	299
Jambi	15	298	299	142
Sumatera Selatan	136	932	281	495
Bengkulu	24	207	45	147
Lampung	20	134	331	162
Kep. Bangka Belitung	8	122	2	41
Kepulauan Riau	9	124	280	171
Metro Jaya	36	613	143	575
Jawa Barat	32	878	446	490
Jawa Tengah	34	210	293	120
DI Yogyakarta	7	66	266	124
Jawa Timur	65	673	702	928
Banten	12	78	169	35
Bali	5	41	403	163
Nusa Tenggara Barat	5	55	-	397
Nusa Tenggara Timur	62	164	1 872	372
Kalimantan Barat	20	82	-	81
Kalimantan Tengah	28	35	145	41
Kalimantan Selatan	33	178	159	61
Kalimantan Timur	13	176	118	230
Kalimantan Utara	1	53	19	36
Sulawesi Utara	50	639	1 275	445
Sulawesi Tengah	17	39	1 099	346
Sulawesi Selatan	50	166	3 516	984
Sulawesi Tenggara	13	74	499	90
Gorontalo	17	17	1 034	152
Sulawesi Barat	12	2	506	71
Maluku	10	677	-	214
Maluku Utara	3	124	14	36
Papua Barat	10	210	372	87
Papua	52	250	951	212
INDONESIA	964	10 323	20 431	8 229

Tabel 2.1.11 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2019 (lanjutan)

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Kesusilaan		Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Kejahatan	
	Perkosaan	Pencabulan	Penculikan	Mempekerjakan Anak di Bawah Umur
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	34	233	17	11
Sumatera Utara	216	–	25	80
Sumatera Barat	29	304	–	104
Riau	114	4	1	7
Jambi	23	46	2	29
Sumatera Selatan	69	100	11	141
Bengkulu	9	89	–	6
Lampung	44	263	5	37
Kep. Bangka Belitung	1	37	–	50
Kepulauan Riau	11	118	1	–
Metro Jaya	35	85	18	–
Jawa Barat	41	424	5	8
Jawa Tengah	36	191	3	230
DI Yogyakarta	6	42	2	15
Jawa Timur	51	176	15	196
Banten	7	65	4	110
Bali	6	76	–	11
Nusa Tenggara Barat	41	–	1	50
Nusa Tenggara Timur	52	177	4	7
Kalimantan Barat	16	128	2	97
Kalimantan Tengah	5	52	–	2
Kalimantan Selatan	10	35	–	–
Kalimantan Timur	18	87	–	–
Kalimantan Utara	5	30	–	9
Sulawesi Utara	17	246	45	1
Sulawesi Tengah	37	174	1	37
Sulawesi Selatan	63	308	7	392
Sulawesi Tenggara	25	70	3	3
Gorontalo	17	128	1	52
Sulawesi Barat	11	48	1	9
Maluku	31	151	12	85
Maluku Utara	9	105	–	9
Papua Barat	21	12	3	108
Papua	62	57	–	218
INDONESIA	1 172	4 061	189	2 114

Tabel 2.1.11 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2019 (lanjutan)

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
	Pencurian dengan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan (Senpi)	Pencurian dengan Kekerasan (Sajam)
(1)	(10)	(11)	(12)
Aceh	135	1	4
Sumatera Utara	680	5	–
Sumatera Barat	267	1	9
Riau	242	12	–
Jambi	152	7	1
Sumatera Selatan	670	27	26
Bengkulu	89	–	–
Lampung	444	41	83
Kep. Bangka Belitung	37	3	1
Kepulauan Riau	98	–	9
Metro Jaya	236	9	50
Jawa Barat	203	10	1
Jawa Tengah	160	5	28
DI Yogyakarta	107	1	3
Jawa Timur	535	3	5
Banten	78	4	–
Bali	63	5	–
Nusa Tenggara Barat	319	–	–
Nusa Tenggara Timur	83	–	–
Kalimantan Barat	72	2	–
Kalimantan Tengah	37	2	75
Kalimantan Selatan	64	1	255
Kalimantan Timur	57	1	112
Kalimantan Utara	13	–	11
Sulawesi Utara	50	–	16
Sulawesi Tengah	110	1	1
Sulawesi Selatan	546	1	30
Sulawesi Tenggara	16	–	–
Gorontalo	52	–	1
Sulawesi Barat	17	–	12
Maluku	18	–	–
Maluku Utara	4	–	2
Papua Barat	207	–	5
Papua	560	1	17
INDONESIA	6 421	143	757

Tabel 2.1.11 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2019 (lanjutan)

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang Tanpa Penggunaan Kekerasan			
	Pencurian	Pencurian dengan Pemberatan	Pencurian Kendaraan Bermotor	Penadahan
(1)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	1 094	526	729	97
Sumatera Utara	1 610	3 903	2 632	448
Sumatera Barat	1 770	2 041	2 181	264
Riau	427	972	471	70
Jambi	790	1 252	753	71
Sumatera Selatan	476	1 995	771	261
Bengkulu	203	520	358	28
Lampung	382	1 303	1 021	109
Kep. Bangka Belitung	230	352	119	9
Kepulauan Riau	606	267	391	49
Metro Jaya	794	1 215	1 041	120
Jawa Barat	668	1 012	1 613	106
Jawa Tengah	760	1 829	1 531	75
DI Yogyakarta	563	553	520	76
Jawa Timur	1 584	2 686	2 356	195
Banten	127	455	758	22
Bali	470	335	349	35
Nusa Tenggara Barat	533	1 009	–	194
Nusa Tenggara Timur	1 083	217	196	294
Kalimantan Barat	597	657	419	38
Kalimantan Tengah	142	263	172	7
Kalimantan Selatan	347	493	372	22
Kalimantan Timur	239	401	419	25
Kalimantan Utara	63	222	54	4
Sulawesi Utara	804	125	123	283
Sulawesi Tengah	1 527	320	591	153
Sulawesi Selatan	3 036	1 026	986	528
Sulawesi Tenggara	235	35	81	36
Gorontalo	440	26	124	100
Sulawesi Barat	600	63	125	68
Maluku	686	56	135	109
Maluku Utara	75	8	6	9
Papua Barat	319	311	407	106
Papua	1 111	483	1 672	331
INDONESIA	24 391	26 931	23 476	4 342



Tabel 2.1.11 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2019 (lanjutan)

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang Tanpa Penggunaan Kekerasan		Kejahatan terkait Narkotika
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang	Pembakaran dengan Sengaja	Narkotika dan Psikotropika
(1)	(17)	(18)	(19)
A c e h	28	30	1 582
Sumatera Utara	78	22	6 201
Sumatera Barat	21	1	806
Riau	26	2	1 671
Jambi	4	–	407
Sumatera Selatan	35	10	1 621
Bengkulu	6	7	206
Lampung	12	8	1 771
Kep. Bangka Belitung	5	2	328
Kepulauan Riau	11	13	360
Metro Jaya	9	128	6 338
Jawa Barat	5	17	1 013
Jawa Tengah	37	33	1 415
DI Yogyakarta	–	3	283
Jawa Timur	26	82	3 640
Banten	–	4	584
Bali	4	2	777
Nusa Tenggara Barat	7	20	288
Nusa Tenggara Timur	46	13	2
Kalimantan Barat	5	11	721
Kalimantan Tengah	97	34	646
Kalimantan Selatan	16	36	1 726
Kalimantan Timur	22	8	1 677
Kalimantan Utara	3	–	200
Sulawesi Utara	8	44	145
Sulawesi Tengah	9	8	319
Sulawesi Selatan	24	5	1 208
Sulawesi Tenggara	8	–	45
Gorontalo	8	–	93
Sulawesi Barat	8	–	121
Maluku	9	2	124
Maluku Utara	3	–	89
Papua Barat	11	2	45
Papua	124	48	26
INDONESIA	715	595	36 478

Tabel 2.1.11 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2019 (lanjutan)

Kepolisian Daerah	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			Kejahatan terhadap Ketertiban Umum
	Penipuan/ Perbuatan Curang	Penggelapan	Korupsi	Terhadap Ketertiban Umum
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)
Aceh	628	475	17	3
Sumatera Utara	2 333	2 545	26	-
Sumatera Barat	576	740	36	1
Riau	315	658	14	1
Jambi	457	733	16	206
Sumatera Selatan	1 022	945	22	293
Bengkulu	214	253	19	9
Lampung	836	450	11	-
Kep. Bangka Belitung	71	83	4	-
Kepulauan Riau	322	238	4	-
Metro Jaya	3 303	1 801	11	204
Jawa Barat	1 980	1 214	20	83
Jawa Tengah	772	695	21	36
DI Yogyakarta	558	293	2	58
Jawa Timur	2 801	1 254	47	105
Banten	356	153	1	-
Bali	172	196	14	1
Nusa Tenggara Barat	353	311	13	-
Nusa Tenggara Timur	420	310	9	827
Kalimantan Barat	132	263	22	-
Kalimantan Tengah	68	160	34	-
Kalimantan Selatan	131	251	21	-
Kalimantan Timur	135	224	12	62
Kalimantan Utara	19	42	-	-
Sulawesi Utara	672	400	3	12
Sulawesi Tengah	497	394	10	1
Sulawesi Selatan	1 658	781	20	1
Sulawesi Tenggara	110	28	9	2
Gorontalo	192	187	7	3
Sulawesi Barat	158	123	1	-
Maluku	254	66	7	322
Maluku Utara	27	22	-	-
Papua Barat	273	113	7	305
Papua	405	211	28	429
INDONESIA	22 220	16 612	488	2 964

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri

Tabel 2.1.12 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2020

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Nyawa	Kejahatan terhadap Fisik		
	Pembunuhan	Penganiayaan Berat	Penganiayaan Ringan	KDRT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	15	327	677	202
Sumatera Utara	99	2 140	3 321	746
Sumatera Barat	20	263	1 255	206
Riau	21	213	500	300
Jambi	11	123	287	121
Sumatera Selatan	77	790	337	424
Bengkulu	33	241	93	145
Lampung	21	121	376	150
Kep. Bangka Belitung	10	75	43	32
Kepulauan Riau	13	87	280	147
Metro Jaya	32	489	213	747
Jawa Barat	20	583	424	438
Jawa Tengah	30	150	95	137
DI Yogyakarta	6	86	336	151
Jawa Timur	55	371	512	521
Banten	8	133	313	75
Bali	6	56	220	138
Nusa Tenggara Barat	11	73	139	434
Nusa Tenggara Timur	40	137	1 295	294
Kalimantan Barat	35	80	30	74
Kalimantan Tengah	17	34	214	57
Kalimantan Selatan	38	144	233	85
Kalimantan Timur	12	86	113	153
Kalimantan Utara	10	51	19	21
Sulawesi Utara	74	334	1 210	432
Sulawesi Tengah	18	119	952	320
Sulawesi Selatan	71	108	2 999	741
Sulawesi Tenggara	26	83	516	135
Gorontalo	13	23	868	152
Sulawesi Barat	8	47	389	69
Maluku	10	389	446	158
Maluku Utara	1	152	52	51
Papua Barat	10	132	454	69
Papua	27	133	984	179
INDONESIA	898	8 373	20 195	8 104

Tabel 2.1.12 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2020 (lanjutan)

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Kesusilaan		Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang Kejahatan	
	Perkosaan	Pencabulan	Penculikan	Mempekerjakan Anak di Bawah Umur
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	61	171	18	11
Sumatera Utara	170	604	25	30
Sumatera Barat	35	259	3	94
Riau	122	21	6	5
Jambi	25	44	3	6
Sumatera Selatan	64	108	5	136
Bengkulu	16	92	1	–
Lampung	54	193	9	32
Kep. Bangka Belitung	10	42	2	45
Kepulauan Riau	6	103	1	–
Metro Jaya	36	77	22	9
Jawa Barat	67	304	10	1
Jawa Tengah	41	308	10	1
DI Yogyakarta	27	71	3	24
Jawa Timur	77	179	12	165
Banten	15	66	1	150
Bali	6	59	1	3
Nusa Tenggara Barat	59	36	4	42
Nusa Tenggara Timur	48	112	1	13
Kalimantan Barat	14	123	1	111
Kalimantan Tengah	14	101	–	1
Kalimantan Selatan	19	32	–	–
Kalimantan Timur	26	87	1	–
Kalimantan Utara	6	26	–	10
Sulawesi Utara	25	217	86	2
Sulawesi Tengah	49	126	–	22
Sulawesi Selatan	63	145	9	302
Sulawesi Tenggara	32	141	2	7
Gorontalo	19	110	1	72
Sulawesi Barat	11	53	1	6
Maluku	28	1 370	8	111
Maluku Utara	11	89	–	13
Papua Barat	29	18	2	122
Papua	51	49	6	170
INDONESIA	1 336	5 536	254	1 716



Tabel 2.1.12 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2020 (lanjutan)

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan		
	Pencurian dengan Kekerasan	Pencurian dengan Kekerasan (Senpi)	Pencurian dengan Kekerasan (Sajam)
(1)	(10)	(11)	(12)
Aceh	136	5	4
Sumatera Utara	706	4	70
Sumatera Barat	173	1	11
Riau	381	24	8
Jambi	79	6	2
Sumatera Selatan	498	21	44
Bengkulu	100	2	4
Lampung	300	52	47
Kep. Bangka Belitung	41	1	–
Kepulauan Riau	94	–	9
Metro Jaya	222	13	24
Jawa Barat	246	6	5
Jawa Tengah	207	4	25
DI Yogyakarta	122	–	4
Jawa Timur	336	2	3
Banten	87	7	–
Bali	52	2	–
Nusa Tenggara Barat	283	–	1
Nusa Tenggara Timur	42	–	–
Kalimantan Barat	54	–	–
Kalimantan Tengah	37	–	49
Kalimantan Selatan	111	–	256
Kalimantan Timur	50	–	101
Kalimantan Utara	9	–	10
Sulawesi Utara	62	–	10
Sulawesi Tengah	139	1	–
Sulawesi Selatan	325	–	23
Sulawesi Tenggara	42	–	–
Gorontalo	4	–	–
Sulawesi Barat	8	–	7
Maluku	23	–	–
Maluku Utara	14	–	–
Papua Barat	152	–	3
Papua	512	–	20
INDONESIA	5 647	151	740

Tabel 2.1.12 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2020 (lanjutan)

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang Tanpa Penggunaan Kekerasan			
	Pencurian	Pencurian dengan Pemberatan	Pencurian Kendaraan Bermotor	Penadahan
(1)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	1 216	438	607	30
Sumatera Utara	3 290	4 338	2 470	24
Sumatera Barat	1 225	1 315	997	5
Riau	715	1 530	812	9
Jambi	455	753	488	4
Sumatera Selatan	419	1 727	637	5
Bengkulu	213	485	215	8
Lampung	393	1 260	772	9
Kep. Bangka Belitung	221	330	113	3
Kepulauan Riau	392	259	286	6
Metro Jaya	713	1 235	792	310
Jawa Barat	577	1 114	1 111	23
Jawa Tengah	767	1 741	1 232	73
DI Yogyakarta	627	676	388	4
Jawa Timur	1 184	2 176	1 429	36
Banten	176	629	801	5
Bali	348	251	177	2
Nusa Tenggara Barat	640	1 136	150	17
Nusa Tenggara Timur	942	191	152	2
Kalimantan Barat	427	483	312	3
Kalimantan Tengah	228	363	171	37
Kalimantan Selatan	321	521	267	52
Kalimantan Timur	242	335	267	2
Kalimantan Utara	118	184	24	3
Sulawesi Utara	1 002	106	92	16
Sulawesi Tengah	1 160	360	502	10
Sulawesi Selatan	2 744	651	589	9
Sulawesi Tenggara	303	65	208	1
Gorontalo	451	36	121	-
Sulawesi Barat	364	100	80	1
Maluku	542	91	143	2
Maluku Utara	69	14	7	5
Papua Barat	297	351	522	6
Papua	1 203	442	1 623	77
INDONESIA	23 984	25 686	18 557	799



Tabel 2.1.12 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2020 (lanjutan)

Kepolisian Daerah	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang Tanpa Penggunaan Kekerasan		Kejahatan terkait Narkotika
	Pengrusakan/ Penghancuran Barang	Pembakaran dengan Sengaja	Narkotika dan Psikotropika
(1)	(17)	(18)	(19)
A c e h	103	14	1 596
Sumatera Utara	693	101	5 932
Sumatera Barat	181	9	913
Riau	71	15	1 646
Jambi	52	18	619
Sumatera Selatan	103	20	2 554
Bengkulu	40	2	340
Lampung	82	16	1 521
Kep. Bangka Belitung	18	5	332
Kepulauan Riau	47	13	362
Metro Jaya	99	4	5 981
Jawa Barat	120	5	1 141
Jawa Tengah	55	15	1 601
DI Yogyakarta	72	2	460
Jawa Timur	136	15	2 629
Banten	44	2	634
Bali	39	4	668
Nusa Tenggara Barat	169	8	571
Nusa Tenggara Timur	179	28	41
Kalimantan Barat	24	5	755
Kalimantan Tengah	23	15	590
Kalimantan Selatan	36	11	1 582
Kalimantan Timur	14	2	1 354
Kalimantan Utara	8	3	245
Sulawesi Utara	169	9	100
Sulawesi Tengah	87	2	340
Sulawesi Selatan	414	21	1 013
Sulawesi Tenggara	22	33	192
Gorontalo	77	11	101
Sulawesi Barat	57	5	175
Maluku	102	14	142
Maluku Utara	15	2	120
Papua Barat	115	10	120
Papua	254	79	241
INDONESIA	3 720	518	36 611

Tabel 2.1.12 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Kepolisian Daerah, 2020 (lanjutan)

Kepolisian Daerah	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi			Kejahatan terhadap Ketertiban Umum
	Penipuan/ Perbuatan Curang	Penggelapan	Korupsi	Terhadap Ketertiban Umum
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)
A c e h	653	452	25	24
Sumatera Utara	2 809	2 740	13	249
Sumatera Barat	419	562	8	50
Riau	370	708	17	113
Jambi	327	421	19	182
Sumatera Selatan	905	857	4	100
Bengkulu	315	226	15	14
Lampung	890	469	14	30
Kep. Bangka Belitung	55	72	3	21
Kepulauan Riau	363	173	7	27
Metro Jaya	3 091	1 503	1	213
Jawa Barat	1 768	1 008	16	141
Jawa Tengah	1 050	742	22	120
DI Yogyakarta	802	420	3	126
Jawa Timur	1 897	907	13	213
Banten	420	295	3	51
Bali	208	195	5	29
Nusa Tenggara Barat	504	361	11	72
Nusa Tenggara Timur	378	191	5	632
Kalimantan Barat	162	239	30	24
Kalimantan Tengah	127	174	14	5
Kalimantan Selatan	212	310	17	41
Kalimantan Timur	105	239	12	58
Kalimantan Utara	35	37	0	4
Sulawesi Utara	455	481	9	31
Sulawesi Tengah	352	315	10	31
Sulawesi Selatan	1 084	692	10	36
Sulawesi Tenggara	62	40	20	17
Gorontalo	261	192	14	34
Sulawesi Barat	144	97	3	4
Maluku	223	82	2	342
Maluku Utara	27	19	3	2
Papua Barat	232	117	7	279
Papua	470	210	21	347
INDONESIA	21 175	15 546	376	3 662

Sumber: Biro Pengendalian Operasi, Mabes Polri



<https://www.bps.go.id>





DATA POTENSI DESA KEJADIAN KEJAHATAN

<https://www.bps.go.id>



Tabel 2.2.1 Jumlah Desa/Kelurahan, 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	6 483	6 512	6 508
Sumatera Utara	5 797	6 104	6 132
Sumatera Barat	1 033	1 145	1 275
Riau	1 655	1 835	1 875
Jambi	1 372	1 551	1 562
Sumatera Selatan	3 186	3 237	3 262
Bengkulu	1 509	1 532	1 514
Lampung	2 464	2 632	2 654
Kep. Bangka Belitung	361	381	391
Kepulauan Riau	353	415	416
DKI Jakarta	267	267	267
Jawa Barat	5 905	5 962	5 957
Jawa Tengah	8 577	8 578	8 559
DI Yogyakarta	438	438	438
Jawa Timur	8 502	8 502	8 496
Banten	1 535	1 551	1 552
Bali	716	716	716
Nusa Tenggara Barat	1 084	1 141	1 143
Nusa Tenggara Timur	2 966	327	3 353
Kalimantan Barat	1 967	2 109	2 137
Kalimantan Tengah	1 528	1 569	1 576
Kalimantan Selatan	2	2 008	2 008
Kalimantan Timur	1 465	1 026	1 038
Kalimantan Utara*	-	479	482
Sulawesi Utara	1 693	1 836	1 838
Sulawesi Tengah	1 815	1 986	2 020
Sulawesi Selatan	2 982	303	3 049
Sulawesi Tenggara	2 121	2 272	2 354
Gorontalo	731	736	734
Sulawesi Barat	638	648	650
Maluku	1 024	1 088	1 240
Maluku Utara	1 079	1 196	1 196
Papua Barat	1 439	1 567	1 987
Papua	3 924	4 871	5 552
INDONESIA	78 609	82 190	83 931

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018

Tabel 2.2.2 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Kejahatan, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Jenis Kejahatan	Jumlah			Persentase		
	2011	2014	2018	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pembunuhan	1 585	1 739	1 799	2,02	2,12	2,14
Penganiayaan	4 171	4 047	5 092	5,31	4,92	6,07
Perkosaan	2 122	2 050	2 851	2,70	2,49	3,40
Pencurian dengan Kekerasan	233	2 963	2 821	2,96	3,61	3,36
Pencurian	28 912	33 739	37 778	36,78	41,05	45,01
Penipuan/Penggelapan	5 603	7 244	8 620	7,13	8,81	10,27
Pembakaran	518	874	1 050	0,66	1,06	1,25
Perdagangan Orang	119	22	124	0,15	0,15	0,15
Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba	4 103	5 931	12 579	5,22	7,22	14,99
Perjudian	7 984	1 079	12 842	10,16	13,48	15,30

Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018



Tabel 2.2.3 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	30	26	33
Sumatera Utara	118	130	122
Sumatera Barat	29	39	43
Riau	57	56	72
Jambi	26	30	33
Sumatera Selatan	98	140	114
Bengkulu	24	27	21
Lampung	59	50	66
Kep. Bangka Belitung	19	14	8
Kepulauan Riau	14	14	5
DKI Jakarta	17	29	14
Jawa Barat	124	142	130
Jawa Tengah	103	86	93
DI Yogyakarta	7	16	13
Jawa Timur	138	163	150
Banten	31	32	38
Bali	11	17	9
Nusa Tenggara Barat	32	37	37
Nusa Tenggara Timur	93	80	82
Kalimantan Barat	39	41	29
Kalimantan Tengah	27	51	41
Kalimantan Selatan	57	64	58
Kalimantan Timur	32	31	32
Kalimantan Utara*	-	8	4
Sulawesi Utara	47	61	57
Sulawesi Tengah	34	41	41
Sulawesi Selatan	87	99	95
Sulawesi Tenggara	31	26	39
Gorontalo	16	17	25
Sulawesi Barat	13	8	8
Maluku	25	17	15
Maluku Utara	11	13	21
Papua Barat	18	22	27
Papua	118	112	224
INDONESIA	1 585	1 739	1 799

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018

Tabel 2.2.4 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	97	99	141
Sumatera Utara	267	264	295
Sumatera Barat	79	107	112
Riau	58	74	139
Jambi	49	50	81
Sumatera Selatan	169	168	173
Bengkulu	59	46	57
Lampung	116	110	157
Kep. Bangka Belitung	54	50	47
Kepulauan Riau	16	20	30
DKI Jakarta	22	66	30
Jawa Barat	452	425	598
Jawa Tengah	321	274	328
DI Yogyakarta	57	54	61
Jawa Timur	439	429	519
Banten	100	84	123
Bali	47	54	64
Nusa Tenggara Barat	131	107	134
Nusa Tenggara Timur	239	166	209
Kalimantan Barat	56	85	78
Kalimantan Tengah	59	68	66
Kalimantan Selatan	95	110	105
Kalimantan Timur	52	52	71
Kalimantan Utara*	-	11	18
Sulawesi Utara	201	161	181
Sulawesi Tengah	100	102	138
Sulawesi Selatan	261	261	263
Sulawesi Tenggara	118	158	140
Gorontalo	73	64	105
Sulawesi Barat	22	17	22
Maluku	64	50	60
Maluku Utara	26	48	46
Papua Barat	41	21	62
Papua	231	192	439
INDONESIA	4 171	4 047	5 092

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur
 Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018

Tabel 2.2.5 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	57	91	93
Sumatera Utara	131	115	178
Sumatera Barat	60	66	106
Riau	44	59	95
Jambi	27	35	54
Sumatera Selatan	66	78	72
Bengkulu	47	57	39
Lampung	63	57	96
Kep. Bangka Belitung	25	16	19
Kepulauan Riau	15	19	13
DKI Jakarta	4	25	9
Jawa Barat	208	175	206
Jawa Tengah	187	148	159
DI Yogyakarta	22	11	15
Jawa Timur	257	215	210
Banten	30	39	52
Bali	12	9	9
Nusa Tenggara Barat	39	39	54
Nusa Tenggara Timur	113	104	111
Kalimantan Barat	48	63	65
Kalimantan Tengah	29	32	30
Kalimantan Selatan	25	25	44
Kalimantan Timur	40	23	45
Kalimantan Utara*	-	9	14
Sulawesi Utara	73	54	95
Sulawesi Tengah	47	56	67
Sulawesi Selatan	42	47	90
Sulawesi Tenggara	26	40	51
Gorontalo	29	36	58
Sulawesi Barat	9	5	15
Maluku	37	27	40
Maluku Utara	38	26	35
Papua Barat	19	23	41
Papua	253	226	571
INDONESIA	2 122	2 050	2 851

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur
 Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018

Tabel 2.2.6 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	63	47	59
Sumatera Utara	93	141	182
Sumatera Barat	55	71	53
Riau	79	101	103
Jambi	57	76	85
Sumatera Selatan	221	430	323
Bengkulu	33	40	52
Lampung	186	255	233
Kep. Bangka Belitung	16	15	8
Kepulauan Riau	13	17	20
DKI Jakarta	35	73	38
Jawa Barat	287	344	342
Jawa Tengah	146	176	155
DI Yogyakarta	28	20	17
Jawa Timur	290	419	295
Banten	54	49	76
Bali	13	23	22
Nusa Tenggara Barat	107	146	76
Nusa Tenggara Timur	54	67	68
Kalimantan Barat	33	37	34
Kalimantan Tengah	41	27	20
Kalimantan Selatan	85	73	48
Kalimantan Timur	25	37	32
Kalimantan Utara*	-	9	8
Sulawesi Utara	27	21	30
Sulawesi Tengah	24	23	24
Sulawesi Selatan	54	47	73
Sulawesi Tenggara	23	16	18
Gorontalo	4	3	9
Sulawesi Barat	7	7	4
Maluku	9	20	12
Maluku Utara	2	7	9
Papua Barat	13	13	34
Papua	153	113	259
INDONESIA	233	2 963	2 821

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018



Tabel 2.2.7 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1 101	1 744	2 225
Sumatera Utara	1 713	2 116	2 776
Sumatera Barat	420	574	779
Riau	726	942	1 169
Jambi	534	661	915
Sumatera Selatan	1 473	1 939	2 016
Bengkulu	599	635	743
Lampung	1 402	1 621	1 875
Kep. Bangka Belitung	174	203	206
Kepulauan Riau	115	133	159
DKI Jakarta	199	229	184
Jawa Barat	4 157	439	4 394
Jawa Tengah	3 628	4 064	4 068
DI Yogyakarta	275	283	294
Jawa Timur	3 767	4 122	3 919
Banten	978	1 079	1 104
Bali	200	202	254
Nusa Tenggara Barat	641	782	730
Nusa Tenggara Timur	612	724	863
Kalimantan Barat	517	648	808
Kalimantan Tengah	374	409	562
Kalimantan Selatan	820	889	926
Kalimantan Timur	348	354	456
Kalimantan Utara*	-	62	134
Sulawesi Utara	554	676	705
Sulawesi Tengah	407	578	777
Sulawesi Selatan	111	1 206	1 309
Sulawesi Tenggara	361	489	733
Gorontalo	114	179	253
Sulawesi Barat	150	171	195
Maluku	148	225	266
Maluku Utara	176	297	352
Papua Barat	113	149	227
Papua	1 006	964	1 402
INDONESIA	28 912	33 739	37 778

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur
 Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018

Tabel 2.2.8 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	147	229	356
Sumatera Utara	227	378	512
Sumatera Barat	84	138	204
Riau	123	204	235
Jambi	72	109	180
Sumatera Selatan	150	334	287
Bengkulu	74	77	106
Lampung	216	284	422
Kep. Bangka Belitung	77	62	55
Kepulauan Riau	25	39	45
DKI Jakarta	30	100	62
Jawa Barat	925	1 111	1 187
Jawa Tengah	817	952	986
DI Yogyakarta	112	96	121
Jawa Timur	766	1 001	1 100
Banten	228	227	292
Bali	37	42	54
Nusa Tenggara Barat	134	136	178
Nusa Tenggara Timur	86	163	154
Kalimantan Barat	84	141	153
Kalimantan Tengah	41	95	72
Kalimantan Selatan	126	150	172
Kalimantan Timur	58	84	91
Kalimantan Utara*	-	10	28
Sulawesi Utara	92	89	138
Sulawesi Tengah	95	107	143
Sulawesi Selatan	219	305	458
Sulawesi Tenggara	43	87	157
Gorontalo	31	35	56
Sulawesi Barat	27	27	62
Maluku	41	52	49
Maluku Utara	22	49	52
Papua Barat	26	37	55
Papua	368	294	398
INDONESIA	5 603	7 244	8 620

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018



Tabel 2.2.9 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	16	48	32
Sumatera Utara	53	53	61
Sumatera Barat	24	18	27
Riau	17	78	60
Jambi	9	26	28
Sumatera Selatan	22	30	54
Bengkulu	12	15	8
Lampung	9	11	20
Kep. Bangka Belitung	8	6	2
Kepulauan Riau	4	10	13
DKI Jakarta	6	10	3
Jawa Barat	26	54	57
Jawa Tengah	20	39	37
DI Yogyakarta	-	5	5
Jawa Timur	27	68	65
Banten	5	13	6
Bali	2	7	9
Nusa Tenggara Barat	12	14	13
Nusa Tenggara Timur	56	98	100
Kalimantan Barat	14	23	38
Kalimantan Tengah	3	34	34
Kalimantan Selatan	13	18	32
Kalimantan Timur	8	11	12
Kalimantan Utara*	-	10	10
Sulawesi Utara	11	17	11
Sulawesi Tengah	15	21	16
Sulawesi Selatan	20	32	28
Sulawesi Tenggara	2	9	15
Gorontalo	3	5	9
Sulawesi Barat	2	6	5
Maluku	7	9	19
Maluku Utara	5	7	22
Papua Barat	5	8	17
Papua	82	61	182
INDONESIA	518	874	1 050

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018

Tabel 2.2.10 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1	2	3
Sumatera Utara	7	11	5
Sumatera Barat	-	-	1
Riau	6	2	6
Jambi	-	-	3
Sumatera Selatan	1	5	6
Bengkulu	1	2	1
Lampung	2	1	6
Kep. Bangka Belitung	2	2	4
Kepulauan Riau	4	2	2
DKI Jakarta	-	2	-
Jawa Barat	33	25	17
Jawa Tengah	12	11	3
DI Yogyakarta	1	-	-
Jawa Timur	16	11	14
Banten	1	2	6
Bali	-	1	-
Nusa Tenggara Barat	2	2	3
Nusa Tenggara Timur	7	14	27
Kalimantan Barat	3	7	-
Kalimantan Tengah	-	3	1
Kalimantan Selatan	1	-	1
Kalimantan Timur	3	-	1
Kalimantan Utara*	-	1	-
Sulawesi Utara	8	6	6
Sulawesi Tengah	-	1	-
Sulawesi Selatan	1	4	2
Sulawesi Tenggara	-	1	-
Gorontalo	-	1	-
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	1	1	1
Maluku Utara	-	-	-
Papua Barat	-	-	-
Papua	6	2	5
INDONESIA	119	122	124

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur
 Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018



Tabel 2.2.11 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/
Pengedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011,
2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	465	508	1 212
Sumatera Utara	543	1 033	1 795
Sumatera Barat	172	168	481
Riau	170	315	683
Jambi	67	167	387
Sumatera Selatan	220	409	783
Bengkulu	39	74	115
Lampung	124	186	466
Kep. Bangka Belitung	40	58	112
Kepulauan Riau	24	27	63
DKI Jakarta	74	126	92
Jawa Barat	507	558	952
Jawa Tengah	246	263	495
DI Yogyakarta	59	37	73
Jawa Timur	545	639	1 480
Banten	126	155	259
Bali	19	34	65
Nusa Tenggara Barat	50	93	216
Nusa Tenggara Timur	13	18	9
Kalimantan Barat	60	61	241
Kalimantan Tengah	38	81	229
Kalimantan Selatan	191	312	675
Kalimantan Timur	88	148	301
Kalimantan Utara*	-	32	94
Sulawesi Utara	9	25	56
Sulawesi Tengah	54	144	316
Sulawesi Selatan	84	128	506
Sulawesi Tenggara	8	25	84
Gorontalo	11	21	43
Sulawesi Barat	8	20	60
Maluku	16	15	28
Maluku Utara	12	21	28
Papua Barat	2	8	34
Papua	19	22	146
INDONESIA	4 103	5 931	12 579

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018

Tabel 2.2.12 Jumlah Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
A c e h	242	401	598
Sumatera Utara	1 423	1 665	1 947
Sumatera Barat	239	267	458
Riau	236	329	510
Jambi	122	157	297
Sumatera Selatan	325	683	662
Bengkulu	52	67	107
Lampung	229	393	546
Kep. Bangka Belitung	57	71	60
Kepulauan Riau	21	31	48
DKI Jakarta	34	83	35
Jawa Barat	498	692	776
Jawa Tengah	644	770	1 153
DI Yogyakarta	70	59	74
Jawa Timur	1 227	1 502	1 295
Banten	169	180	231
Bali	154	81	67
Nusa Tenggara Barat	135	198	205
Nusa Tenggara Timur	176	293	389
Kalimantan Barat	210	303	416
Kalimantan Tengah	114	250	217
Kalimantan Selatan	209	283	230
Kalimantan Timur	112	129	145
Kalimantan Utara*	-	39	44
Sulawesi Utara	171	377	300
Sulawesi Tengah	240	337	297
Sulawesi Selatan	260	377	458
Sulawesi Tenggara	109	126	235
Gorontalo	60	116	115
Sulawesi Barat	36	95	60
Maluku	105	165	125
Maluku Utara	70	147	93
Papua Barat	32	57	61
Papua	203	356	588
INDONESIA	7 984	11 079	12 842

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018



Tabel 2.2.13 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembunuhan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,46	0,40	0,51
Sumatera Utara	2,04	2,13	1,99
Sumatera Barat	2,81	3,41	3,37
Riau	3,44	3,05	3,84
Jambi	1,90	1,93	2,11
Sumatera Selatan	3,08	4,32	3,49
Bengkulu	1,59	1,76	1,39
Lampung	2,39	1,90	2,49
Kep. Bangka Belitung	5,26	3,67	2,05
Kepulauan Riau	3,97	3,37	1,20
DKI Jakarta	6,37	10,86	5,24
Jawa Barat	2,10	2,38	2,18
Jawa Tengah	1,20	1,00	1,09
DI Yogyakarta	1,60	3,65	2,97
Jawa Timur	1,62	1,92	1,77
Banten	2,02	2,06	2,45
Bali	1,54	2,37	1,26
Nusa Tenggara Barat	2,95	3,24	3,24
Nusa Tenggara Timur	3,14	2,45	2,45
Kalimantan Barat	1,98	1,94	1,36
Kalimantan Tengah	1,77	3,25	2,60
Kalimantan Selatan	2,85	3,19	2,89
Kalimantan Timur	2,18	3,02	3,08
Kalimantan Utara*	-	1,67	0,83
Sulawesi Utara	2,78	3,32	3,10
Sulawesi Tengah	1,87	2,06	2,03
Sulawesi Selatan	2,92	3,27	3,12
Sulawesi Tenggara	1,46	1,14	1,66
Gorontalo	2,19	2,31	3,41
Sulawesi Barat	2,04	1,23	1,23
Maluku	2,44	1,56	1,21
Maluku Utara	1,02	1,09	1,76
Papua Barat	1,25	1,40	1,36
Papua	3,01	2,30	4,03
INDONESIA	2,02	2,12	2,14

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018

Tabel 2.2.14 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penganiayaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1,50	1,52	2,17
Sumatera Utara	4,61	4,33	4,81
Sumatera Barat	7,65	9,34	8,78
Riau	3,50	4,03	7,41
Jambi	3,57	3,22	5,19
Sumatera Selatan	5,30	5,19	5,30
Bengkulu	3,91	3,00	3,76
Lampung	4,71	4,18	5,92
Kep. Bangka Belitung	14,96	13,12	12,02
Kepulauan Riau	4,53	4,82	7,21
DKI Jakarta	8,24	24,72	11,24
Jawa Barat	7,65	7,13	10,04
Jawa Tengah	3,74	3,19	3,83
DI Yogyakarta	13,01	12,33	13,93
Jawa Timur	5,16	5,05	6,11
Banten	6,51	5,42	7,93
Bali	6,56	7,54	8,94
Nusa Tenggara Barat	12,08	9,38	11,72
Nusa Tenggara Timur	8,06	5,08	6,23
Kalimantan Barat	2,85	4,03	3,65
Kalimantan Tengah	3,86	4,33	4,19
Kalimantan Selatan	4,75	5,48	5,23
Kalimantan Timur	3,55	5,07	6,84
Kalimantan Utara*	-	2,30	3,73
Sulawesi Utara	11,87	8,77	9,85
Sulawesi Tengah	5,51	5,14	6,83
Sulawesi Selatan	8,75	8,61	8,63
Sulawesi Tenggara	5,56	6,95	5,95
Gorontalo	9,99	8,70	14,31
Sulawesi Barat	3,45	2,62	3,38
Maluku	6,25	4,60	4,84
Maluku Utara	2,41	4,01	3,85
Papua Barat	2,85	1,34	3,12
Papua	5,89	3,94	7,91
INDONESIA	5,31	4,92	6,07

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018



Tabel 2.2.15 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perkosaan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, Tahun 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,88	1,40	1,43
Sumatera Utara	2,26	1,88	2,90
Sumatera Barat	5,81	5,76	8,31
Riau	2,66	3,22	5,07
Jambi	1,97	2,26	3,46
Sumatera Selatan	2,07	2,41	2,21
Bengkulu	3,11	3,72	2,58
Lampung	2,56	2,17	3,62
Kep. Bangka Belitung	6,93	4,20	4,86
Kepulauan Riau	4,25	4,58	3,13
DKI Jakarta	1,50	9,36	3,37
Jawa Barat	3,52	2,94	3,46
Jawa Tengah	2,18	1,73	1,86
DI Yogyakarta	5,02	2,51	3,42
Jawa Timur	3,02	2,53	2,47
Banten	1,95	2,51	3,35
Bali	1,68	1,26	1,26
Nusa Tenggara Barat	3,60	3,42	4,72
Nusa Tenggara Timur	3,81	3,18	3,31
Kalimantan Barat	2,44	2,99	3,04
Kalimantan Tengah	1,90	2,04	1,90
Kalimantan Selatan	1,25	1,25	2,19
Kalimantan Timur	2,73	2,24	4,34
Kalimantan Utara*	-	1,88	2,90
Sulawesi Utara	4,31	2,94	5,17
Sulawesi Tengah	2,59	2,82	3,32
Sulawesi Selatan	1,41	1,55	2,95
Sulawesi Tenggara	1,23	1,76	2,17
Gorontalo	3,97	4,89	7,90
Sulawesi Barat	1,41	0,77	2,31
Maluku	3,61	2,48	3,23
Maluku Utara	3,52	2,17	2,93
Papua Barat	1,32	1,47	2,06
Papua	6,45	4,64	10,28
INDONESIA	2,70	2,49	3,40

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018

Tabel 2.2.16 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,97	0,72	0,91
Sumatera Utara	1,60	2,31	2,97
Sumatera Barat	5,32	6,20	4,16
Riau	4,77	5,50	5,49
Jambi	4,15	4,90	5,44
Sumatera Selatan	6,94	13,28	9,90
Bengkulu	2,19	2,61	3,43
Lampung	7,55	9,69	8,78
Kep. Bangka Belitung	4,43	3,94	2,05
Kepulauan Riau	3,68	4,10	4,81
DKI Jakarta	13,11	27,34	14,23
Jawa Barat	4,86	5,77	5,74
Jawa Tengah	1,70	2,05	1,81
DI Yogyakarta	6,39	4,57	3,88
Jawa Timur	3,41	4,93	3,47
Banten	3,52	3,16	4,90
Bali	1,82	3,21	3,07
Nusa Tenggara Barat	9,87	12,80	6,65
Nusa Tenggara Timur	1,82	2,05	2,03
Kalimantan Barat	1,68	1,75	1,59
Kalimantan Tengah	2,68	1,72	1,27
Kalimantan Selatan	4,25	3,64	2,39
Kalimantan Timur	1,71	3,61	3,08
Kalimantan Utara*	-	1,88	1,66
Sulawesi Utara	1,59	1,14	1,63
Sulawesi Tengah	1,32	1,16	1,19
Sulawesi Selatan	1,81	1,55	2,39
Sulawesi Tenggara	1,08	0,70	0,76
Gorontalo	0,55	0,41	1,23
Sulawesi Barat	1,10	1,08	0,62
Maluku	0,88	1,84	0,97
Maluku Utara	0,19	0,59	0,75
Papua Barat	0,90	0,83	1,71
Papua	3,90	2,32	4,66
INDONESIA	2,96	3,61	3,36

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur
 Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018



Tabel 2.2.17 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pencurian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	16,98	26,78	34,19
Sumatera Utara	29,55	34,67	45,27
Sumatera Barat	40,66	50,13	61,10
Riau	43,87	51,34	62,35
Jambi	38,92	42,62	58,58
Sumatera Selatan	46,23	59,90	61,80
Bengkulu	39,70	41,45	49,08
Lampung	56,90	61,59	70,65
Kep. Bangka Belitung	48,20	53,28	52,69
Kepulauan Riau	32,58	32,05	38,22
DKI Jakarta	74,53	85,77	68,91
Jawa Barat	70,40	73,63	73,76
Jawa Tengah	42,30	47,38	47,53
DI Yogyakarta	62,79	64,61	67,12
Jawa Timur	44,31	48,48	46,13
Banten	63,71	69,57	71,13
Bali	27,93	28,21	35,47
Nusa Tenggara Barat	59,13	68,54	63,87
Nusa Tenggara Timur	20,63	22,14	25,74
Kalimantan Barat	26,28	30,73	37,81
Kalimantan Tengah	24,48	26,07	35,66
Kalimantan Selatan	41,00	44,27	46,12
Kalimantan Timur	23,75	34,50	43,93
Kalimantan Utara*	-	12,94	27,80
Sulawesi Utara	32,72	36,82	38,36
Sulawesi Tengah	22,42	29,10	38,47
Sulawesi Selatan	37,22	39,80	42,93
Sulawesi Tenggara	17,02	21,52	31,14
Gorontalo	15,60	24,32	34,47
Sulawesi Barat	23,51	26,39	30,00
Maluku	14,45	20,68	21,45
Maluku Utara	16,31	24,83	29,43
Papua Barat	7,85	9,51	11,42
Papua	25,64	19,79	25,25
INDONESIA	36,78	41,05	45,01

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018

Tabel 2.2.18 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Penipuan/ Penggelapan Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2,27	3,52	5,47
Sumatera Utara	3,92	6,19	8,35
Sumatera Barat	8,13	12,05	16,00
Riau	7,43	11,12	12,53
Jambi	5,25	7,03	11,52
Sumatera Selatan	4,71	10,32	8,80
Bengkulu	4,90	5,03	7,00
Lampung	8,77	10,79	15,90
Kep. Bangka Belitung	21,33	16,27	14,07
Kepulauan Riau	7,08	9,40	10,82
DKI Jakarta	11,24	37,45	23,22
Jawa Barat	15,66	18,63	19,93
Jawa Tengah	9,53	11,10	11,52
DI Yogyakarta	25,57	21,92	27,63
Jawa Timur	9,01	11,77	12,95
Banten	14,85	14,64	18,81
Bali	5,17	5,87	7,54
Nusa Tenggara Barat	12,36	11,92	15,57
Nusa Tenggara Timur	2,90	4,98	4,59
Kalimantan Barat	4,27	6,69	7,16
Kalimantan Tengah	2,68	6,05	4,57
Kalimantan Selatan	6,30	7,47	8,57
Kalimantan Timur	3,96	8,19	8,77
Kalimantan Utara*	-	2,09	5,81
Sulawesi Utara	5,43	4,85	7,51
Sulawesi Tengah	5,23	5,39	7,08
Sulawesi Selatan	7,34	10,07	15,02
Sulawesi Tenggara	2,03	3,83	6,67
Gorontalo	4,24	4,76	7,63
Sulawesi Barat	4,23	4,17	9,54
Maluku	4,00	4,78	3,95
Maluku Utara	2,04	4,10	4,35
Papua Barat	1,81	2,36	2,77
Papua	9,38	6,04	7,17
INDONESIA	7,13	8,81	10,27

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur
 Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018



Tabel 2.2.19 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Pembakaran dengan Sengaja Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,25	0,74	0,49
Sumatera Utara	0,91	0,87	0,99
Sumatera Barat	2,32	1,57	2,12
Riau	1,03	4,25	3,20
Jambi	0,66	1,68	1,79
Sumatera Selatan	0,69	0,93	1,66
Bengkulu	0,80	0,98	0,53
Lampung	0,37	0,42	0,75
Kep. Bangka Belitung	2,22	1,57	0,51
Kepulauan Riau	1,13	2,41	3,13
DKI Jakarta	2,25	3,75	1,12
Jawa Barat	0,44	0,91	0,96
Jawa Tengah	0,23	0,45	0,43
DI Yogyakarta	-	1,14	1,14
Jawa Timur	0,32	0,80	0,77
Banten	0,33	0,84	0,39
Bali	0,28	0,98	1,26
Nusa Tenggara Barat	1,11	1,23	1,14
Nusa Tenggara Timur	1,89	3,00	2,98
Kalimantan Barat	0,71	1,09	1,78
Kalimantan Tengah	0,20	2,17	2,16
Kalimantan Selatan	0,65	0,90	1,59
Kalimantan Timur	0,55	1,07	1,16
Kalimantan Utara*	-	2,09	2,07
Sulawesi Utara	0,65	0,93	0,60
Sulawesi Tengah	0,83	1,06	0,79
Sulawesi Selatan	0,67	1,06	0,92
Sulawesi Tenggara	0,09	0,40	0,64
Gorontalo	0,41	0,68	1,23
Sulawesi Barat	0,31	0,93	0,77
Maluku	0,68	0,83	1,53
Maluku Utara	0,46	0,59	1,84
Papua Barat	0,35	0,51	0,86
Papua	2,09	1,25	3,28
INDONESIA	0,66	1,06	1,25

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018

Tabel 2.2.20 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Kejahatan Perdagangan Orang Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,02	0,03	0,05
Sumatera Utara	0,12	0,18	0,08
Sumatera Barat	-	-	0,08
Riau	0,36	0,11	0,32
Jambi	-	-	0,19
Sumatera Selatan	0,03	0,15	0,18
Bengkulu	0,07	0,13	0,07
Lampung	0,08	0,04	0,23
Kep. Bangka Belitung	0,55	0,52	1,02
Kepulauan Riau	1,13	0,48	0,48
DKI Jakarta	-	0,75	0,00
Jawa Barat	0,56	0,42	0,29
Jawa Tengah	0,14	0,13	0,04
DI Yogyakarta	0,23	-	0,00
Jawa Timur	0,19	0,13	0,16
Banten	0,07	0,13	0,39
Bali	-	0,14	0,00
Nusa Tenggara Barat	0,18	0,18	0,26
Nusa Tenggara Timur	0,24	0,43	0,81
Kalimantan Barat	0,15	0,33	0,00
Kalimantan Tengah	-	0,19	0,06
Kalimantan Selatan	0,05	-	0,05
Kalimantan Timur	0,20	-	0,10
Kalimantan Utara*	-	0,21	0,00
Sulawesi Utara	0,47	0,33	0,33
Sulawesi Tengah	-	0,05	0,00
Sulawesi Selatan	0,03	0,13	0,07
Sulawesi Tenggara	-	0,04	0,00
Gorontalo	-	0,14	0,00
Sulawesi Barat	-	-	0,00
Maluku	0,10	0,09	0,08
Maluku Utara	-	-	0,00
Papua Barat	-	-	0,00
Papua	0,15	0,04	0,09
INDONESIA	0,15	0,15	0,15

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur
 Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018



Tabel 2.2.21 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Penyalahgunaan/
Pedaran Narkoba Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011,
2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	7,17	7,80	18,62
Sumatera Utara	9,37	16,92	29,27
Sumatera Barat	16,65	14,67	37,73
Riau	10,27	17,17	36,43
Jambi	4,88	10,77	24,78
Sumatera Selatan	6,91	12,64	24,00
Bengkulu	2,58	4,83	7,60
Lampung	5,03	7,07	17,56
Kep. Bangka Belitung	11,08	15,22	28,64
Kepulauan Riau	6,80	6,51	15,14
DKI Jakarta	27,72	47,19	34,46
Jawa Barat	8,59	9,36	15,98
Jawa Tengah	2,87	3,07	5,78
DI Yogyakarta	13,47	8,45	16,67
Jawa Timur	6,41	7,52	17,42
Banten	8,21	9,99	16,69
Bali	2,65	4,75	9,08
Nusa Tenggara Barat	4,61	8,15	18,90
Nusa Tenggara Timur	0,44	0,55	0,27
Kalimantan Barat	3,05	2,89	11,28
Kalimantan Tengah	2,49	5,16	14,53
Kalimantan Selatan	9,55	15,54	33,62
Kalimantan Timur	6,01	14,42	29,00
Kalimantan Utara*	-	6,68	19,50
Sulawesi Utara	0,53	1,36	3,05
Sulawesi Tengah	2,98	7,25	15,64
Sulawesi Selatan	2,82	4,22	16,60
Sulawesi Tenggara	0,38	1,10	3,57
Gorontalo	1,50	2,85	5,86
Sulawesi Barat	1,25	3,09	9,23
Maluku	1,56	1,38	2,26
Maluku Utara	1,11	1,76	2,34
Papua Barat	0,14	0,51	1,71
Papua	0,48	0,45	2,63
INDONESIA	5,22	7,22	14,99

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018

Tabel 2.2.22 Persentase Desa/Kelurahan yang Pernah Ada Kejadian Perjudian Selama Setahun Terakhir Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	3,73	6,16	9,19
Sumatera Utara	24,55	27,28	31,75
Sumatera Barat	23,14	23,32	35,92
Riau	14,26	17,93	27,20
Jambi	8,89	10,12	19,01
Sumatera Selatan	10,20	21,10	20,29
Bengkulu	3,45	4,37	7,07
Lampung	9,29	14,93	20,57
Kep. Bangka Belitung	15,79	18,64	15,35
Kepulauan Riau	5,95	7,47	11,54
DKI Jakarta	12,73	31,09	13,11
Jawa Barat	8,43	11,61	13,03
Jawa Tengah	7,51	8,98	13,47
DI Yogyakarta	15,98	13,47	16,89
Jawa Timur	14,43	17,67	15,24
Banten	11,01	11,61	14,88
Bali	21,51	11,31	9,36
Nusa Tenggara Barat	12,45	17,35	17,94
Nusa Tenggara Timur	5,93	8,96	11,60
Kalimantan Barat	10,68	14,37	19,47
Kalimantan Tengah	7,46	15,93	13,77
Kalimantan Selatan	10,45	14,09	11,45
Kalimantan Timur	7,65	12,57	13,97
Kalimantan Utara*	-	8,14	9,13
Sulawesi Utara	10,10	20,53	16,32
Sulawesi Tengah	13,22	16,97	14,70
Sulawesi Selatan	8,72	12,44	15,02
Sulawesi Tenggara	5,14	5,55	9,98
Gorontalo	8,21	15,76	15,67
Sulawesi Barat	5,64	14,66	9,23
Maluku	10,25	15,17	10,08
Maluku Utara	6,49	12,29	7,78
Papua Barat	2,22	3,64	3,07
Papua	5,17	7,31	10,59
INDONESIA	10,16	13,48	15,30

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018



<https://www.bps.go.id>





DATA POTENSI DESA KONFLIK MASSAL

<https://www.bri.go.id>



Tabel 2.3.1 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia Menurut Beberapa Karakteristik Perkelahian Massal yang Terjadi, 2011, 2014, dan 2018

Beberapa Karakteristik Perkelahian Massa	2011		2014		2018	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Keberadaan Kejadian Perkelahian Massal						
1. Ada kejadian	2 562	3,26	2 779	3,38	3 147	3,75
2. Tidak ada kejadian	76 047	96,74	79 411	96,47	80 784	96,25
Total desa/kelurahan	78 609	100,00	82 190	100,00	83 931	100,00
B. Jenis Perkelahian Massal						
1. Antar Kelompok Warga	1 348	1,71	1 404	1,71	1 674	1,99
2. Warga Antar Desa/ Kelurahan	1 054	1,34	1 128	1,37	1 078	1,28
3. Warga dengan Aparat Keamanan	120	0,15	108	0,13	91	0,11
4. Warga dengan Aparat Pemerintah	102	0,13	99	0,12	132	0,16
5. Antar Pelajar	210	0,27	327	0,40	548	0,65
6. Antar Suku	102	0,13	70	0,09	112	0,13
7. Lainnya	149	0,19	160	0,19	171	0,20
C. Penyelesaian Perkelahian Massal						
1. Diselesaikan secara damai	2 314	90,32	2 564	92,26	2 961	94,09
2. Tidak dapat diselesaikan	248	9,68	215	7,74	186	5,91
Total desa/kelurahan yang ada kejadian perkelahian massal	2 562	100,00	2 779	100,00	3 147	100,00

Catatan: N=Jumlah, %=Persentase
Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018

Tabel 2.3.2 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Konflik Massal Selama Setahun yang Lalu Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun					
	2011		2014		2018	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	69	1,06	61	0,94	90	1,38
Sumatera Utara	119	2,05	118	1,93	176	2,87
Sumatera Barat	50	4,84	45	3,93	80	6,27
Riau	47	2,84	38	2,07	51	2,72
Jambi	47	3,43	40	2,58	41	2,62
Sumatera Selatan	51	1,60	67	2,07	37	1,13
Bengkulu	24	1,59	27	1,76	28	1,85
Lampung	40	1,62	34	1,29	44	1,66
Kep. Bangka Belitung	28	7,76	24	6,30	3	0,77
Kepulauan Riau	7	1,98	3	0,72	4	0,96
DKI Jakarta	61	22,85	72	26,97	55	20,60
Jawa Barat	195	3,30	259	4,34	291	4,89
Jawa Tengah	194	2,26	252	2,94	233	2,72
DI Yogyakarta	13	2,97	12	2,74	14	3,20
Jawa Timur	162	1,91	132	1,55	185	2,18
Banten	80	5,21	40	2,58	58	3,74
Bali	12	1,68	6	0,84	5	0,70
Nusa Tenggara Barat	68	6,27	76	6,66	81	7,09
Nusa Tenggara Timur	183	6,17	174	5,32	205	6,11
Kalimantan Barat	27	1,37	39	1,85	30	1,40
Kalimantan Tengah	25	1,64	36	2,29	13	0,83
Kalimantan Selatan	13	0,65	26	1,29	21	1,05
Kalimantan Timur	43	2,94	20	1,95	17	1,64
Kalimantan Utara*	-	-	6	1,25	5	1,04
Sulawesi Utara	101	5,97	165	8,99	111	6,04
Sulawesi Tengah	65	3,58	149	7,50	98	4,85
Sulawesi Selatan	113	3,79	145	4,79	130	4,26
Sulawesi Tenggara	54	2,55	73	3,21	84	3,57
Gorontalo	21	2,87	24	3,26	18	2,45
Sulawesi Barat	9	1,41	14	2,16	15	2,31
Maluku	146	14,26	160	14,71	199	16,05
Maluku Utara	110	10,19	186	15,55	164	13,71
Papua Barat	79	5,49	59	3,77	114	5,74
Papua	306	7,80	197	4,04	447	8,05
INDONESIA	2 562	3,26	2 779	3,38	3 147	3,75

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur

N=Jumlah, %=Persentase

Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018



Tabel 2.3.3 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2011

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa/	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	34	29	4	2
Sumatera Utara	69	39	10	3
Sumatera Barat	21	24	-	1
Riau	23	15	5	4
Jambi	14	29	3	1
Sumatera Selatan	25	25	5	7
Bengkulu	9	11	4	1
Lampung	12	19	5	1
Kep. Bangka Belitung	11	14	2	-
Kepulauan Riau	2	3	1	2
DKI Jakarta	27	16	2	1
Jawa Barat	102	56	5	6
Jawa Tengah	97	99	2	3
DI Yogyakarta	4	-	-	-
Jawa Timur	88	66	4	4
Banten	42	21	2	-
Bali	9	3	-	-
Nusa Tenggara Barat	40	31	2	4
Nusa Tenggara Timur	79	93	7	3
Kalimantan Barat	13	6	3	1
Kalimantan Tengah	18	4	-	-
Kalimantan Selatan	1	8	-	1
Kalimantan Timur	22	11	1	4
Sulawesi Utara	47	65	3	2
Sulawesi Tengah	22	40	6	1
Sulawesi Selatan	53	58	4	3
Sulawesi Tenggara	25	25	1	2
Gorontalo	7	5	4	3
Sulawesi Barat	6	-	1	1
Maluku	94	55	5	10
Maluku Utara	52	64	5	7
Papua Barat	56	27	3	5
Papua	224	93	21	19
INDONESIA	1 348	1 054	120	102

Tabel 2.3.3 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2011 (lanjutan)

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	4	1	3
Sumatera Utara	4	2	13
Sumatera Barat	9	-	2
Riau	1	3	3
Jambi	6	2	2
Sumatera Selatan	5	2	3
Bengkulu	4	1	1
Lampung	2	1	1
Kep. Bangka Belitung	1	-	1
Kepulauan Riau	-	-	1
DKI Jakarta	23	-	5
Jawa Barat	44	3	22
Jawa Tengah	4	1	8
DI Yogyakarta	8	1	-
Jawa Timur	8	-	10
Banten	12	1	13
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	2	3	4
Nusa Tenggara Timur	10	6	11
Kalimantan Barat	1	3	6
Kalimantan Tengah	-	-	3
Kalimantan Selatan	-	1	2
Kalimantan Timur	2	3	4
Sulawesi Utara	2	-	-
Sulawesi Tengah	3	2	2
Sulawesi Selatan	16	3	3
Sulawesi Tenggara	1	1	2
Gorontalo	2	1	6
Sulawesi Barat	1	-	3
Maluku	11	2	-
Maluku Utara	4	1	4
Papua Barat	2	1	2
Papua	18	57	9
INDONESIA	210	102	149

Catatan: N=Jumlah, %=Persentase

Sumber: Podes 2011



Tabel 2.3.4 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2014

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	26	24	1	2
Sumatera Utara	58	43	10	7
Sumatera Barat	29	10	5	-
Riau	14	13	3	1
Jambi	8	22	-	1
Sumatera Selatan	34	23	9	4
Bengkulu	7	8	-	-
Lampung	11	20	1	1
Kep. Bangka Belitung	12	11	-	1
Kepulauan Riau	2	-	-	-
DKI Jakarta	34	7	-	-
Jawa Barat	103	91	4	4
Jawa Tengah	120	120	4	5
DI Yogyakarta	5	4	-	-
Jawa Timur	62	51	3	2
Banten	14	12	1	-
Bali	3	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	33	42	4	2
Nusa Tenggara Timur	90	64	1	12
Kalimantan Barat	29	8	3	-
Kalimantan Tengah	27	1	1	-
Kalimantan Selatan	9	11	-	1
Kalimantan Timur	12	1	1	2
Kalimantan Utara	3	3	-	-
Sulawesi Utara	83	99	8	4
Sulawesi Tengah	54	102	2	1
Sulawesi Selatan	71	68	5	-
Sulawesi Tenggara	34	44	5	3
Gorontalo	14	7	2	4
Sulawesi Barat	6	8	-	-
Maluku	99	68	5	7
Maluku Utara	125	76	5	5
Papua Barat	36	23	6	2
Papua	137	44	19	28
INDONESIA	1 404	1 128	108	99

Tabel 2.3.4 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2014 (lanjutan)

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	7	2	4
Sumatera Utara	8	2	11
Sumatera Barat	7	1	2
Riau	1	2	8
Jambi	10	1	2
Sumatera Selatan	7	-	4
Bengkulu	11	1	2
Lampung	1	2	3
Kep. Bangka Belitung	2	1	1
Kepulauan Riau	1	1	-
DKI Jakarta	47	-	2
Jawa Barat	89	3	19
Jawa Tengah	11	-	10
DI Yogyakarta	2	1	5
Jawa Timur	12	-	9
Banten	12	-	2
Bali	-	-	3
Nusa Tenggara Barat	9	3	3
Nusa Tenggara Timur	10	6	8
Kalimantan Barat	4	-	2
Kalimantan Tengah	6	-	4
Kalimantan Selatan	2	-	4
Kalimantan Timur	6	-	2
Kalimantan Utara	-	-	1
Sulawesi Utara	10	1	4
Sulawesi Tengah	3	2	8
Sulawesi Selatan	18	1	5
Sulawesi Tenggara	3	-	1
Gorontalo	3	-	1
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	8	2	1
Maluku Utara	7	2	13
Papua Barat	1	4	3
Papua	9	32	13
INDONESIA	327	70	160

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur
 Sumber: Podes 2014



Tabel 2.3.5 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2018

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	43	39	4	8
Sumatera Utara	95	64	3	9
Sumatera Barat	27	14	1	-
Riau	17	18	3	3
Jambi	7	22	-	2
Sumatera Selatan	16	11	2	-
Bengkulu	8	8	-	1
Lampung	21	16	1	1
Kep. Bangka Belitung	1	-	-	-
Kepulauan Riau	1	1	1	-
DKI Jakarta	32	18	-	-
Jawa Barat	122	60	4	8
Jawa Tengah	107	99	1	2
DI Yogyakarta	5	1	-	-
Jawa Timur	82	58	7	3
Banten	25	20	1	2
Bali	5	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	36	48	3	2
Nusa Tenggara Timur	123	78	3	4
Kalimantan Barat	16	9	-	1
Kalimantan Tengah	8	4	-	-
Kalimantan Selatan	9	12	3	2
Kalimantan Timur	7	3	-	-
Kalimantan Utara	2	1	-	-
Sulawesi Utara	65	50	4	6
Sulawesi Tengah	46	50	-	-
Sulawesi Selatan	71	39	2	1
Sulawesi Tenggara	34	46	1	-
Gorontalo	4	11	1	1
Sulawesi Barat	13	2	1	-
Maluku	117	80	10	13
Maluku Utara	71	85	6	11
Papua Barat	85	28	8	8
Papua	353	83	21	44
INDONESIA	1 674	1 078	91	132

Tabel 2.3.5 Jumlah Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2018 (lanjutan)

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	10	2	6
Sumatera Utara	25	-	12
Sumatera Barat	41	1	5
Riau	18	-	2
Jambi	11	1	4
Sumatera Selatan	9	-	4
Bengkulu	10	-	2
Lampung	6	-	4
Kep. Bangka Belitung	1	1	-
Kepulauan Riau	1	-	-
DKI Jakarta	18	-	-
Jawa Barat	118	5	21
Jawa Tengah	36	-	15
DI Yogyakarta	5	1	2
Jawa Timur	18	3	28
Banten	14	1	4
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	12	-	-
Nusa Tenggara Timur	37	5	10
Kalimantan Barat	3	-	3
Kalimantan Tengah	1	-	-
Kalimantan Selatan	1	-	1
Kalimantan Timur	6	-	2
Kalimantan Utara	-	-	2
Sulawesi Utara	9	-	5
Sulawesi Tengah	13	-	2
Sulawesi Selatan	33	2	4
Sulawesi Tenggara	15	-	4
Gorontalo	3	-	-
Sulawesi Barat	2	-	-
Maluku	29	1	3
Maluku Utara	26	1	2
Papua Barat	8	12	4
Papua	9	76	20
INDONESIA	548	112	171

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur
Sumber: Podes 2018



Tabel 2.3.6 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2011

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa/	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0,52	0,45	0,06	0,03
Sumatera Utara	1,19	0,67	0,17	0,05
Sumatera Barat	2,03	2,32	-	0,10
Riau	1,39	0,91	0,30	0,24
Jambi	1,02	2,11	0,22	0,07
Sumatera Selatan	0,78	0,78	0,16	0,22
Bengkulu	0,60	0,73	0,27	0,07
Lampung	0,49	0,77	0,20	0,04
Kep. Bangka Belitung	3,05	3,88	0,55	-
Kepulauan Riau	0,57	0,85	0,28	0,57
DKI Jakarta	10,11	5,99	0,75	0,37
Jawa Barat	1,73	0,95	0,08	0,10
Jawa Tengah	1,13	1,15	0,02	0,03
DI Yogyakarta	0,91	-	-	-
Jawa Timur	1,04	0,78	0,05	0,05
Banten	2,74	1,37	0,13	-
Bali	1,26	0,42	-	-
Nusa Tenggara Barat	3,69	2,86	0,18	0,37
Nusa Tenggara Timur	2,66	3,14	0,24	0,10
Kalimantan Barat	0,66	0,31	0,15	0,05
Kalimantan Tengah	1,18	0,26	-	-
Kalimantan Selatan	0,05	0,40	-	0,05
Kalimantan Timur	1,50	0,75	0,07	0,27
Sulawesi Utara	2,78	3,84	0,18	0,12
Sulawesi Tengah	1,21	2,20	0,33	0,06
Sulawesi Selatan	1,78	1,95	0,13	0,10
Sulawesi Tenggara	1,18	1,18	0,05	0,09
Gorontalo	0,96	0,68	0,55	0,41
Sulawesi Barat	0,94	-	0,16	0,16
Maluku	9,18	5,37	0,49	0,98
Maluku Utara	4,82	5,93	0,46	0,65
Papua Barat	3,89	1,88	0,21	0,35
Papua	5,71	2,37	0,54	0,48
INDONESIA	1,71	1,34	0,15	0,13

Tabel 2.3.6 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2011 (lanjutan)

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,06	0,02	0,05
Sumatera Utara	0,07	0,03	0,22
Sumatera Barat	0,87	-	0,19
Riau	0,06	0,18	0,18
Jambi	0,44	0,15	0,15
Sumatera Selatan	0,16	0,06	0,09
Bengkulu	0,27	0,07	0,07
Lampung	0,08	0,04	0,04
Kep. Bangka Belitung	0,28	-	0,28
Kepulauan Riau	-	-	0,28
DKI Jakarta	8,61	-	1,87
Jawa Barat	0,75	0,05	0,37
Jawa Tengah	0,05	0,01	0,09
DI Yogyakarta	1,83	0,23	-
Jawa Timur	0,09	-	0,12
Banten	0,78	0,07	0,85
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	0,18	0,28	0,37
Nusa Tenggara Timur	0,34	0,20	0,37
Kalimantan Barat	0,05	0,15	0,31
Kalimantan Tengah	-	-	0,20
Kalimantan Selatan	-	0,05	0,10
Kalimantan Timur	0,14	0,20	0,27
Sulawesi Utara	0,12	-	-
Sulawesi Tengah	0,17	0,11	0,11
Sulawesi Selatan	0,54	0,10	0,10
Sulawesi Tenggara	0,05	0,05	0,09
Gorontalo	0,27	0,14	0,82
Sulawesi Barat	0,16	-	0,47
Maluku	1,07	0,20	-
Maluku Utara	0,37	0,09	0,37
Papua Barat	0,14	0,07	0,14
Papua	0,46	1,45	0,23
INDONESIA	0,27	0,13	0,19

Sumber: Podes 2011



Tabel 2.3.7 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2014

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0,40	0,37	0,02	0,03
Sumatera Utara	0,95	0,70	0,16	0,11
Sumatera Barat	2,53	0,87	0,44	-
Riau	0,76	0,71	0,16	0,05
Jambi	0,52	1,42	-	0,06
Sumatera Selatan	1,05	0,71	0,28	0,12
Bengkulu	0,46	0,52	-	-
Lampung	0,42	0,76	0,04	0,04
Kep. Bangka Belitung	3,15	2,89	-	0,26
Kepulauan Riau	0,48	-	-	-
DKI Jakarta	12,73	2,62	-	-
Jawa Barat	1,73	1,53	0,07	0,07
Jawa Tengah	1,40	1,40	0,05	0,06
DI Yogyakarta	1,14	0,91	-	-
Jawa Timur	0,73	0,60	0,04	0,02
Banten	0,90	0,77	0,06	-
Bali	0,42	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	2,89	3,68	0,35	0,18
Nusa Tenggara Timur	2,75	1,96	0,03	0,37
Kalimantan Barat	1,38	0,38	0,14	-
Kalimantan Tengah	1,72	0,06	0,06	-
Kalimantan Selatan	0,45	0,55	-	0,05
Kalimantan Timur	1,17	0,10	0,10	0,19
Kalimantan Utara	0,63	0,63	-	-
Sulawesi Utara	4,52	5,39	0,44	0,22
Sulawesi Tengah	2,72	5,14	0,10	0,05
Sulawesi Selatan	2,34	2,24	0,17	-
Sulawesi Tenggara	1,50	1,94	0,22	0,13
Gorontalo	1,90	0,95	0,27	0,54
Sulawesi Barat	0,93	1,23	-	-
Maluku	9,10	6,25	0,46	0,64
Maluku Utara	10,45	6,35	0,42	0,42
Papua Barat	2,30	1,47	0,38	0,13
Papua	2,81	0,90	0,39	0,57
INDONESIA	1,71	1,37	0,13	0,12

Tabel 2.3.7 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2014 (lanjutan)

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,11	0,03	0,06
Sumatera Utara	0,13	0,03	0,18
Sumatera Barat	0,61	0,09	0,17
Riau	0,05	0,11	0,44
Jambi	0,64	0,06	0,13
Sumatera Selatan	0,22	-	0,12
Bengkulu	0,72	0,07	0,13
Lampung	0,04	0,08	0,11
Kep. Bangka Belitung	0,52	0,26	0,26
Kepulauan Riau	0,24	0,24	-
DKI Jakarta	17,60	-	0,75
Jawa Barat	1,49	0,05	0,32
Jawa Tengah	0,13	-	0,12
DI Yogyakarta	0,46	0,23	1,14
Jawa Timur	0,14	-	0,11
Banten	0,77	-	0,13
Bali	-	-	0,42
Nusa Tenggara Barat	0,79	0,26	0,26
Nusa Tenggara Timur	0,31	0,18	0,24
Kalimantan Barat	0,19	-	0,09
Kalimantan Tengah	0,38	-	0,25
Kalimantan Selatan	0,10	-	0,20
Kalimantan Timur	0,58	-	0,19
Kalimantan Utara	-	-	0,21
Sulawesi Utara	0,54	0,05	0,22
Sulawesi Tengah	0,15	0,10	0,40
Sulawesi Selatan	0,59	0,03	0,17
Sulawesi Tenggara	0,13	-	0,04
Gorontalo	0,41	-	0,14
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	0,74	0,18	0,09
Maluku Utara	0,59	0,17	1,09
Papua Barat	0,06	0,26	0,19
Papua	0,18	0,66	0,27
INDONESIA	0,40	0,09	0,19

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur
Sumber: Podes 2014



Tabel 2.3.8 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2018

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi			
	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa	Warga dengan Aparat Keamanan	Warga dengan Aparat Pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0,66	0,60	0,06	0,12
Sumatera Utara	1,55	1,04	0,05	0,15
Sumatera Barat	2,12	1,10	0,08	-
Riau	0,91	0,96	0,16	0,16
Jambi	0,45	1,41	-	0,13
Sumatera Selatan	0,49	0,34	0,06	-
Bengkulu	0,53	0,53	-	0,07
Lampung	0,79	0,60	0,04	0,04
Kep. Bangka Belitung	0,26	-	-	-
Kepulauan Riau	0,24	0,24	0,24	-
DKI Jakarta	11,99	6,74	-	-
Jawa Barat	2,05	1,01	0,07	0,13
Jawa Tengah	1,25	1,16	0,01	0,02
DI Yogyakarta	1,14	0,23	-	-
Jawa Timur	0,97	0,68	0,08	0,04
Banten	1,61	1,29	0,06	0,13
Bali	0,70	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	3,15	4,20	0,26	0,17
Nusa Tenggara Timur	3,67	2,33	0,09	0,12
Kalimantan Barat	0,75	0,42	-	0,05
Kalimantan Tengah	0,51	0,25	-	-
Kalimantan Selatan	0,45	0,60	0,15	0,10
Kalimantan Timur	0,67	0,29	-	-
Kalimantan Utara	0,41	0,21	-	-
Sulawesi Utara	3,54	2,72	0,22	0,33
Sulawesi Tengah	2,28	2,48	-	-
Sulawesi Selatan	2,33	1,28	0,07	0,03
Sulawesi Tenggara	1,44	1,95	0,04	-
Gorontalo	0,54	1,50	0,14	0,14
Sulawesi Barat	2,00	0,31	0,15	-
Maluku	9,44	6,45	0,81	1,05
Maluku Utara	5,94	7,11	0,50	0,92
Papua Barat	4,28	1,41	0,40	0,40
Papua	6,36	1,49	0,38	0,79
INDONESIA	1,99	1,28	0,11	0,16

Tabel 2.3.8 Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal Menurut Provinsi dan Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi, 2018 (lanjutan)

Provinsi	Jenis Perkelahian Massal yang Pernah Terjadi		
	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,15	0,03	0,09
Sumatera Utara	0,41	-	0,20
Sumatera Barat	3,22	0,08	0,39
Riau	0,96	-	0,11
Jambi	0,70	0,06	0,26
Sumatera Selatan	0,28	-	0,12
Bengkulu	0,66	-	0,13
Lampung	0,23	-	0,15
Kep. Bangka Belitung	0,26	0,26	-
Kepulauan Riau	0,24	-	-
DKI Jakarta	6,74	-	-
Jawa Barat	1,98	0,08	0,35
Jawa Tengah	0,42	-	0,18
DI Yogyakarta	1,14	0,23	0,46
Jawa Timur	0,21	0,04	0,33
Banten	0,90	0,06	0,26
Bali	-	-	-
Nusa Tenggara Barat	1,05	-	-
Nusa Tenggara Timur	1,10	0,15	0,30
Kalimantan Barat	0,14	-	0,14
Kalimantan Tengah	0,06	-	-
Kalimantan Selatan	0,05	-	0,05
Kalimantan Timur	0,58	-	0,19
Kalimantan Utara	-	-	0,41
Sulawesi Utara	0,49	-	0,27
Sulawesi Tengah	0,64	-	0,10
Sulawesi Selatan	1,08	0,07	0,13
Sulawesi Tenggara	0,64	-	0,17
Gorontalo	0,41	-	-
Sulawesi Barat	0,31	-	-
Maluku	2,34	0,08	0,24
Maluku Utara	2,17	0,08	0,17
Papua Barat	0,40	0,60	0,20
Papua	0,16	1,37	0,36
INDONESIA	0,65	0,13	0,20

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur
 Sumber: Podes 2018



Tabel 2.3.9 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal dan Mampu Menyelesaikannya Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Tahun					
	2011		2014		2018	
	N	%	N	%	N	%
(1)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	66	95,65	54	88,52	70	77,78
Sumatera Utara	101	84,87	103	87,29	170	96,59
Sumatera Barat	31	62,00	44	97,78	72	90,00
Riau	40	85,11	32	84,21	44	86,27
Jambi	42	89,36	39	97,50	38	92,68
Sumatera Selatan	47	92,16	62	92,54	33	89,19
Bengkulu	18	75,00	24	88,89	28	100,00
Lampung	27	67,50	30	88,24	41	93,18
Kep. Bangka Belitung	27	96,43	24	100,00	3	100,00
Kepulauan Riau	5	71,43	2	66,67	4	100,00
DKI Jakarta	57	93,44	69	95,83	52	94,55
Jawa Barat	180	92,31	246	94,98	280	96,22
Jawa Tengah	183	94,33	237	94,05	226	96,58
DI Yogyakarta	11	84,62	12	100,00	14	100,00
Jawa Timur	150	92,59	121	91,67	179	96,76
Banten	73	91,25	36	90,00	56	96,55
Bali	10	83,33	5	83,33	4	80,00
Nusa Tenggara Barat	64	94,12	73	96,05	78	96,30
Nusa Tenggara Timur	152	83,06	143	82,18	184	89,76
Kalimantan Barat	21	77,78	38	97,44	28	93,33
Kalimantan Tengah	23	92,00	33	91,67	14	100,00
Kalimantan Selatan	11	84,62	24	92,31	18	85,71
Kalimantan Timur	38	88,37	15	75,00	18	105,88
Kalimantan Utara*	-	-	6	100,00	4	80,00
Sulawesi Utara	94	93,07	151	91,52	106	95,50
Sulawesi Tengah	64	98,46	142	95,30	96	97,96
Sulawesi Selatan	107	94,69	140	96,55	118	90,77
Sulawesi Tenggara	49	90,74	68	93,15	80	95,24
Gorontalo	19	90,48	19	79,17	18	100,00
Sulawesi Barat	7	77,78	10	71,43	14	93,33
Maluku	126	86,30	147	91,88	185	92,96
Maluku Utara	103	93,64	178	95,70	157	95,73
Papua Barat	73	92,41	56	94,92	106	92,98
Papua	295	96,41	181	91,88	426	95,30
INDONESIA	2 314	90,32	2 564	92,26	2 964	94,13

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur

N=Jumlah, %=Persentase

Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018



DATA POTENSI DESA UPAYA MENJAGA KEAMANAN

<https://www.opsi.id>



Tabel 2.4.1 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal dan Mampu Menyelesaikannya Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

Jenis Upaya yang Dilakukan untuk Menjaga Keamanan	2011		2014		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Membangun Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling)	31 145	39,62	41 611	50,63	46 752	55,70
Membentuk Regu Keamanan Lingkungan	31 288	39,80	35 629	43,35	39 585	47,16
Menambah Jumlah Anggota Hansip	1 262	16,05	19 299	23,48	20 869	24,86
Memeriksa Setiap Orang Asing	34 982	44,50	-	-	-	-
Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan *)	-	-	48 357	58,84	52 240	62,24

Catatan: Pada Podes 2014 pertanyaan Memeriksa Setiap Orang Asing diubah menjadi Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan

Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018

Tabel 2.4.2 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2011

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan			
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip	Memeriksa Setiap Orang Asing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	2 797	2 154	657	3 587
Sumatera Utara	1 561	1 785	363	1 907
Sumatera Barat	624	491	128	527
Riau	842	784	365	814
Jambi	625	469	130	486
Sumatera Selatan	1 536	1 478	533	1 426
Bengkulu	667	663	231	623
Lampung	1 359	1 591	572	1 263
Kep. Bangka Belitung	142	170	57	154
Kepulauan Riau	141	181	102	182
DKI Jakarta	186	232	171	181
Jawa Barat	3 833	3 829	1 889	4 041
Jawa Tengah	2 574	3 395	1 297	4 467
DI Yogyakarta	272	257	114	167
Jawa Timur	3 119	3 602	145	4 611
Banten	977	971	380	880
Bali	189	164	84	484
Nusa Tenggara Barat	605	587	129	415
Nusa Tenggara Timur	955	916	545	858
Kalimantan Barat	470	503	195	623
Kalimantan Tengah	775	545	231	564
Kalimantan Selatan	664	419	151	537
Kalimantan Timur	738	620	300	525
Sulawesi Utara	803	857	490	129
Sulawesi Tengah	780	816	394	806
Sulawesi Selatan	1 685	1 353	440	1 303
Sulawesi Tenggara	978	923	283	790
Gorontalo	181	288	168	328
Sulawesi Barat	358	271	86	193
Maluku	185	259	110	268
Maluku Utara	175	217	161	250
Papua Barat	99	146	104	121
Papua	250	352	310	311
INDONESIA	31 145	31 288	1 262	34 982

Sumber: Podes 2011



Tabel 2.4.3 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan			
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	2 819	1 927	656	5 375
Sumatera Utara	1 368	1 056	324	2 248
Sumatera Barat	813	563	236	770
Riau	1 083	915	357	1 118
Jambi	101	750	328	1 002
Sumatera Selatan	1 902	1 636	738	2 044
Bengkulu	1 118	1 019	402	1 003
Lampung	2 032	1 933	1 118	1 982
Kep. Bangka Belitung	210	157	113	272
Kepulauan Riau	193	176	165	294
DKI Jakarta	227	223	138	245
Jawa Barat	4 976	461	2 445	5 029
Jawa Tengah	5 098	4 595	2 269	6 218
DI Yogyakarta	365	310	195	329
Jawa Timur	5 171	4 469	289	6 268
Banten	1 181	906	497	1 044
Bali	374	445	97	499
Nusa Tenggara Barat	826	677	324	597
Nusa Tenggara Timur	772	858	622	746
Kalimantan Barat	548	488	433	952
Kalimantan Tengah	991	734	467	1 035
Kalimantan Selatan	1 167	640	368	1 124
Kalimantan Timur	758	664	351	796
Kalimantan Utara	177	134	73	250
Sulawesi Utara	109	1 166	611	1 517
Sulawesi Tengah	1 105	1 129	612	1 296
Sulawesi Selatan	1 941	1 256	792	1 322
Sulawesi Tenggara	104	802	403	885
Gorontalo	253	401	254	483
Sulawesi Barat	342	227	173	258
Maluku	183	200	188	470
Maluku Utara	159	197	183	450
Papua Barat	132	145	143	213
Papua	187	221	334	223
INDONESIA	41 611	35 629	19 299	48 357

Sumber: Podes 2014

Tabel 2.4.4 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2018

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan			
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	2 329	1 404	614	5 083
Sumatera Utara	1 903	1 396	594	2 516
Sumatera Barat	971	723	351	962
Riau	1 196	985	416	1 292
Jambi	1 112	749	426	1 029
Sumatera Selatan	2 243	2 003	917	2 201
Bengkulu	1 051	888	323	1 089
Lampung	2 198	2 071	863	2 114
Kep. Bangka Belitung	245	209	128	304
Kepulauan Riau	194	181	108	309
DKI Jakarta	190	199	125	242
Jawa Barat	5 409	4 709	2 375	5 134
Jawa Tengah	5 999	5 140	2 511	6 437
DI Yogyakarta	392	347	222	376
Jawa Timur	6 321	5 245	3 086	6 614
Banten	1 280	1 035	602	1 258
Bali	395	380	123	556
Nusa Tenggara Barat	916	724	400	634
Nusa Tenggara Timur	1 085	1 244	867	979
Kalimantan Barat	963	838	521	1 208
Kalimantan Tengah	1 042	911	464	1 028
Kalimantan Selatan	1 243	799	425	1 240
Kalimantan Timur	744	594	267	742
Kalimantan Utara	241	177	101	286
Sulawesi Utara	1 167	1 136	429	1 636
Sulawesi Tengah	1 168	1 155	518	1 347
Sulawesi Selatan	1 896	1 325	825	1 623
Sulawesi Tenggara	1 055	901	522	947
Gorontalo	254	281	255	500
Sulawesi Barat	358	230	168	314
Maluku	252	316	226	647
Maluku Utara	248	348	317	723
Papua Barat	251	295	185	239
Papua	441	647	595	631
INDONESIA	46 752	39 585	20 869	52 240

Sumber: Podes 2018



Tabel 2.4.5 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2011

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanannya			
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip	Memeriksa Setiap Orang Asing
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	43,14	33,23	10,13	55,33
Sumatera Utara	26,93	30,79	6,26	32,90
Sumatera Barat	60,41	47,53	12,39	51,02
Riau	50,88	47,37	22,05	49,18
Jambi	45,55	34,18	9,48	35,42
Sumatera Selatan	48,21	46,39	16,73	44,76
Bengkulu	44,20	43,94	15,31	41,29
Lampung	55,15	64,57	23,21	51,26
Kep. Bangka Belitung	39,34	47,09	15,79	42,66
Kepulauan Riau	39,94	51,27	28,90	51,56
DKI Jakarta	69,66	86,89	64,04	67,79
Jawa Barat	64,91	64,84	31,99	68,43
Jawa Tengah	30,01	39,58	15,12	52,08
DI Yogyakarta	62,10	58,68	26,03	38,13
Jawa Timur	36,69	42,37	17,05	54,23
Banten	63,65	63,26	24,76	57,33
Bali	26,40	22,91	11,73	67,60
Nusa Tenggara Barat	55,81	54,15	11,90	38,28
Nusa Tenggara Timur	32,20	30,88	18,37	28,93
Kalimantan Barat	23,89	25,57	9,91	31,67
Kalimantan Tengah	50,72	35,67	15,12	36,91
Kalimantan Selatan	33,20	20,95	7,55	26,85
Kalimantan Timur	50,38	42,32	20,48	35,84
Sulawesi Utara	47,43	50,62	28,94	76,20
Sulawesi Tengah	42,98	44,96	21,71	44,41
Sulawesi Selatan	56,51	45,37	14,76	43,70
Sulawesi Tenggara	46,11	43,52	13,34	37,25
Gorontalo	24,76	39,40	22,98	44,87
Sulawesi Barat	56,11	42,48	13,48	30,25
Maluku	18,07	25,29	10,74	26,17
Maluku Utara	16,22	20,11	14,92	23,17
Papua Barat	6,88	10,15	7,23	8,41
Papua	6,37	8,97	7,90	7,93
INDONESIA	39,62	39,80	16,05	44,50

Sumber: Podes 2011

Tabel 2.4.6 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan			
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	43,29	29,59	10,07	82,54
Sumatera Utara	22,41	17,30	5,31	36,83
Sumatera Barat	71,00	49,17	20,61	67,25
Riau	59,02	49,86	19,46	60,93
Jambi	65,12	48,36	21,15	64,60
Sumatera Selatan	58,76	50,54	22,80	63,14
Bengkulu	72,98	66,51	26,24	65,47
Lampung	77,20	73,44	42,48	75,30
Kep. Bangka Belitung	55,12	41,21	29,66	71,39
Kepulauan Riau	46,51	42,41	39,76	70,84
DKI Jakarta	85,02	83,52	51,69	91,76
Jawa Barat	83,46	77,32	41,01	84,35
Jawa Tengah	59,43	53,57	26,45	72,49
DI Yogyakarta	83,33	70,78	44,52	75,11
Jawa Timur	60,82	52,56	33,99	73,72
Banten	76,14	58,41	32,04	67,31
Bali	52,23	62,15	13,55	69,69
Nusa Tenggara Barat	72,39	59,33	28,40	52,32
Nusa Tenggara Timur	23,61	26,24	19,02	22,81
Kalimantan Barat	25,98	23,14	20,53	45,14
Kalimantan Tengah	63,16	46,78	29,76	65,97
Kalimantan Selatan	58,12	31,87	18,33	55,98
Kalimantan Timur	73,88	64,72	34,21	77,58
Kalimantan Utara	36,95	27,97	15,24	52,19
Sulawesi Utara	59,37	63,51	33,28	82,63
Sulawesi Tengah	55,64	56,85	30,82	65,26
Sulawesi Selatan	64,06	41,45	26,14	43,63
Sulawesi Tenggara	45,77	35,30	17,74	38,95
Gorontalo	34,38	54,48	34,51	65,63
Sulawesi Barat	52,78	35,03	26,70	39,81
Maluku	16,82	18,38	17,28	43,20
Maluku Utara	13,29	16,47	15,30	37,63
Papua Barat	8,42	9,25	9,13	13,59
Papua	3,84	4,54	6,86	4,58
INDONESIA	50,63	43,35	23,48	58,84

Sumber: Podes 2014



Tabel 2.4.7 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan Menurut Provinsi, 2018

Provinsi	Jenis Upaya untuk Menjaga Keamanan			
	Membangun Poskamling	Membentuk Regu Kamling	Menambah Anggota Hansip	Pelaporan Tamu Menginap (1x24 jam)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	35,79	21,57	9,43	78,10
Sumatera Utara	31,03	22,77	9,69	41,03
Sumatera Barat	76,16	56,71	27,53	75,45
Riau	63,79	52,53	22,19	68,91
Jambi	71,19	47,95	27,27	65,88
Sumatera Selatan	68,76	61,40	28,11	67,47
Bengkulu	69,42	58,65	21,33	71,93
Lampung	82,82	78,03	32,52	79,65
Kep. Bangka Belitung	62,66	53,45	32,74	77,75
Kepulauan Riau	46,63	43,51	25,96	74,28
DKI Jakarta	71,16	74,53	46,82	90,64
Jawa Barat	90,80	79,05	39,87	86,18
Jawa Tengah	70,09	60,05	29,34	75,21
DI Yogyakarta	89,50	79,22	50,68	85,84
Jawa Timur	74,40	61,73	36,32	77,85
Banten	82,47	66,69	38,79	81,06
Bali	55,17	53,07	17,18	77,65
Nusa Tenggara Barat	80,14	63,34	35,00	55,47
Nusa Tenggara Timur	32,36	37,10	25,86	29,20
Kalimantan Barat	45,06	39,21	24,38	56,53
Kalimantan Tengah	66,12	57,80	29,44	65,23
Kalimantan Selatan	61,90	39,79	21,17	61,75
Kalimantan Timur	71,68	57,23	25,72	71,48
Kalimantan Utara	50,00	36,72	20,95	59,34
Sulawesi Utara	63,49	61,81	23,34	89,01
Sulawesi Tengah	57,82	57,18	25,64	66,68
Sulawesi Selatan	62,18	43,46	27,06	53,23
Sulawesi Tenggara	44,82	38,28	22,18	40,23
Gorontalo	34,60	38,28	34,74	68,12
Sulawesi Barat	55,08	35,38	25,85	48,31
Maluku	20,32	25,48	18,23	52,18
Maluku Utara	20,74	29,10	26,51	60,45
Papua Barat	12,63	14,85	9,31	12,03
Papua	7,94	11,65	10,72	11,37
INDONESIA	55,70	47,16	24,86	62,24

Sumber: Podes 2018

Tabel 2.4.8 Jumlah dan Persentase Desa/Kelurahan yang Ada Kejadian Perkelahian Massal dan Mampu Menyelesaikannya Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2011	2014	2018	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	2 797	2 819	2 329	10,13	43,29	35,79
Sumatera Utara	1 561	1 368	1 903	6,26	22,41	31,03
Sumatera Barat	624	813	971	12,39	71,00	76,16
Riau	842	1 083	1 196	22,05	59,02	63,79
Jambi	625	101	1 112	9,48	65,12	71,19
Sumatera Selatan	1 536	1 902	2 243	16,73	58,76	68,76
Bengkulu	667	1 118	1 051	15,31	72,98	69,42
Lampung	1 359	2 032	2 198	23,21	77,20	82,82
Kep. Bangka Belitung	142	210	245	15,79	55,12	62,66
Kepulauan Riau	141	193	194	28,90	46,51	46,63
DKI Jakarta	186	227	190	64,04	85,02	71,16
Jawa Barat	3 833	4 976	5 409	31,99	83,46	90,80
Jawa Tengah	2 574	5 098	5 999	15,12	59,43	70,09
DI Yogyakarta	272	365	392	26,03	83,33	89,50
Jawa Timur	3 119	5 171	6 321	17,05	60,82	74,40
Banten	977	1 181	1 280	24,76	76,14	82,47
Bali	189	374	395	11,73	52,23	55,17
Nusa Tenggara Barat	605	826	916	11,90	72,39	80,14
Nusa Tenggara Timur	955	772	1 085	18,37	23,61	32,36
Kalimantan Barat	470	548	963	9,91	25,98	45,06
Kalimantan Tengah	775	991	1 042	15,12	63,16	66,12
Kalimantan Selatan	664	1 167	1 243	7,55	58,12	61,90
Kalimantan Timur	738	758	744	20,48	73,88	71,68
Kalimantan Utara*	-	177	241	-	36,95	50,00
Sulawesi Utara	803	109	1 167	47,43	59,37	63,49
Sulawesi Tengah	780	1 105	1 168	42,98	55,64	57,82
Sulawesi Selatan	1 685	1 941	1 896	56,51	64,06	62,18
Sulawesi Tenggara	978	104	1 055	46,11	45,77	44,82
Gorontalo	181	253	254	24,76	34,38	34,60
Sulawesi Barat	358	342	358	56,11	52,78	55,08
Maluku	185	183	252	18,07	16,82	20,32
Maluku Utara	175	159	248	16,22	13,29	20,74
Papua Barat	99	132	251	6,88	8,42	12,63
Papua	250	187	441	6,37	3,84	7,94
INDONESIA	31 145	41 611	46 752	39,62	50,63	55,70

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018



Tabel 2.4.9 Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Membentuk Regu Keamanan Lingkungan Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2011	2014	2018	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	2 154	2 819	1 404	33,23	29,59	21,57
Sumatera Utara	1 785	1 368	1 396	30,79	17,30	22,77
Sumatera Barat	491	813	723	47,53	49,17	56,71
Riau	784	1 083	985	47,37	49,86	52,53
Jambi	469	101	749	34,18	48,36	47,95
Sumatera Selatan	1 478	1 902	2 003	46,39	50,54	61,40
Bengkulu	663	1 118	888	43,94	66,51	58,65
Lampung	1 591	2 032	2 071	64,57	73,44	78,03
Kep. Bangka Belitung	170	210	209	47,09	41,21	53,45
Kepulauan Riau	181	193	181	51,27	42,41	43,51
DKI Jakarta	232	227	199	86,89	83,52	74,53
Jawa Barat	3 829	4 976	4 709	64,84	77,32	79,05
Jawa Tengah	3 395	5 098	5 140	39,58	53,57	60,05
DI Yogyakarta	257	365	347	58,68	70,78	79,22
Jawa Timur	3 602	5 171	5 245	42,37	52,56	61,73
Banten	971	1 181	1 035	63,26	58,41	66,69
Bali	164	374	380	22,91	62,15	53,07
Nusa Tenggara Barat	587	826	724	54,15	59,33	63,34
Nusa Tenggara Timur	916	772	1 244	30,88	26,24	37,10
Kalimantan Barat	503	548	838	25,57	23,14	39,21
Kalimantan Tengah	545	991	911	35,67	46,78	57,80
Kalimantan Selatan	419	1 167	799	20,95	31,87	39,79
Kalimantan Timur	620	758	594	42,32	64,72	57,23
Kalimantan Utara*	-	177	177	-	27,97	36,72
Sulawesi Utara	857	109	1 136	50,62	63,51	61,81
Sulawesi Tengah	816	1 105	1 155	44,96	56,85	57,18
Sulawesi Selatan	1 353	1 941	1 325	45,37	41,45	43,46
Sulawesi Tenggara	923	104	901	43,52	35,30	38,28
Gorontalo	288	253	281	39,40	54,48	38,28
Sulawesi Barat	271	342	230	42,48	35,03	35,38
Maluku	259	183	316	25,29	18,38	25,48
Maluku Utara	217	159	348	20,11	16,47	29,10
Papua Barat	146	132	295	10,15	9,25	14,85
Papua	352	187	647	8,97	4,54	11,65
INDONESIA	31 288	41 611	39 585	39,80	43,35	47,16

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018

Tabel 2.4.10 Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Menambah Anggota Hansip/Linmas Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2011	2014	2018	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	657	656	656	10,13	10,07	9,43
Sumatera Utara	363	324	324	6,26	5,31	9,69
Sumatera Barat	128	236	236	12,39	20,61	27,53
Riau	365	357	357	22,05	19,46	22,19
Jambi	130	328	328	9,48	21,15	27,27
Sumatera Selatan	533	738	738	16,73	22,80	28,11
Bengkulu	231	402	402	15,31	26,24	21,33
Lampung	572	1 118	1 118	23,21	42,48	32,52
Kep. Bangka Belitung	57	113	113	15,79	29,66	32,74
Kepulauan Riau	102	165	165	28,90	39,76	25,96
DKI Jakarta	171	138	138	64,04	51,69	46,82
Jawa Barat	1 889	2 445	2 445	31,99	41,01	39,87
Jawa Tengah	1 297	2 269	2 269	15,12	26,45	29,34
DI Yogyakarta	114	195	195	26,03	44,52	50,68
Jawa Timur	145	289	289	17,05	33,99	36,32
Banten	380	497	497	24,76	32,04	38,79
Bali	84	97	97	11,73	13,55	17,18
Nusa Tenggara Barat	129	324	324	11,90	28,40	35,00
Nusa Tenggara Timur	545	622	622	18,37	19,02	25,86
Kalimantan Barat	195	433	433	9,91	20,53	24,38
Kalimantan Tengah	231	467	467	15,12	29,76	29,44
Kalimantan Selatan	151	368	368	7,55	18,33	21,17
Kalimantan Timur	300	351	351	20,48	34,21	25,72
Kalimantan Utara*	-	73	73	-	15,24	20,95
Sulawesi Utara	490	611	611	28,94	33,28	23,34
Sulawesi Tengah	394	612	612	21,71	30,82	25,64
Sulawesi Selatan	440	792	792	14,76	26,14	27,06
Sulawesi Tenggara	283	403	403	13,34	17,74	22,18
Gorontalo	168	254	254	22,98	34,51	34,74
Sulawesi Barat	86	173	173	13,48	26,70	25,85
Maluku	110	188	188	10,74	17,28	18,23
Maluku Utara	161	183	183	14,92	15,30	26,51
Papua Barat	104	143	143	7,23	9,13	9,31
Papua	310	334	334	7,90	6,86	10,72
INDONESIA	1 262	19 299	19 299	16,05	23,48	24,86

Catatan: Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018



Tabel 2.4.11

Jumlah dan Persentase Desa yang Ada Upaya Warganya untuk Menjaga Keamanan dengan Memeriksa Setiap Warga Luar Desa yang Masuk (Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan*) Menurut Provinsi, 2011, 2014, dan 2018

Provinsi	Jumlah			Persentase		
	2011	2014	2018	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	3 587	5 375	5 083	55,33	82,54	78,10
Sumatera Utara	1 907	2 248	2 516	32,90	36,83	41,03
Sumatera Barat	527	770	962	51,02	67,25	75,45
Riau	814	1 118	1 292	49,18	60,93	68,91
Jambi	486	1 002	1 029	35,42	64,60	65,88
Sumatera Selatan	1 426	2 044	2 201	44,76	63,14	67,47
Bengkulu	623	1 003	1 089	41,29	65,47	71,93
Lampung	1 263	1 982	2 114	51,26	75,30	79,65
Kep. Bangka Belitung	154	272	304	42,66	71,39	77,75
Kepulauan Riau	182	294	309	51,56	70,84	74,28
DKI Jakarta	181	245	242	67,79	91,76	90,64
Jawa Barat	4 041	5 029	5 134	68,43	84,35	86,18
Jawa Tengah	4 467	6 218	6 437	52,08	72,49	75,21
DI Yogyakarta	167	329	376	38,13	75,11	85,84
Jawa Timur	4 611	6 268	6 614	54,23	73,72	77,85
Banten	880	1 044	1 258	57,33	67,31	81,06
Bali	484	499	556	67,60	69,69	77,65
Nusa Tenggara Barat	415	597	634	38,28	52,32	55,47
Nusa Tenggara Timur	858	746	979	28,93	22,81	29,20
Kalimantan Barat	623	952	1 208	31,67	45,14	56,53
Kalimantan Tengah	564	1 035	1 028	36,91	65,97	65,23
Kalimantan Selatan	537	1 124	1 240	26,85	55,98	61,75
Kalimantan Timur	525	796	742	35,84	77,58	71,48
Kalimantan Utara*	-	250	286	-	52,19	59,34
Sulawesi Utara	129	1 517	1 636	76,20	82,63	89,01
Sulawesi Tengah	806	1 296	1 347	44,41	65,26	66,68
Sulawesi Selatan	1 303	1 322	1 623	43,70	43,63	53,23
Sulawesi Tenggara	790	885	947	37,25	38,95	40,23
Gorontalo	328	483	500	44,87	65,63	68,12
Sulawesi Barat	193	258	314	30,25	39,81	48,31
Maluku	268	470	647	26,17	43,20	52,18
Maluku Utara	250	450	723	23,17	37,63	60,45
Papua Barat	121	213	239	8,41	13,59	12,03
Papua	311	223	631	7,93	4,58	11,37
INDONESIA	34 982	48 357	52 240	44,50	58,84	62,24

Catatan: Pada Podes 2014 pertanyaan Memeriksa Setiap Orang Asing diubah menjadi Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan

Sumber: Podes 2011, 2014, dan 2018

Tabel 2.4.12 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	355	6 157	1 118	4 353	582	104
Sumatera Utara	432	5 672	786	3 485	1 114	287
Sumatera Barat	210	935	201	650	66	18
Riau	380	1 455	295	891	243	26
Jambi	202	1 349	287	894	145	23
Sumatera Selatan	313	2 924	393	2 162	329	40
Bengkulu	105	1 427	290	940	175	22
Lampung	269	2 363	386	1 649	282	46
Kep. Bangka Belitung	69	312	103	198	10	1
Kepulauan Riau	101	314	77	168	55	14
DKI Jakarta	182	85	42	43	-	-
Jawa Barat	813	5 149	1 163	3 583	365	38
Jawa Tengah	755	7 823	1 949	5 641	213	20
DI Yogyakarta	117	321	125	196	-	-
Jawa Timur	949	7 553	2 472	4 835	220	26
Banten	201	135	295	887	150	18
Bali	144	572	230	342	-	-
Nusa Tenggara Barat	156	985	294	596	72	23
Nusa Tenggara Timur	310	296	350	1 487	900	223
Kalimantan Barat	294	1 815	176	884	577	178
Kalimantan Tengah	187	1 382	115	692	457	118
Kalimantan Selatan	217	1 791	350	1 193	210	38
Kalimantan Timur	180	846	153	387	239	67
Kalimantan Utara	61	418	44	164	139	71
Sulawesi Utara	168	1 668	463	1 007	165	33
Sulawesi Tengah	277	1 709	350	975	275	109
Sulawesi Selatan	360	267	632	1 566	361	111
Sulawesi Tenggara	167	2 105	404	1 298	324	79
Gorontalo	59	677	226	365	68	18
Sulawesi Barat	59	589	94	266	163	66
Maluku	125	963	118	392	328	125
Maluku Utara	107	1 089	212	481	292	104
Papua Barat	108	1 459	127	416	648	268
Papua	280	4 591	247	966	1 602	1 776
INDONESIA	8 712	73 478	14 567	44 052	10 769	409

Sumber: Podes 2014



Tabel 2.4.13 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2018

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	353	6 155	940	4 769	399	47
Sumatera Utara	481	5 651	621	3 629	1 215	186
Sumatera Barat	226	1 049	259	729	53	8
Riau	550	1 325	232	888	190	15
Jambi	207	1 355	270	906	159	20
Sumatera Selatan	381	2 881	320	2 135	391	35
Bengkulu	130	1 384	299	918	151	16
Lampung	280	2 374	402	1 698	244	30
Kep. Bangka Belitung	91	300	112	183	5	-
Kepulauan Riau	113	303	49	182	63	9
DKI Jakarta	222	45	30	15	-	-
Jawa Barat	910	5 047	1 085	3 666	294	2
Jawa Tengah	930	7 629	1 994	5 511	120	4
DI Yogyakarta	114	324	105	219	-	-
Jawa Timur	1 127	7 369	2 250	4 941	168	10
Banten	209	1 343	258	939	135	11
Bali	140	576	236	340	-	-
Nusa Tenggara Barat	176	967	241	659	53	14
Nusa Tenggara Timur	327	3 026	250	1 734	949	93
Kalimantan Barat	283	1 854	189	906	600	159
Kalimantan Tengah	201	1 375	121	748	421	85
Kalimantan Selatan	235	1 773	388	1 206	145	34
Kalimantan Timur	203	835	134	432	253	16
Kalimantan Utara	66	416	47	155	124	90
Sulawesi Utara	174	1 664	445	1 082	126	11
Sulawesi Tengah	293	1 727	316	1 087	265	59
Sulawesi Selatan	381	2 668	660	1 628	319	61
Sulawesi Tenggara	205	2 149	391	1 406	315	37
Gorontalo	77	657	183	381	88	5
Sulawesi Barat	62	588	86	299	152	51
Maluku	135	1 105	115	493	350	147
Maluku Utara	121	1 075	161	549	298	67
Papua Barat	113	1 874	127	619	752	376
Papua	243	5 309	205	1 323	1 960	1 821
INDONESIA	9 759	74 172	13 521	46 375	10 757	3 519

Sumber: Podes 2018

Tabel 2.4.14 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2014

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	5,45	94,55	17,17	66,85	8,94	1,60
Sumatera Utara	7,08	92,92	12,88	57,09	18,25	4,70
Sumatera Barat	18,34	81,66	17,55	56,77	5,76	1,57
Riau	20,71	79,29	16,08	48,56	13,24	1,42
Jambi	13,02	86,98	18,50	57,64	9,35	1,48
Sumatera Selatan	9,67	90,33	12,14	66,79	10,16	1,24
Bengkulu	6,85	93,15	18,93	61,36	11,42	1,44
Lampung	10,22	89,78	14,67	62,65	10,71	1,75
Kep. Bangka Belitung	18,11	81,89	27,03	51,97	2,62	0,26
Kepulauan Riau	24,34	75,66	18,55	40,48	13,25	3,37
DKI Jakarta	68,16	31,84	15,73	16,10	-	-
Jawa Barat	13,64	86,36	19,51	60,10	6,12	0,64
Jawa Tengah	8,80	91,20	22,72	65,76	2,48	0,23
DI Yogyakarta	26,71	73,29	28,54	44,75	-	-
Jawa Timur	11,16	88,84	29,08	56,87	2,59	0,31
Banten	12,96	87,04	19,02	57,19	9,67	1,16
Bali	20,11	79,89	32,12	47,77	-	-
Nusa Tenggara Barat	13,67	86,33	25,77	52,23	6,31	2,02
Nusa Tenggara Timur	9,48	90,52	10,70	45,47	27,52	6,82
Kalimantan Barat	13,94	86,06	8,35	41,92	27,36	8,44
Kalimantan Tengah	11,92	88,08	7,33	44,10	29,13	7,52
Kalimantan Selatan	10,81	89,19	17,43	59,41	10,46	1,89
Kalimantan Timur	17,54	82,46	14,91	37,72	23,29	6,53
Kalimantan Utara	12,73	87,27	9,19	34,24	29,02	14,82
Sulawesi Utara	9,15	90,85	25,22	54,85	8,99	1,80
Sulawesi Tengah	13,95	86,05	17,62	49,09	13,85	5,49
Sulawesi Selatan	11,88	88,12	20,86	51,68	11,91	3,66
Sulawesi Tenggara	7,35	92,65	17,78	57,13	14,26	3,48
Gorontalo	8,02	91,98	30,71	49,59	9,24	2,45
Sulawesi Barat	9,10	90,90	14,51	41,05	25,15	10,19
Maluku	11,49	88,51	10,85	36,03	30,15	11,49
Maluku Utara	8,95	91,05	17,73	40,22	24,41	8,70
Papua Barat	6,89	93,11	8,10	26,55	41,35	17,10
Papua	5,75	94,25	5,07	19,83	32,89	36,46
INDONESIA	10,60	89,40	17,72	53,60	13,10	4,98

Sumber: Podes 2014



Tabel 2.4.15 Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Menurut Provinsi, 2018

Provinsi	Keberadaan Pos Polisi		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kel yang Tidak ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	5,42	94,58	15,27	77,48	6,48	0,76
Sumatera Utara	7,84	92,16	10,99	64,22	21,50	3,29
Sumatera Barat	17,73	82,27	24,69	69,49	5,05	0,76
Riau	29,33	70,67	17,51	67,02	14,34	1,13
Jambi	13,25	86,75	19,93	66,86	11,73	1,48
Sumatera Selatan	11,68	88,32	11,11	74,11	13,57	1,21
Bengkulu	8,59	91,41	21,60	66,33	10,91	1,16
Lampung	10,55	89,45	16,93	71,52	10,28	1,26
Kep. Bangka Belitung	23,27	76,73	37,33	61,00	1,67	0,00
Kepulauan Riau	27,16	72,84	16,17	60,07	20,79	2,97
DKI Jakarta	83,15	16,85	66,67	33,33	0,00	0,00
Jawa Barat	15,28	84,72	21,50	72,64	5,83	0,04
Jawa Tengah	10,87	89,13	26,14	72,24	1,57	0,05
DI Yogyakarta	26,03	73,97	32,41	67,59	0,00	0,00
Jawa Timur	13,27	86,73	30,53	67,05	2,28	0,14
Banten	13,47	86,53	19,21	69,92	10,05	0,82
Bali	19,55	80,45	40,97	59,03	0,00	0,00
Nusa Tenggara Barat	15,40	84,60	24,92	68,15	5,48	1,45
Nusa Tenggara Timur	9,75	90,25	8,26	57,30	31,36	3,07
Kalimantan Barat	13,24	86,76	10,19	48,87	32,36	8,58
Kalimantan Tengah	12,75	87,25	8,80	54,40	30,62	6,18
Kalimantan Selatan	11,70	88,30	21,88	68,02	8,18	1,92
Kalimantan Timur	19,56	80,44	16,05	51,74	30,30	1,92
Kalimantan Utara	13,69	86,31	11,30	37,26	29,81	21,63
Sulawesi Utara	9,47	90,53	26,74	65,02	7,57	0,66
Sulawesi Tengah	14,50	85,50	18,30	62,94	15,34	3,42
Sulawesi Selatan	12,50	87,50	24,74	61,02	11,96	2,29
Sulawesi Tenggara	8,71	91,29	18,19	65,43	14,66	1,72
Gorontalo	10,49	89,51	27,85	57,99	13,39	0,76
Sulawesi Barat	9,54	90,46	14,63	50,85	25,85	8,67
Maluku	10,89	89,11	10,41	44,62	31,67	13,30
Maluku Utara	10,12	89,88	14,98	51,07	27,72	6,23
Papua Barat	5,69	94,31	6,78	33,03	40,13	20,06
Papua	4,38	95,62	3,86	24,92	36,92	34,30
INDONESIA	11,63	88,37	18,23	62,52	14,50	4,74

Sumber: Podes 2018



DATA SURVEI SOSIAL EKONOMI NASIONAL



Tabel 3.1.1 Persentase Korban Kejahatan Berdasarkan Jenis Kejahatan yang di Alami, 2019-2020

Jenis Kejahatan	2019	2020
(1)	(2)	(3)
1. Pencurian	85,35	86,51
2. Penganiayaan	3,08	3,24
3. Pencurian dengan kekerasan	2,21	2,25
4. Pelecehan Seksual	1,25	1,24
5. Lainnya	12,28	12,64
6. Mengalami lebih dari 1 jenis kejahatan	4,17	5,88

Sumber: Diolah dari Susenas 2020 dan 2021

<https://www.bps.go.id>

Tabel 3.1.2 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2019-2020

Provinsi	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Aceh	0,71	0,61
Sumatera Utara	1,18	0,97
Sumatera Barat	0,98	0,97
Riau	1,24	0,73
Jambi	0,83	0,79
Sumatera Selatan	1,35	1,07
Bengkulu	1,42	0,95
Lampung	1,42	1,00
Kep. Bangka Belitung	0,66	0,72
Kepulauan Riau	1,02	1,44
DKI Jakarta	1,15	0,86
Jawa Barat	1,15	0,90
Jawa Tengah	0,80	0,57
DI Yogyakarta	1,35	0,79
Jawa Timur	0,82	0,66
Banten	0,80	0,46
Bali	0,42	0,23
Nusa Tenggara Barat	1,63	1,49
Nusa Tenggara Timur	0,84	0,73
Kalimantan Barat	0,63	0,69
Kalimantan Tengah	0,80	0,55
Kalimantan Selatan	0,84	0,59
Kalimantan Timur	1,19	0,60
Kalimantan Utara	1,53	1,36
Sulawesi Utara	0,78	0,63
Sulawesi Tengah	1,22	1,17
Sulawesi Selatan	0,96	0,73
Sulawesi Tenggara	0,95	0,90
Gorontalo	0,83	0,59
Sulawesi Barat	0,74	0,58
Maluku	1,19	1,09
Maluku Utara	1,16	1,06
Papua Barat	1,66	1,04
Papua	1,36	0,73
INDONESIA	1,01	0,78

Sumber: Diolah dari Susenas 2020 dan 2021

Tabel 3.1.3 Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin, 2019-2020

Provinsi	2019		2020	
	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	63,72	36,28	65,54	34,46
Sumatera Utara	63,66	36,34	61,10	38,90
Sumatera Barat	56,93	43,07	54,36	45,64
Riau	69,68	30,32	64,61	35,39
Jambi	62,16	37,84	66,52	33,48
Sumatera Selatan	63,75	36,25	78,91	21,09
Bengkulu	71,69	28,31	71,96	28,04
Lampung	69,36	30,64	71,25	28,75
Kep. Bangka Belitung	69,33	30,67	51,03	48,97
Kepulauan Riau	66,18	33,82	67,35	32,65
DKI Jakarta	66,70	33,30	63,18	36,82
Jawa Barat	64,97	35,03	64,25	35,75
Jawa Tengah	61,56	38,44	64,63	35,37
DI Yogyakarta	68,77	31,23	67,14	32,86
Jawa Timur	56,81	43,19	61,92	38,08
Banten	67,98	32,02	73,18	26,82
Bali	54,46	45,54	73,76	26,24
Nusa Tenggara Barat	62,50	37,50	57,14	42,86
Nusa Tenggara Timur	66,33	33,67	65,49	34,51
Kalimantan Barat	64,61	35,39	66,14	33,86
Kalimantan Tengah	63,98	36,02	66,85	33,15
Kalimantan Selatan	60,77	39,23	62,59	37,41
Kalimantan Timur	58,46	41,54	70,03	29,97
Kalimantan Utara	71,46	28,54	62,56	37,44
Sulawesi Utara	57,27	42,73	62,24	37,76
Sulawesi Tengah	72,24	27,76	70,87	29,13
Sulawesi Selatan	60,49	39,51	53,56	46,44
Sulawesi Tenggara	62,09	37,91	70,72	29,28
Gorontalo	60,56	39,44	42,25	57,75
Sulawesi Barat	66,36	33,64	62,32	37,68
Maluku	57,98	42,02	56,53	43,47
Maluku Utara	61,81	38,19	70,50	29,50
Papua Barat	62,69	37,31	71,92	28,08
Papua	64,69	35,31	63,08	36,92
INDONESIA	63,52	36,48	64,46	35,54

Keterangan: L=Laki-laki, P=Perempuan
Sumber: Diolah dari Susenas 2020 dan 2021

Tabel 3.1.4 Karakteristik Penduduk Korban Kejahatan Menurut Kelompok Umur, 2019-2020

Provinsi	2019		2020	
	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	7,47	92,53	8,51	91,49
Sumatera Utara	8,14	91,86	7,19	92,81
Sumatera Barat	7,85	92,15	10,11	89,89
Riau	5,48	94,52	4,41	95,59
Jambi	8,95	91,05	4,20	95,8
Sumatera Selatan	8,91	91,09	6,15	93,85
Bengkulu	3,69	96,31	6,79	93,21
Lampung	6,76	93,24	5,64	94,36
Kep. Bangka Belitung	2,93	97,07	5,87	94,13
Kepulauan Riau	5,87	94,13	15,39	84,61
DKI Jakarta	4,17	95,83	4,16	95,84
Jawa Barat	6,33	93,67	5,31	94,69
Jawa Tengah	5,56	94,44	4,45	95,55
DI Yogyakarta	1,72	98,28	0,57	99,43
Jawa Timur	7,97	92,03	5,53	94,47
Banten	10,82	89,18	3,51	96,49
Bali	5,24	94,76	2,25	97,75
Nusa Tenggara Barat	9,10	90,90	7,86	92,14
Nusa Tenggara Timur	3,11	96,89	3,12	96,88
Kalimantan Barat	11,96	88,04	2,92	97,08
Kalimantan Tengah	5,30	94,70	4,84	95,16
Kalimantan Selatan	8,31	91,69	5,08	94,92
Kalimantan Timur	4,21	95,79	2,12	97,88
Kalimantan Utara	1,82	98,18	3,44	96,56
Sulawesi Utara	11,05	88,95	6,15	93,85
Sulawesi Tengah	7,74	92,26	8,29	91,71
Sulawesi Selatan	5,35	94,65	5,40	94,60
Sulawesi Tenggara	4,89	95,11	5,41	94,59
Gorontalo	7,63	92,37	7,06	92,94
Sulawesi Barat	6,71	93,29	4,21	95,79
Maluku	8,58	91,42	7,72	92,28
Maluku Utara	10,82	89,18	4,22	95,78
Papua Barat	7,73	92,27	5,24	94,76
Papua	9,70	90,30	11,60	88,40
INDONESIA	6,86	93,14	5,68	94,32

Sumber: Diolah dari Susenas 2020 dan 2021



Tabel 3.1.5 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2019-2020

Provinsi	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Aceh	89,48	88,66
Sumatera Utara	91,05	93,67
Sumatera Barat	90,27	89,11
Riau	86,43	91,92
Jambi	88,14	81,23
Sumatera Selatan	89,08	91,32
Bengkulu	91,11	96,71
Lampung	89,92	87,9
Kep. Bangka Belitung	92,07	80,63
Kepulauan Riau	93,93	94,03
DKI Jakarta	79,88	88,65
Jawa Barat	86,64	86,91
Jawa Tengah	80,01	81,06
DI Yogyakarta	69,03	69,82
Jawa Timur	76,81	79,99
Banten	87,20	87,44
Bali	90,98	90,17
Nusa Tenggara Barat	91,81	88,42
Nusa Tenggara Timur	84,66	87,71
Kalimantan Barat	81,80	85,70
Kalimantan Tengah	86,38	84,56
Kalimantan Selatan	86,35	86,46
Kalimantan Timur	84,46	87,57
Kalimantan Utara	94,50	95,98
Sulawesi Utara	87,83	88,94
Sulawesi Tengah	89,79	94,11
Sulawesi Selatan	91,40	87,72
Sulawesi Tenggara	92,26	89,78
Gorontalo	95,44	85,76
Sulawesi Barat	91,62	82,91
Maluku	90,80	80,71
Maluku Utara	87,80	94,20
Papua Barat	78,96	65,31
Papua	87,79	89,77
INDONESIA	85,35	86,51

Sumber: Diolah dari Susenas 2020 dan 2021

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

Tabel 3.1.6 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Penganiayaan Menurut Provinsi, 2019-2020

Provinsi	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Aceh	3,59	4,20
Sumatera Utara	0,72	2,76
Sumatera Barat	5,08	2,00
Riau	1,24	3,76
Jambi	1,39	1,92
Sumatera Selatan	3,63	2,37
Bengkulu	5,48	1,08
Lampung	2,55	2,87
Kep. Bangka Belitung	1,50	1,53
Kepulauan Riau	2,04	3,00
DKI Jakarta	3,72	7,08
Jawa Barat	2,83	2,41
Jawa Tengah	2,61	3,31
DI Yogyakarta	2,81	4,79
Jawa Timur	3,73	2,58
Banten	2,90	4,25
Bali	2,19	3,68
Nusa Tenggara Barat	2,90	1,33
Nusa Tenggara Timur	6,05	9,17
Kalimantan Barat	1,37	1,28
Kalimantan Tengah	3,83	5,12
Kalimantan Selatan	2,52	-
Kalimantan Timur	3,12	1,67
Kalimantan Utara	0,44	3,24
Sulawesi Utara	6,72	5,76
Sulawesi Tengah	4,80	4,79
Sulawesi Selatan	2,59	1,57
Sulawesi Tenggara	3,70	4,88
Gorontalo	3,94	2,39
Sulawesi Barat	0,66	4,75
Maluku	4,04	13,17
Maluku Utara	7,40	1,39
Papua Barat	9,03	14,66
Papua	7,17	7,91
INDONESIA	3,08	3,24

Sumber: Diolah dari Susenas 2020 dan 2021

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk



Tabel 3.1.7 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Menurut Provinsi, 2019-2020

Provinsi	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Aceh	1,98	2,21
Sumatera Utara	1,90	1,16
Sumatera Barat	2,55	0,77
Riau	0,90	2,92
Jambi	5,66	3,03
Sumatera Selatan	4,27	3,34
Bengkulu	2,41	0,33
Lampung	4,17	3,15
Kep. Bangka Belitung	0,36	-
Kepulauan Riau	2,17	2,28
DKI Jakarta	4,25	4,65
Jawa Barat	2,47	2,38
Jawa Tengah	1,53	1,42
DI Yogyakarta	0,94	2,40
Jawa Timur	1,84	1,83
Banten	1,48	5,39
Bali	0,32	0,30
Nusa Tenggara Barat	1,74	0,78
Nusa Tenggara Timur	0,87	1,25
Kalimantan Barat	2,85	1,85
Kalimantan Tengah	3,18	0,99
Kalimantan Selatan	0,80	1,08
Kalimantan Timur	1,95	1,00
Kalimantan Utara	0,67	1,05
Sulawesi Utara	0,85	0,45
Sulawesi Tengah	0,83	1,21
Sulawesi Selatan	1,35	4,08
Sulawesi Tenggara	0,25	0,99
Gorontalo	-	-
Sulawesi Barat	-	-
Maluku	2,37	0,60
Maluku Utara	-	1,78
Papua Barat	7,03	7,10
Papua	2,56	7,71
INDONESIA	2,21	2,25

Sumber: Diolah dari Susenas 2020 dan 2021

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

Tabel 3.1.8 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Pelecehan Seksual dengan Kekerasan Menurut Provinsi, 2019-2020

Provinsi	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Aceh	0,99	1,58
Sumatera Utara	0,43	0,15
Sumatera Barat	0,59	0,48
Riau	0,61	-
Jambi	1,45	0,74
Sumatera Selatan	0,57	1,11
Bengkulu	1,87	-
Lampung	0,54	0,23
Kep. Bangka Belitung	2,23	-
Kepulauan Riau	-	0,02
DKI Jakarta	1,64	2,68
Jawa Barat	0,91	1,88
Jawa Tengah	0,81	0,74
DI Yogyakarta	3,10	0,40
Jawa Timur	3,84	1,20
Banten	1,08	3,91
Bali	2,65	-
Nusa Tenggara Barat	0,57	0,74
Nusa Tenggara Timur	1,82	1,40
Kalimantan Barat	0,35	0,29
Kalimantan Tengah	3,47	1,88
Kalimantan Selatan	1,03	-
Kalimantan Timur	0,70	0,45
Kalimantan Utara	-	2,86
Sulawesi Utara	0,84	0,29
Sulawesi Tengah	0,61	1,30
Sulawesi Selatan	0,52	0,48
Sulawesi Tenggara	0,27	2,01
Gorontalo	0,66	4,59
Sulawesi Barat	-	1,54
Maluku	0,04	2,95
Maluku Utara	1,44	-
Papua Barat	1,22	2,44
Papua	0,45	4,44
INDONESIA	1,25	1,24

Sumber: Diolah dari Susenas 2020 dan 2021

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk



Tabel 3.1.9 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Lainnya Menurut Provinsi, 2019-2020

Provinsi	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Aceh	7,07	6,13
Sumatera Utara	7,39	3,84
Sumatera Barat	6,50	11,62
Riau	12,38	4,85
Jambi	7,30	17,11
Sumatera Selatan	4,30	7,11
Bengkulu	11,18	4,26
Lampung	7,13	10,34
Kep. Bangka Belitung	6,58	18,19
Kepulauan Riau	10,24	8,92
DKI Jakarta	14,95	14,31
Jawa Barat	12,93	15,76
Jawa Tengah	16,74	15,40
DI Yogyakarta	27,20	23,10
Jawa Timur	19,13	19,05
Banten	10,27	18,06
Bali	7,93	6,46
Nusa Tenggara Barat	8,35	10,02
Nusa Tenggara Timur	8,19	5,39
Kalimantan Barat	16,78	15,56
Kalimantan Tengah	11,42	10,55
Kalimantan Selatan	15,87	16,02
Kalimantan Timur	16,19	10,32
Kalimantan Utara	5,44	2,67
Sulawesi Utara	12,95	7,46
Sulawesi Tengah	5,38	3,47
Sulawesi Selatan	8,31	10,01
Sulawesi Tenggara	6,18	5,14
Gorontalo	5,71	7,26
Sulawesi Barat	11,58	10,80
Maluku	3,88	6,14
Maluku Utara	10,02	4,66
Papua Barat	6,65	16,04
Papua	7,88	7,60
INDONESIA	12,28	12,64

Sumber: Diolah dari Susenas 2020 dan 2021

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

Tabel 3.1.10 Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melaporkan ke Polisi Menurut Provinsi, 2019-2020

Provinsi	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Aceh	17,27	13,29
Sumatera Utara	19,56	19,77
Sumatera Barat	23,15	25,99
Riau	15,15	27,61
Jambi	24,38	16,40
Sumatera Selatan	25,41	29,65
Bengkulu	20,39	17,58
Lampung	24,49	18,84
Kep. Bangka Belitung	18,99	14,46
Kepulauan Riau	26,30	32,16
DKI Jakarta	31,00	31,22
Jawa Barat	28,41	24,86
Jawa Tengah	16,76	21,67
DI Yogyakarta	16,85	21,47
Jawa Timur	20,53	25,16
Banten	22,07	31,95
Bali	10,06	16,23
Nusa Tenggara Barat	10,98	12,40
Nusa Tenggara Timur	15,63	15,89
Kalimantan Barat	22,94	19,14
Kalimantan Tengah	20,01	19,35
Kalimantan Selatan	13,57	24,03
Kalimantan Timur	18,10	26,81
Kalimantan Utara	10,38	14,15
Sulawesi Utara	27,36	28,83
Sulawesi Tengah	22,93	22,26
Sulawesi Selatan	24,94	24,89
Sulawesi Tenggara	25,15	23,68
Gorontalo	12,41	31,06
Sulawesi Barat	22,17	12,94
Maluku	19,09	22,57
Maluku Utara	15,70	16,76
Papua Barat	37,43	37,22
Papua	19,71	19,52
INDONESIA	22,19	23,46

Sumber: Diolah dari Susenas 2020 dan 2021

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk



Tabel 3.1.11 Persentase Penduduk yang Pernah Melapor dan Mendapatkan/
Ditemani Bantuan Hukum Menurut Provinsi, 2019-2020

Provinsi	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Aceh	42,99	49,54
Sumatera Utara	26,49	22,28
Sumatera Barat	24,17	14,92
Riau	27,92	10,22
Jambi	25,49	9,53
Sumatera Selatan	14,89	18,14
Bengkulu	13,84	10,49
Lampung	24,26	21,88
Kep. Bangka Belitung	44,43	51,53
Kepulauan Riau	1,85	10,13
DKI Jakarta	11,93	10,15
Jawa Barat	18,56	25,49
Jawa Tengah	16,03	24,56
DI Yogyakarta	13,44	20,48
Jawa Timur	20,54	22,05
Banten	27,96	32,84
Bali	29,46	49,45
Nusa Tenggara Barat	24,82	18,50
Nusa Tenggara Timur	28,26	19,43
Kalimantan Barat	28,35	35,95
Kalimantan Tengah	22,71	35,93
Kalimantan Selatan	31,42	11,55
Kalimantan Timur	25,37	32,08
Kalimantan Utara	31,52	27,92
Sulawesi Utara	24,29	18,46
Sulawesi Tengah	31,78	31,43
Sulawesi Selatan	36,69	25,43
Sulawesi Tenggara	16,98	15,46
Gorontalo	54,74	20,07
Sulawesi Barat	56,56	43,04
Maluku	26,46	22,98
Maluku Utara	35,51	27,70
Papua Barat	14,84	27,69
Papua	27,42	27,26
INDONESIA	21,46	22,46

Sumber: Diolah dari Susenas 2020 dan 2021

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk

Tabel 3.1.12 Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Melapor ke Polisi Menurut Jenis Kejahatan dan Provinsi, 2020

Provinsi	Pencurian	Penganiayaan	Pencurian dengan Kekerasan	Pelecehan Seksual	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	12,30	2,93	0,35	-	1,82
Sumatera Utara	16,92	0,55	0,54	0,25	1,78
Sumatera Barat	20,57	0,85	0,92	0,52	1,39
Riau	13,56	-	0,38	-	1,22
Jambi	18,09	0,44	1,88	-	4,24
Sumatera Selatan	21,34	1,72	1,85	0,22	1,04
Bengkulu	17,38	2,42	2,41	1,87	6,12
Lampung	19,10	1,31	2,91	0,54	2,63
Kep. Bangka Belitung	16,87	0,95	-	0,69	0,48
Kepulauan Riau	24,72	2,04	2,17	-	3,36
DKI Jakarta	28,30	0,02	1,40	0,01	2,77
Jawa Barat	24,44	0,81	2,01	0,37	3,42
Jawa Tengah	13,26	0,55	0,62	0,07	2,60
DI Yogyakarta	8,05	1,06	-	-	8,30
Jawa Timur	15,64	1,20	0,90	0,63	4,67
Banten	18,04	2,36	0,41	1,08	2,05
Bali	8,54	-	0,32	2,65	1,20
Nusa Tenggara Barat	8,29	1,07	0,40	-	1,22
Nusa Tenggara Timur	8,16	2,91	0,53	0,78	3,99
Kalimantan Barat	13,92	0,73	1,89	0,35	6,46
Kalimantan Tengah	17,06	2,45	1,86	2,98	1,99
Kalimantan Selatan	10,32	0,52	0,80	1,03	2,75
Kalimantan Timur	15,70	0,42	-	0,13	3,58
Kalimantan Utara	9,25	0,21	0,67	-	0,86
Sulawesi Utara	15,81	4,56	0,85	0,51	6,73
Sulawesi Tengah	18,30	2,87	0,28	0,34	1,33
Sulawesi Selatan	19,68	1,00	-	0,07	4,49
Sulawesi Tenggara	22,28	1,94	0,20	0,22	0,85
Gorontalo	8,79	0,61	-	0,66	3,21
Sulawesi Barat	19,78	-	-	-	4,92
Maluku	13,49	3,10	0,39	0,04	2,29
Maluku Utara	10,21	3,59	-	1,14	1,39
Papua Barat	24,03	6,53	3,52	0,07	3,78
Papua	14,64	2,63	0,50	0,09	2,77
INDONESIA	18,05	1,14	1,13	0,38	3,06

Sumber: Diolah dari Susenas 2020 dan 2021

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk



<https://www.bps.go.id>





DATA MODUL KETAHANAN SOSIAL

<https://www.kps.go.id>



Tabel 4.1.1 Persentase Tingkat Kekhawatiran Rumah Tangga Berjalan Sendiri di Siang Hari Menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Khawatir	Tidak Khawatir	Tidak Relevan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	10,35	88,91	0,74
Sumatera Utara	11,69	87,86	0,45
Sumatera Barat	7,66	91,95	0,39
Riau	8,33	91,53	0,14
Jambi	6,26	93,15	0,59
Sumatera Selatan	5,13	94,69	0,18
Bengkulu	5,37	94,46	0,17
Lampung	6,03	93,85	0,12
Kep. Bangka Belitung	6,75	92,72	0,53
Kepulauan Riau	8,56	91,42	0,02
DKI Jakarta	22,61	76,24	1,15
Jawa Barat	16,52	83,37	0,11
Jawa Tengah	6,13	93,46	0,41
DI Yogyakarta	9,10	90,62	0,28
Jawa Timur	7,34	92,24	0,42
Banten	12,84	86,77	0,39
Bali	6,94	92,99	0,07
Nusa Tenggara Barat	7,08	92,72	0,20
Nusa Tenggara Timur	9,51	90,05	0,44
Kalimantan Barat	6,40	93,13	0,47
Kalimantan Tengah	7,35	91,56	1,09
Kalimantan Selatan	7,11	92,71	0,18
Kalimantan Timur	11,48	87,33	1,19
Kalimantan Utara	13,56	85,62	0,82
Sulawesi Utara	16,73	81,90	1,37
Sulawesi Tengah	20,45	79,34	0,21
Sulawesi Selatan	6,30	92,82	0,88
Sulawesi Tenggara	9,09	90,73	0,18
Gorontalo	10,35	89,65	-
Sulawesi Barat	8,00	91,76	0,24
Maluku	5,70	94,01	0,29
Maluku Utara	3,79	95,92	0,29
Papua Barat	9,27	90,57	0,16
Papua	9,74	89,65	0,61
INDONESIA	10,30	89,31	0,39

Sumber: Diolah dari Modul Ketahanan Sosial, 2020

Tabel 4.1.2 Persentase Tingkat Kekhawatiran Rumah Tangga Berjalan Sendiri di Malam Hari Menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Khawatir	Tidak Khawatir	Tidak Relevan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	38,79	60,64	0,57
Sumatera Utara	44,93	54,00	1,07
Sumatera Barat	41,01	56,80	2,19
Riau	34,69	63,21	2,10
Jambi	34,22	64,54	1,24
Sumatera Selatan	28,70	70,90	0,40
Bengkulu	31,50	67,41	1,09
Lampung	27,26	72,55	0,19
Kep. Bangka Belitung	32,04	67,21	0,75
Kepulauan Riau	27,25	72,73	0,02
DKI Jakarta	57,88	40,89	1,23
Jawa Barat	47,60	51,70	0,70
Jawa Tengah	24,86	73,90	1,24
DI Yogyakarta	23,67	74,33	2,00
Jawa Timur	33,96	65,32	0,72
Banten	44,45	54,65	0,90
Bali	18,60	81,02	0,38
Nusa Tenggara Barat	33,67	65,71	0,62
Nusa Tenggara Timur	35,19	64,39	0,42
Kalimantan Barat	27,47	70,27	2,26
Kalimantan Tengah	29,44	68,93	1,63
Kalimantan Selatan	32,96	65,64	1,40
Kalimantan Timur	38,70	59,58	1,72
Kalimantan Utara	34,39	64,39	1,22
Sulawesi Utara	39,69	58,00	2,31
Sulawesi Tengah	45,54	53,74	0,72
Sulawesi Selatan	34,69	63,73	1,58
Sulawesi Tenggara	29,90	69,92	0,18
Gorontalo	46,42	53,24	0,34
Sulawesi Barat	22,95	76,28	0,77
Maluku	34,47	64,85	0,68
Maluku Utara	28,66	70,57	0,77
Papua Barat	40,33	59,19	0,48
Papua	29,11	67,07	3,82
INDONESIA	36,72	62,27	1,01

Sumber: Diolah dari Modul Ketahanan Sosial, 2020



Tabel 4.1.3 Persentase Tingkat Kekhawatiran Rumah Tangga Berkendara (Sepeda, Sepeda motor, Mobil Sendirian di Malam Hari) Menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Khawatir	Tidak Khawatir	Tidak Relevan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	35,71	60,00	4,29
Sumatera Utara	45,55	49,65	4,80
Sumatera Barat	37,95	56,32	5,73
Riau	32,40	63,68	3,92
Jambi	32,53	62,81	4,66
Sumatera Selatan	32,29	62,96	4,75
Bengkulu	30,66	62,36	6,98
Lampung	29,48	68,81	1,71
Kep. Bangka Belitung	27,46	67,89	4,65
Kepulauan Riau	24,78	74,25	0,97
DKI Jakarta	60,55	32,69	6,76
Jawa Barat	48,74	45,65	5,61
Jawa Tengah	25,01	68,99	6,00
DI Yogyakarta	23,93	69,44	6,63
Jawa Timur	34,79	58,15	7,06
Banten	51,92	43,63	4,45
Bali	17,56	79,92	2,52
Nusa Tenggara Barat	33,83	55,58	10,59
Nusa Tenggara Timur	27,99	54,67	17,34
Kalimantan Barat	25,74	68,50	5,76
Kalimantan Tengah	29,33	65,99	4,68
Kalimantan Selatan	31,35	65,69	2,96
Kalimantan Timur	36,81	60,70	2,49
Kalimantan Utara	33,32	61,57	5,11
Sulawesi Utara	36,64	54,77	8,59
Sulawesi Tengah	44,44	51,38	4,18
Sulawesi Selatan	35,29	58,29	6,42
Sulawesi Tenggara	27,49	66,05	6,46
Gorontalo	39,85	47,15	13,00
Sulawesi Barat	22,32	70,95	6,73
Maluku	30,20	55,85	13,95
Maluku Utara	27,41	61,33	11,26
Papua Barat	34,82	55,21	9,97
Papua	27,81	44,07	28,12
INDONESIA	37,15	56,63	6,22

Sumber: Diolah dari Modul Ketahanan Sosial, 2020

Tabel 5.1.1 Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir, 2019-2020

Provinsi	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Aceh	0,05	0,05
Sumatera Utara	0,03	0,04
Sumatera Barat	0,06	0,03
Riau	0,03	0,05
Jambi	0,06	0,04
Sumatera Selatan	0,11	0,06
Bengkulu	0,09	0,01
Lampung	0,09	0,05
Kep. Bangka Belitung	0,03	0,01
Kepulauan Riau	0,03	0,08
DKI Jakarta	0,11	0,07
Jawa Barat	0,06	0,04
Jawa Tengah	0,04	0,03
DI Yogyakarta	0,09	0,06
Jawa Timur	0,07	0,03
Banten	0,04	0,03
Bali	0,02	0,01
Nusa Tenggara Barat	0,08	0,04
Nusa Tenggara Timur	0,07	0,08
Kalimantan Barat	0,03	0,02
Kalimantan Tengah	0,05	0,04
Kalimantan Selatan	0,03	0,01
Kalimantan Timur	0,06	0,02
Kalimantan Utara	0,02	0,07
Sulawesi Utara	0,06	0,04
Sulawesi Tengah	0,08	0,06
Sulawesi Selatan	0,03	0,04
Sulawesi Tenggara	0,04	0,07
Gorontalo	0,04	0,04
Sulawesi Barat	-	0,04
Maluku	0,08	0,17
Maluku Utara	0,10	0,03
Papua Barat	0,29	0,25
Papua	0,12	0,11
INDONESIA	0,06	0,04

Sumber: Diolah dari Susenas 2020 dan 2021

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk



Tabel 5.1.2 Proporsi Rumah Tangga yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya Menurut Provinsi, 2019-2020

Provinsi	Khawatir	Tidak Khawatir	Tidak Relevan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	38,91	60,79	0,30
Sumatera Utara	45,10	54,52	0,38
Sumatera Barat	41,45	58,19	0,36
Riau	35,04	64,82	0,14
Jambi	34,44	65,17	0,39
Sumatera Selatan	28,70	71,24	0,06
Bengkulu	31,84	68,03	0,13
Lampung	27,28	72,60	0,12
Kep. Bangka Belitung	32,37	67,10	0,53
Kepulauan Riau	27,24	72,74	0,02
DKI Jakarta	58,48	41,17	0,35
Jawa Barat	47,94	52,01	0,05
Jawa Tengah	24,95	74,66	0,39
DI Yogyakarta	24,24	75,60	0,16
Jawa Timur	34,15	65,57	0,28
Banten	44,49	55,38	0,13
Bali	18,68	81,32	-
Nusa Tenggara Barat	33,81	65,99	0,20
Nusa Tenggara Timur	35,39	64,36	0,25
Kalimantan Barat	27,50	72,18	0,32
Kalimantan Tengah	29,50	69,51	0,99
Kalimantan Selatan	33,22	66,60	0,18
Kalimantan Timur	39,19	60,04	0,77
Kalimantan Utara	35,19	64,07	0,74
Sulawesi Utara	40,06	58,86	1,08
Sulawesi Tengah	45,74	54,09	0,17
Sulawesi Selatan	34,83	64,60	0,57
Sulawesi Tenggara	29,90	69,92	0,18
Gorontalo	46,64	53,36	-
Sulawesi Barat	23,96	75,98	0,06
Maluku	34,54	65,17	0,29
Maluku Utara	29,15	70,56	0,29
Papua Barat	40,73	59,27	-
Papua	29,40	70,09	0,51
INDONESIA	36,94	62,80	0,26

Sumber: Diolah dari Modul Ketahanan Sosial, 2020

Tabel 5.1.3 Proporsi Korban Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir yang Melaporkan kepada Polisi, 2019-2020

Provinsi	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Aceh	49,99	36,53
Sumatera Utara	40,09	68,84
Sumatera Barat	34,76	66,70
Riau	13,62	42,41
Jambi	32,20	48,79
Sumatera Selatan	44,79	64,74
Bengkulu	49,28	-
Lampung	61,22	33,70
Kep. Bangka Belitung	40,36	-
Kepulauan Riau	100,00	43,68
DKI Jakarta	14,76	73,26
Jawa Barat	46,82	53,50
Jawa Tengah	25,10	36,02
DI Yogyakarta	15,46	45,01
Jawa Timur	23,02	45,31
Banten	65,38	67,55
Bali	57,57	57,55
Nusa Tenggara Barat	28,19	43,34
Nusa Tenggara Timur	46,00	52,12
Kalimantan Barat	65,08	81,07
Kalimantan Tengah	52,89	71,33
Kalimantan Selatan	49,25	100,00
Kalimantan Timur	10,56	48,67
Kalimantan Utara	78,66	72,69
Sulawesi Utara	78,31	80,49
Sulawesi Tengah	56,02	35,26
Sulawesi Selatan	32,00	48,93
Sulawesi Tenggara	56,42	65,84
Gorontalo	27,52	34,24
Sulawesi Barat	-	55,65
Maluku	54,75	50,63
Maluku Utara	53,53	87,65
Papua Barat	58,54	45,02
Papua	35,00	58,31
INDONESIA	37,50	52,43

Sumber: Diolah dari Susenas 2020 dan 2021

*) Persentase terhadap seluruh penduduk korban kejahatan, bukan terhadap total penduduk



<https://www.bps.go.id>





RELATIVE STANDARD ERROR



<https://www.bps.go.id>



Penghitungan *Sampling Error*

Secara teoritis, terdapat dua jenis kesalahan yang dapat terjadi dalam suatu survei, yaitu *non-sampling error* dan *sampling error*. *Non-sampling error* adalah kesalahan yang terjadi pada saat proses pengumpulan maupun pengolahan data. Misalnya, kesalahan dalam menginterpretasikan pertanyaan-pertanyaan di kuesioner maupun kesalahan dalam melakukan input data. Adapun *sampling error* adalah kesalahan yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan teknik *sampling* tertentu dalam suatu survei.

Pada publikasi ini, dilakukan penghitungan *sampling error* untuk indikator-indikator yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021. Secara statistik, besarnya *sampling error* hasil Susenas 2021 ditunjukkan oleh nilai galat baku (*standard error*) dari suatu ukuran statistik (rata-rata, persentase, atau jumlah). Untuk mengukur tingkat presisi dari indikator-indikator tersebut, dilakukan penghitungan nilai *Relative Standard Error* (RSE) yang merupakan perbandingan nilai *standard error* terhadap estimasi indikatornya yang dinyatakan dalam satuan persen.

Selain untuk menghitung nilai RSE, *standard error* juga digunakan untuk menghitung besaran selang kepercayaan (*confident interval*). Selang kepercayaan adalah interval nilai yang dapat memuat nilai populasi dari indikator yang diestimasi. Dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dapat disajikan selang kepercayaan dengan batas bawah sebesar nilai estimasi dikurangi dua *standard error* dan batas atas sebesar nilai estimasi ditambah dua *standard error*. Semakin rendah nilai RSE atau semakin pendek selang kepercayaan menunjukkan bahwa nilai indikator yang diestimasi tersebut semakin baik.

Menurut Aryago Mulia, dkk (2007), kualitas dari hasil estimasi suatu survei dapat diamati dari nilai RSE yang dihasilkan. Kesalahan *sampling* yang digunakan dari beberapa estimasi harus diterapkan dan digunakan secara hati-hati. Apabila jumlah kasus yang diobservasi kecil, hasil estimasi akan memiliki kesalahan relatif yang sangat besar. Secara umum, nilai *standard error* akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya besaran estimasi. Sebaliknya, RSE akan menurun apabila ukuran estimasi tersebut meningkat. Oleh karena itu, peningkatan ukuran estimasi menjadi salah satu alternatif untuk memperkecil nilai RSE sehingga nilai estimasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat.



Nilai estimasi indikator yang memiliki $RSE \leq 25$ persen dianggap akurat. Sementara itu, untuk nilai estimasi yang memiliki $RSE > 25$ persen tetapi ≤ 50 persen maka perlu kehati-hatian dalam menggunakan indikator tersebut. Estimasi dengan $RSE > 50$ persen dianggap sangat tidak akurat dan seharusnya digabungkan dengan estimasi yang lain untuk memberikan estimasi dengan $RSE \leq 25$ persen.

Penghitungan tingkat *sampling error* untuk indikator-indikator yang disajikan dalam publikasi Statistik Kriminal 2021 dilakukan menggunakan aplikasi STATA 14. Pada publikasi ini, tidak semua variabel hasil survei dihitung RSE-nya, melainkan hanya beberapa variabel terkait dan penting saja yang dihitung.

<https://www.bps.go.id>

Tabel 6.1.1 *Sampling Error* Persentase Penduduk Laki-laki yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,804	0,001	12,576
Sumatera Utara	1,180	0,001	7,078
Sumatera Barat	1,054	0,001	11,266
Riau	0,928	0,001	11,587
Jambi	1,038	0,001	12,281
Sumatera Selatan	1,663	0,001	7,699
Bengkulu	1,331	0,002	11,873
Lampung	1,393	0,001	8,373
Kep, Bangka Belitung	0,716	0,001	18,940
Kepulauan Riau	1,922	0,005	28,469
DKI Jakarta	1,098	0,001	11,442
Jawa Barat	1,136	0,001	6,424
Jawa Tengah	0,738	0,000	6,470
DI Yogyakarta	1,076	0,002	14,018
Jawa Timur	0,833	0,001	7,073
Banten	0,665	0,001	13,808
Bali	0,336	0,001	25,219
Nusa Tenggara Barat	1,735	0,002	9,776
Nusa Tenggara Timur	0,970	0,001	10,416
Kalimantan Barat	0,896	0,001	12,123
Kalimantan Tengah	0,706	0,001	16,307
Kalimantan Selatan	0,736	0,001	11,263
Kalimantan Timur	0,807	0,001	13,816
Kalimantan Utara	1,617	0,003	20,736
Sulawesi Utara	0,775	0,001	11,918
Sulawesi Tengah	1,638	0,002	10,584
Sulawesi Selatan	0,799	0,001	9,114
Sulawesi Tenggara	1,271	0,002	13,357
Gorontalo	0,497	0,001	25,742
Sulawesi Barat	0,724	0,001	18,098
Maluku	1,222	0,002	12,576
Maluku Utara	1,469	0,002	13,544
Papua Barat	1,432	0,002	15,304
Papua	0,872	0,001	10,036
INDONESIA	0,999	0,000	2,207



Tabel 6.1.1 *Sampling Error* Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2020 (lanjutan)

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
	Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	0,629	1,029	1,280	25 370
Sumatera Utara	1,027	1,355	1,449	41 921
Sumatera Barat	0,845	1,314	1,331	22 442
Riau	0,740	1,165	1,457	15 954
Jambi	0,816	1,320	1,171	12 726
Sumatera Selatan	1,430	1,933	1,438	20 871
Bengkulu	1,054	1,679	0,959	10 615
Lampung	1,182	1,641	1,429	19 163
Kep. Bangka Belitung	0,493	1,037	0,963	7 274
Kepulauan Riau	1,097	3,346	2,979	7 561
DKI Jakarta	0,877	1,374	1,901	9 873
Jawa Barat	1,002	1,289	2,379	44 266
Jawa Tengah	0,650	0,838	1,592	51 722
DI Yogyakarta	0,817	1,415	1,404	6 549
Jawa Timur	0,725	0,957	1,979	54 901
Banten	0,508	0,872	1,995	13 849
Bali	0,205	0,551	1,503	12 227
Nusa Tenggara Barat	1,432	2,100	1,436	11 925
Nusa Tenggara Timur	0,791	1,189	1,174	27 086
Kalimantan Barat	0,707	1,136	1,279	17 257
Kalimantan Tengah	0,512	0,971	1,117	14 357
Kalimantan Selatan	0,590	0,917	0,981	14 202
Kalimantan Timur	0,615	1,058	1,182	11 608
Kalimantan Utara	1,076	2,424	1,120	5 646
Sulawesi Utara	0,613	0,978	0,820	16 113
Sulawesi Tengah	1,331	2,015	1,176	15 154
Sulawesi Selatan	0,668	0,955	1,172	29 260
Sulawesi Tenggara	0,978	1,651	1,217	18 653
Gorontalo	0,300	0,823	0,965	6 704
Sulawesi Barat	0,507	1,031	0,887	7 237
Maluku	0,954	1,562	0,916	13 777
Maluku Utara	1,126	1,915	0,909	11 337
Papua Barat	1,060	1,931	0,914	13 814
Papua	0,716	1,061	0,866	28 842
INDONESIA	0,957	1,043	1,775	640 256

Keterangan: Estimasi dengan RSE 25% atau lebih besar akan mengalami kesalahan pengambilan sampel yang tinggi dan harus digunakan dengan hati-hati

Sumber: Susenas 2021

Tabel 6.1.2 *Sampling Error* Persentase Penduduk Perempuan yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,421	0,001	13,214
Sumatera Utara	0,752	0,001	9,134
Sumatera Barat	0,877	0,001	12,564
Riau	0,529	0,001	12,499
Jambi	0,538	0,001	19,654
Sumatera Selatan	0,454	0,001	14,539
Bengkulu	0,543	0,001	19,546
Lampung	0,586	0,001	12,289
Kep. Bangka Belitung	0,726	0,001	18,352
Kepulauan Riau	0,943	0,003	33,737
DKI Jakarta	0,634	0,001	13,481
Jawa Barat	0,652	0,001	8,028
Jawa Tengah	0,398	0,000	8,024
DI Yogyakarta	0,518	0,001	22,677
Jawa Timur	0,500	0,000	8,356
Banten	0,252	0,000	19,430
Bali	0,121	0,000	31,854
Nusa Tenggara Barat	1,259	0,002	12,428
Nusa Tenggara Timur	0,501	0,001	12,821
Kalimantan Barat	0,474	0,001	15,592
Kalimantan Tengah	0,376	0,001	17,577
Kalimantan Selatan	0,449	0,001	15,906
Kalimantan Timur	0,370	0,001	21,403
Kalimantan Utara	1,071	0,003	26,128
Sulawesi Utara	0,489	0,001	17,066
Sulawesi Tengah	0,692	0,001	14,001
Sulawesi Selatan	0,662	0,001	10,731
Sulawesi Tenggara	0,529	0,001	16,144
Gorontalo	0,682	0,002	27,597
Sulawesi Barat	0,442	0,001	22,338
Maluku	0,962	0,001	14,119
Maluku Utara	0,636	0,001	20,009
Papua Barat	0,605	0,001	18,047
Papua	0,565	0,001	13,362
INDONESIA	0,555	0,000	2,784



Tabel 6.1.2 *Sampling Error* Persentase Penduduk Perempuan yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2020 (lanjutan)

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
	Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	0,325	0,545	0,973	25 661
Sumatera Utara	0,629	0,900	1,489	42 440
Sumatera Barat	0,685	1,121	1,359	23 135
Riau	0,414	0,676	1,161	15 565
Jambi	0,366	0,791	1,326	12 619
Sumatera Selatan	0,342	0,604	1,395	20 441
Bengkulu	0,370	0,796	0,982	10 159
Lampung	0,461	0,746	1,327	18 541
Kep. Bangka Belitung	0,507	1,040	0,914	6 802
Kepulauan Riau	0,486	1,823	2,446	7 556
DKI Jakarta	0,486	0,825	1,706	9 967
Jawa Barat	0,557	0,762	2,212	43 654
Jawa Tengah	0,340	0,466	1,458	52 717
DI Yogyakarta	0,332	0,807	1,585	6 785
Jawa Timur	0,424	0,589	1,831	56 115
Banten	0,172	0,369	1,696	13 569
Bali	0,065	0,225	1,131	12 084
Nusa Tenggara Barat	0,987	1,606	1,577	12 069
Nusa Tenggara Timur	0,390	0,645	1,047	27 824
Kalimantan Barat	0,349	0,643	1,174	16 657
Kalimantan Tengah	0,266	0,530	0,847	13 777
Kalimantan Selatan	0,329	0,613	1,070	14 114
Kalimantan Timur	0,243	0,562	1,195	11 171
Kalimantan Utara	0,641	1,785	1,088	5 245
Sulawesi Utara	0,350	0,684	0,913	15 669
Sulawesi Tengah	0,526	0,911	0,993	14 532
Sulawesi Selatan	0,536	0,816	1,284	30 812
Sulawesi Tenggara	0,386	0,726	0,943	19 013
Gorontalo	0,397	1,170	1,210	6 660
Sulawesi Barat	0,285	0,685	0,850	7 154
Maluku	0,729	1,269	0,900	13 704
Maluku Utara	0,429	0,940	0,865	11 191
Papua Barat	0,425	0,862	0,670	13 390
Papua	0,435	0,734	0,881	26 449
INDONESIA	0,526	0,587	1,660	637 241

Keterangan: Estimasi dengan RSE 25% atau lebih besar akan mengalami kesalahan pengambilan sampel yang tinggi dan harus digunakan dengan hati-hati

Sumber: Susenas 2021

Tabel 6.1.3 *Sampling Error* Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,612	0,001	10,257
Sumatera Utara	0,966	0,001	6,394
Sumatera Barat	0,965	0,001	9,408
Riau	0,733	0,001	8,970
Jambi	0,792	0,001	12,153
Sumatera Selatan	1,065	0,001	7,039
Bengkulu	0,946	0,001	12,105
Lampung	0,998	0,001	7,549
Kep. Bangka Belitung	0,721	0,001	14,742
Kepulauan Riau	1,436	0,004	28,194
DKI Jakarta	0,865	0,001	9,467
Jawa Barat	0,897	0,000	5,509
Jawa Tengah	0,567	0,000	5,232
DI Yogyakarta	0,794	0,001	12,367
Jawa Timur	0,665	0,000	6,030
Banten	0,462	0,001	11,941
Bali	0,229	0,000	20,618
Nusa Tenggara Barat	1,493	0,001	8,639
Nusa Tenggara Timur	0,733	0,001	9,186
Kalimantan Barat	0,689	0,001	10,064
Kalimantan Tengah	0,546	0,001	13,419
Kalimantan Selatan	0,594	0,001	9,656
Kalimantan Timur	0,596	0,001	12,544
Kalimantan Utara	1,358	0,003	19,950
Sulawesi Utara	0,635	0,001	11,869
Sulawesi Tengah	1,172	0,001	9,040
Sulawesi Selatan	0,729	0,001	8,014
Sulawesi Tenggara	0,901	0,001	11,774
Gorontalo	0,589	0,001	19,668
Sulawesi Barat	0,584	0,001	14,732
Maluku	1,093	0,001	10,282
Maluku Utara	1,059	0,001	12,264
Papua Barat	1,035	0,001	12,129
Papua	0,726	0,001	9,839
INDONESIA	0,778	0,000	1,908

Tabel 6.1.3 *Sampling Error* Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Provinsi, 2020 (lanjutan)

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
	Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	0,501	0,748	1,288	51 031
Sumatera Utara	0,852	1,095	1,673	84 361
Sumatera Barat	0,802	1,160	1,507	45 577
Riau	0,615	0,874	1,402	31 519
Jambi	0,624	1,004	1,419	25 345
Sumatera Selatan	0,928	1,223	1,476	41 312
Bengkulu	0,746	1,199	1,151	20 774
Lampung	0,861	1,157	1,524	37 704
Kep. Bangka Belitung	0,540	0,962	1,049	14 076
Kepulauan Riau	0,825	2,488	3,586	15 117
DKI Jakarta	0,718	1,041	1,977	19 840
Jawa Barat	0,806	1,000	2,542	87 920
Jawa Tengah	0,511	0,628	1,600	104 439
DI Yogyakarta	0,623	1,012	1,510	13 334
Jawa Timur	0,591	0,748	2,142	111 016
Banten	0,366	0,584	2,015	27 418
Bali	0,153	0,343	1,430	24 311
Nusa Tenggara Barat	1,260	1,768	1,676	23 994
Nusa Tenggara Timur	0,613	0,878	1,278	54 910
Kalimantan Barat	0,565	0,839	1,304	33 914
Kalimantan Tengah	0,420	0,711	1,124	28 134
Kalimantan Selatan	0,491	0,718	1,062	28 316
Kalimantan Timur	0,466	0,762	1,281	22 779
Kalimantan Utara	0,918	2,005	1,360	10 891
Sulawesi Utara	0,503	0,801	1,034	31 782
Sulawesi Tengah	0,981	1,399	1,191	29 686
Sulawesi Selatan	0,623	0,852	1,408	60 072
Sulawesi Tenggara	0,715	1,135	1,273	37 666
Gorontalo	0,401	0,866	1,135	13 364
Sulawesi Barat	0,437	0,779	0,914	14 391
Maluku	0,894	1,337	0,995	27 481
Maluku Utara	0,833	1,347	0,979	22 528
Papua Barat	0,816	1,312	0,852	27 204
Papua	0,599	0,881	1,068	55 291
INDONESIA	0,749	0,808	1,910	1 277 497

Keterangan: Estimasi dengan RSE 25% atau lebih besar akan mengalami kesalahan pengambilan sampel yang tinggi dan harus digunakan dengan hati-hati

Sumber: Susenas 2021

Tabel 6.1.4 *Sampling Error* Persentase Penduduk Laki-laki yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	91,394	0,019	2,058
Sumatera Utara	94,878	0,016	1,676
Sumatera Barat	94,009	0,021	2,265
Riau	90,971	0,031	3,435
Jambi	86,840	0,048	5,501
Sumatera Selatan	93,178	0,020	2,096
Bengkulu	96,621	0,020	2,062
Lampung	88,912	0,027	2,996
Kep. Bangka Belitung	86,744	0,054	6,271
Kepulauan Riau	94,086	0,039	4,106
DKI Jakarta	86,578	0,035	4,098
Jawa Barat	90,476	0,017	1,889
Jawa Tengah	81,413	0,024	2,960
DI Yogyakarta	72,060	0,063	8,755
Jawa Timur	82,596	0,025	3,076
Banten	89,177	0,042	4,691
Bali	95,443	0,028	2,886
Nusa Tenggara Barat	89,532	0,032	3,629
Nusa Tenggara Timur	90,659	0,023	2,516
Kalimantan Barat	83,768	0,047	5,560
Kalimantan Tengah	88,457	0,047	5,301
Kalimantan Selatan	90,205	0,039	4,272
Kalimantan Timur	92,945	0,033	3,572
Kalimantan Utara	97,210	0,016	1,693
Sulawesi Utara	86,952	0,037	4,208
Sulawesi Tengah	94,555	0,020	2,145
Sulawesi Selatan	87,394	0,034	3,858
Sulawesi Tenggara	92,728	0,024	2,603
Gorontalo	85,907	0,062	7,183
Sulawesi Barat	91,508	0,043	4,722
Maluku	79,747	0,055	6,933
Maluku Utara	96,728	0,017	1,762
Papua Barat	65,858	0,089	13,561
Papua	89,836	0,026	2,935
INDONESIA	88,429	0,007	0,739



Tabel 6.1.4 *Sampling Error* Persentase Penduduk Laki-laki yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
	Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	86,921	94,435	0,659	176
Sumatera Utara	90,701	97,236	1,424	467
Sumatera Barat	88,204	97,053	1,023	206
Riau	82,696	95,504	1,325	148
Jambi	74,411	93,740	1,301	147
Sumatera Selatan	88,207	96,146	1,392	333
Bengkulu	89,632	98,954	0,859	137
Lampung	82,520	93,160	1,396	260
Kep. Bangka Belitung	72,135	94,299	0,789	48
Kepulauan Riau	80,309	98,414	1,647	53
DKI Jakarta	77,999	92,149	1,669	106
Jawa Barat	86,557	93,340	2,080	472
Jawa Tengah	76,222	85,683	1,473	368
DI Yogyakarta	58,253	82,660	1,359	75
Jawa Timur	77,043	87,031	1,812	409
Banten	77,890	95,067	1,882	88
Bali	85,821	98,639	0,762	36
Nusa Tenggara Barat	81,255	94,406	1,499	206
Nusa Tenggara Timur	85,128	94,271	0,853	227
Kalimantan Barat	72,504	90,991	1,287	135
Kalimantan Tengah	75,696	94,964	0,972	82
Kalimantan Selatan	79,660	95,586	1,092	115
Kalimantan Timur	83,001	97,263	1,072	81
Kalimantan Utara	91,382	99,134	0,519	73
Sulawesi Utara	77,981	92,614	0,722	127
Sulawesi Tengah	88,917	97,408	0,956	178
Sulawesi Selatan	79,187	92,664	1,263	227
Sulawesi Tenggara	86,340	96,258	0,817	183
Gorontalo	69,177	94,304	0,643	35
Sulawesi Barat	78,369	96,974	0,734	50
Maluku	66,808	88,510	0,966	134
Maluku Utara	91,142	98,836	0,619	151
Papua Barat	46,961	80,777	1,083	113
Papua	83,385	93,964	0,728	304
INDONESIA	87,086	89,649	1,586	5 950

Sumber: Susenas 2021

Tabel 6.1.5 *Sampling Error* Persentase Penduduk Perempuan yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	83,458	0,043	5,123
Sumatera Utara	91,764	0,022	2,397
Sumatera Barat	83,281	0,054	6,439
Riau	93,667	0,030	3,152
Jambi	70,088	0,100	14,316
Sumatera Selatan	84,383	0,043	5,127
Bengkulu	96,947	0,015	1,582
Lampung	85,391	0,048	5,594
Kep. Bangka Belitung	74,252	0,077	10,392
Kepulauan Riau	93,927	0,035	3,706
DKI Jakarta	92,217	0,029	3,185
Jawa Barat	80,501	0,032	4,002
Jawa Tengah	80,422	0,033	4,129
DI Yogyakarta	65,246	0,130	19,896
Jawa Timur	75,741	0,035	4,614
Banten	82,685	0,069	8,295
Bali	75,336	0,129	17,151
Nusa Tenggara Barat	86,948	0,047	5,406
Nusa Tenggara Timur	82,112	0,046	5,651
Kalimantan Barat	89,478	0,054	6,053
Kalimantan Tengah	76,687	0,066	8,630
Kalimantan Selatan	80,202	0,070	8,716
Kalimantan Timur	75,013	0,093	12,341
Kalimantan Utara	93,911	0,039	4,170
Sulawesi Utara	92,216	0,031	3,375
Sulawesi Tengah	93,042	0,031	3,283
Sulawesi Selatan	88,087	0,037	4,174
Sulawesi Tenggara	82,668	0,058	7,024
Gorontalo	85,644	0,091	10,573
Sulawesi Barat	68,681	0,122	17,735
Maluku	81,964	0,060	7,332
Maluku Utara	88,173	0,060	6,751
Papua Barat	63,896	0,087	13,692
Papua	89,655	0,030	3,334
INDONESIA	83,027	0,011	1,295

Tabel 6.1.5 *Sampling Error* Persentase Penduduk Perempuan yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2020 (lanjutan)

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
	Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	73,328	90,252	0,820	109
Sumatera Utara	86,297	95,172	1,261	293
Sumatera Barat	70,072	91,378	1,501	173
Riau	84,791	97,515	1,090	91
Jambi	47,832	85,690	1,431	73
Sumatera Selatan	73,949	91,138	1,108	94
Bengkulu	91,998	98,872	0,433	61
Lampung	73,397	92,528	1,413	106
Kep. Bangka Belitung	56,657	86,417	0,850	40
Kepulauan Riau	82,382	98,083	1,020	37
DKI Jakarta	84,158	96,354	1,342	72
Jawa Barat	73,411	86,059	2,167	277
Jawa Tengah	73,094	86,133	1,473	225
DI Yogyakarta	37,932	85,222	1,844	40
Jawa Timur	68,259	81,926	1,729	261
Banten	65,119	92,433	1,534	37
Bali	43,866	92,272	1,032	16
Nusa Tenggara Barat	74,734	93,751	1,707	135
Nusa Tenggara Timur	71,191	89,504	0,957	120
Kalimantan Barat	73,357	96,332	1,287	63
Kalimantan Tengah	61,421	87,173	0,730	51
Kalimantan Selatan	63,086	90,568	1,142	60
Kalimantan Timur	53,273	88,770	1,156	44
Kalimantan Utara	80,109	98,335	0,659	48
Sulawesi Utara	83,510	96,518	0,602	76
Sulawesi Tengah	84,134	97,120	0,823	89
Sulawesi Selatan	78,815	93,629	1,314	165
Sulawesi Tenggara	68,305	91,347	0,867	81
Gorontalo	58,472	96,194	1,095	39
Sulawesi Barat	41,949	86,937	0,967	31
Maluku	67,194	90,977	0,962	87
Maluku Utara	70,887	95,803	0,771	62
Papua Barat	45,696	78,823	0,655	64
Papua	82,168	94,220	0,626	191
INDONESIA	80,814	85,032	1,652	3 411

Sumber: Susenas 2021

Tabel 6.1.6 *Sampling Error* Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	88,659	0,021	2,334
Sumatera Utara	93,666	0,015	1,570
Sumatera Barat	89,113	0,030	3,350
Riau	91,925	0,023	2,479
Jambi	81,232	0,062	7,595
Sumatera Selatan	91,323	0,018	1,986
Bengkulu	96,713	0,014	1,498
Lampung	87,900	0,027	3,072
Kep. Bangka Belitung	80,626	0,051	6,344
Kepulauan Riau	94,034	0,030	3,220
DKI Jakarta	88,654	0,026	2,919
Jawa Barat	86,909	0,017	1,916
Jawa Tengah	81,062	0,020	2,529
DI Yogyakarta	69,821	0,062	8,918
Jawa Timur	79,985	0,021	2,657
Banten	87,436	0,036	4,125
Bali	90,166	0,036	4,046
Nusa Tenggara Barat	88,425	0,032	3,610
Nusa Tenggara Timur	87,710	0,025	2,809
Kalimantan Barat	85,701	0,037	4,349
Kalimantan Tengah	84,555	0,042	4,922
Kalimantan Selatan	86,463	0,035	4,057
Kalimantan Timur	87,571	0,039	4,444
Kalimantan Utara	95,975	0,019	1,945
Sulawesi Utara	88,940	0,029	3,212
Sulawesi Tengah	94,114	0,017	1,842
Sulawesi Selatan	87,716	0,030	3,405
Sulawesi Tenggara	89,782	0,026	2,853
Gorontalo	85,755	0,056	6,546
Sulawesi Barat	82,907	0,057	6,861
Maluku	80,711	0,046	5,667
Maluku Utara	94,204	0,023	2,446
Papua Barat	65,307	0,071	10,927
Papua	89,770	0,021	2,336
INDONESIA	86,509	0,006	0,693

Tabel 6.1.6 *Sampling Error* Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Pencurian Menurut Provinsi, 2020 (lanjutan)

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
	Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	83,929	92,128	0,793	285
Sumatera Utara	90,097	96,006	1,525	760
Sumatera Barat	81,745	93,736	1,482	379
Riau	86,182	95,408	1,264	239
Jambi	66,191	90,538	1,783	220
Sumatera Selatan	87,045	94,281	1,304	427
Bengkulu	92,330	98,628	0,746	198
Lampung	81,537	92,278	1,614	366
Kep. Bangka Belitung	68,654	88,774	0,891	88
Kepulauan Riau	84,546	97,846	1,567	90
DKI Jakarta	82,514	92,826	1,646	178
Jawa Barat	83,287	89,843	2,200	749
Jawa Tengah	76,715	84,759	1,548	593
DI Yogyakarta	56,450	80,504	1,601	115
Jawa Timur	75,494	83,830	1,825	670
Banten	78,522	92,981	1,778	125
Bali	80,365	95,357	0,823	52
Nusa Tenggara Barat	80,564	93,368	1,864	341
Nusa Tenggara Timur	82,012	91,784	1,009	347
Kalimantan Barat	76,755	91,582	1,334	198
Kalimantan Tengah	74,562	91,092	0,933	133
Kalimantan Selatan	78,018	91,997	1,092	175
Kalimantan Timur	77,755	93,422	1,166	125
Kalimantan Utara	90,238	98,400	0,624	121
Sulawesi Utara	81,985	93,425	0,768	203
Sulawesi Tengah	89,646	96,724	0,936	267
Sulawesi Selatan	80,570	92,479	1,546	392
Sulawesi Tenggara	83,560	93,823	0,883	264
Gorontalo	70,977	93,679	0,896	74
Sulawesi Barat	68,830	91,419	0,907	81
Maluku	70,170	88,156	1,083	221
Maluku Utara	87,662	97,381	0,760	213
Papua Barat	50,378	77,730	1,017	177
Papua	84,867	93,211	0,727	495
INDONESIA	85,290	87,641	1,697	9 361

Sumber: Susenas 2021

Tabel 6.1.7 *Sampling Error* Persentase Penduduk Laki-laki yang Pernah Melaporkan Kejadian Kejahatan Menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	13,595	0,050	36,583
Sumatera Utara	21,106	0,032	15,234
Sumatera Barat	24,707	0,042	16,878
Riau	28,429	0,051	18,066
Jambi	16,996	0,042	24,506
Sumatera Selatan	29,222	0,036	12,332
Bengkulu	16,614	0,033	19,669
Lampung	19,794	0,033	16,582
Kep. Bangka Belitung	16,942	0,057	33,759
Kepulauan Riau	30,337	0,166	54,561
DKI Jakarta	31,001	0,051	16,465
Jawa Barat	26,669	0,026	9,747
Jawa Tengah	22,668	0,027	11,992
DI Yogyakarta	19,962	0,062	30,851
Jawa Timur	27,149	0,033	12,189
Banten	29,677	0,061	20,416
Bali	12,643	0,053	41,583
Nusa Tenggara Barat	14,023	0,031	21,847
Nusa Tenggara Timur	16,618	0,034	20,243
Kalimantan Barat	20,880	0,045	21,362
Kalimantan Tengah	15,882	0,046	29,094
Kalimantan Selatan	24,346	0,048	19,720
Kalimantan Timur	24,778	0,060	24,354
Kalimantan Utara	16,151	0,049	30,268
Sulawesi Utara	29,576	0,056	18,769
Sulawesi Tengah	20,905	0,035	16,902
Sulawesi Selatan	22,067	0,038	17,174
Sulawesi Tenggara	21,544	0,039	18,331
Gorontalo	27,498	0,106	38,531
Sulawesi Barat	9,004	0,043	47,872
Maluku	25,160	0,067	26,460
Maluku Utara	18,349	0,044	23,894
Papua Barat	35,681	0,075	21,144
Papua	23,235	0,042	17,981
INDONESIA	24,213	0,010	3,942



Tabel 6.1.7 *Sampling Error* Persentase Penduduk Laki-laki yang Pernah Melaporkan Kejadian Kejahatan Menurut Provinsi, 2020 (lanjutan)

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
	Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	6,420	26,516	1,427	176
Sumatera Utara	15,485	28,090	1,556	467
Sumatera Barat	17,454	33,741	1,102	206
Riau	19,496	39,450	1,383	148
Jambi	10,296	26,754	1,021	147
Sumatera Selatan	22,685	36,748	1,424	333
Bengkulu	11,148	24,034	0,684	137
Lampung	14,130	27,014	1,355	260
Kep. Bangka Belitung	8,420	31,154	0,750	48
Kepulauan Riau	8,575	66,911	3,621	53
DKI Jakarta	21,962	41,769	1,770	106
Jawa Barat	21,891	32,062	2,100	472
Jawa Tengah	17,782	28,432	1,544	368
DI Yogyakarta	10,486	34,683	1,490	75
Jawa Timur	21,164	34,095	2,012	409
Banten	19,281	42,712	1,854	88
Bali	5,385	26,898	0,913	36
Nusa Tenggara Barat	9,017	21,161	1,246	206
Nusa Tenggara Timur	11,018	24,288	0,984	227
Kalimantan Barat	13,453	30,941	1,118	135
Kalimantan Tengah	8,746	27,111	0,838	82
Kalimantan Selatan	16,182	34,914	0,942	115
Kalimantan Timur	14,865	38,325	1,156	81
Kalimantan Utara	8,669	28,103	0,690	73
Sulawesi Utara	19,940	41,457	0,809	127
Sulawesi Tengah	14,810	28,665	0,930	178
Sulawesi Selatan	15,528	30,370	1,136	227
Sulawesi Tenggara	14,799	30,272	0,844	183
Gorontalo	11,801	51,808	0,861	35
Sulawesi Barat	3,408	21,725	0,713	50
Maluku	14,391	40,203	1,077	134
Maluku Utara	11,239	28,512	0,733	151
Papua Barat	22,554	51,380	0,906	113
Papua	16,053	32,391	0,825	304
INDONESIA	22,391	26,133	1,731	5 950

Keterangan: Estimasi dengan RSE 25% atau lebih besar akan mengalami kesalahan pengambilan sampel yang tinggi dan harus digunakan dengan hati-hati

Sumber: Susenas 2021

Tabel 6.1.8 *Sampling Error* Persentase Penduduk Perempuan yang Pernah Melaporkan Kejadian Kejahatan Menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	12,713	0,036	28,672
Sumatera Utara	17,674	0,035	19,911
Sumatera Barat	27,528	0,048	17,388
Riau	26,105	0,059	22,542
Jambi	15,214	0,056	36,663
Sumatera Selatan	31,270	0,073	23,459
Bengkulu	20,045	0,063	31,599
Lampung	16,471	0,043	25,878
Kep. Bangka Belitung	11,884	0,055	46,682
Kepulauan Riau	35,920	0,171	47,475
DKI Jakarta	31,595	0,059	18,795
Jawa Barat	21,615	0,031	14,250
Jawa Tengah	19,846	0,032	16,218
DI Yogyakarta	24,553	0,090	36,612
Jawa Timur	21,932	0,032	14,812
Banten	38,135	0,089	23,389
Bali	26,295	0,136	51,749
Nusa Tenggara Barat	10,227	0,030	29,027
Nusa Tenggara Timur	14,512	0,037	25,363
Kalimantan Barat	15,743	0,055	35,209
Kalimantan Tengah	26,349	0,067	25,439
Kalimantan Selatan	23,502	0,065	27,662
Kalimantan Timur	31,560	0,102	32,222
Kalimantan Utara	10,794	0,052	48,599
Sulawesi Utara	27,591	0,085	30,957
Sulawesi Tengah	25,543	0,056	21,769
Sulawesi Selatan	28,136	0,046	16,278
Sulawesi Tenggara	28,830	0,072	25,141
Gorontalo	33,661	0,170	50,553
Sulawesi Barat	19,448	0,079	40,793
Maluku	19,203	0,069	36,173
Maluku Utara	12,978	0,047	35,945
Papua Barat	41,153	0,079	19,261
Papua	13,177	0,031	23,533
INDONESIA	22,102	0,011	5,008

Tabel 6.1.8 *Sampling Error* Persentase Penduduk Perempuan yang Pernah Melaporkan Kejadian Kejahatan Menurut Provinsi, 2020 (lanjutan)

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
	Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	7,106	21,710	0,780	109
Sumatera Utara	11,787	25,646	1,454	293
Sumatera Barat	19,180	37,810	1,120	173
Riau	16,266	39,115	1,205	91
Jambi	7,138	29,521	1,014	73
Sumatera Selatan	18,898	47,043	1,470	94
Bengkulu	10,356	35,236	0,769	61
Lampung	9,701	26,576	1,201	106
Kep. Bangka Belitung	4,556	27,591	0,826	40
Kepulauan Riau	11,596	70,549	2,489	37
DKI Jakarta	21,230	44,181	1,564	72
Jawa Barat	16,184	28,255	1,994	277
Jawa Tengah	14,275	26,908	1,420	225
DI Yogyakarta	11,166	45,729	1,413	40
Jawa Timur	16,225	28,952	1,665	261
Banten	22,706	56,397	1,554	37
Bali	8,263	58,558	1,064	16
Nusa Tenggara Barat	5,699	17,676	1,198	135
Nusa Tenggara Timur	8,667	23,294	0,826	120
Kalimantan Barat	7,609	29,770	1,110	63
Kalimantan Tengah	15,381	41,318	0,710	51
Kalimantan Selatan	13,135	38,432	0,998	60
Kalimantan Timur	15,485	53,716	1,183	44
Kalimantan Utara	3,992	26,038	0,680	48
Sulawesi Utara	14,149	46,836	0,990	76
Sulawesi Tengah	16,206	37,833	0,875	89
Sulawesi Selatan	20,072	37,903	1,179	165
Sulawesi Tenggara	16,851	44,741	0,904	81
Gorontalo	10,226	69,328	1,527	39
Sulawesi Barat	8,211	39,451	0,738	31
Maluku	8,992	36,374	1,086	87
Maluku Utara	6,223	25,104	0,581	62
Papua Barat	26,908	57,053	0,579	64
Papua	8,191	20,522	0,585	191
INDONESIA	20,008	24,348	1,539	3 411

Keterangan: Estimasi dengan RSE 25% atau lebih besar akan mengalami kesalahan pengambilan sampel yang tinggi dan harus digunakan dengan hati-hati

Sumber: Susenas 2021

Tabel 6.1.9 *Sampling Error* Persentase Penduduk yang Pernah Melaporkan Kejadian Kejahatan Menurut Provinsi, 2020

Provinsi	Nilai Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error (RSE)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	13.291	0.039	fff9e1
Sumatera Utara	19.771	0.026	13.161
Sumatera Barat	25.995	0.034	13.147
Riau	27.607	0.040	14.369
Jambi	16.399	0.035	21.077
Sumatera Selatan	29.654	0.033	11.263
Bengkulu	17.576	0.033	18.832
Lampung	18.839	0.026	13.799
Kep, Bangka Belitung	14.465	0.041	28.430
Kepulauan Riau	32.160	0.159	49.541
DKI Jakarta	31.220	0.041	13.097
Jawa Barat	24.862	0.022	8.774
Jawa Tengah	21.670	0.022	10.011
DI Yogyakarta	21.471	0.053	24.643
Jawa Timur	25.162	0.026	10.464
Banten	31.945	0.053	16.478
Bali	16.225	0.052	32.311
Nusa Tenggara Barat	12.396	0.022	18.056
Nusa Tenggara Timur	15.892	0.028	17.485
Kalimantan Barat	19.141	0.036	18.725
Kalimantan Tengah	19.352	0.043	21.993
Kalimantan Selatan	24.031	0.041	16.867
Kalimantan Timur	26.810	0.056	21.071
Kalimantan Utara	14.145	0.034	24.251
Sulawesi Utara	28.826	0.061	21.045
Sulawesi Tengah	22.256	0.032	14.378
Sulawesi Selatan	24.886	0.032	12.766
Sulawesi Tenggara	23.678	0.036	15.143
Gorontalo	31.057	0.111	35.621
Sulawesi Barat	12.939	0.043	33.471
Maluku	22.570	0.055	24.298
Maluku Utara	16.765	0.034	20.299
Papua Barat	37.218	0.060	16.184
Papua	19.522	0.033	16.730
INDONESIA	23.463	0.008	3.402



Tabel 6.1.9 *Sampling Error* Persentase Penduduk yang Pernah Melaporkan Kejadian Kejahatan Menurut Provinsi, 2020 (lanjutan)

Provinsi	Selang Kepercayaan		Efek Rancangan Sampling	Jumlah Sampel
	Batas Bawah	Batas Atas		
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	7,350	22,849	1,385	285
Sumatera Utara	15,158	25,368	1,651	760
Sumatera Barat	19,869	33,226	1,205	379
Riau	20,535	36,010	1,341	239
Jambi	10,688	24,332	1,053	220
Sumatera Selatan	23,547	36,587	1,480	427
Bengkulu	11,991	25,022	0,798	198
Lampung	14,260	24,468	1,296	366
Kep. Bangka Belitung	8,100	24,497	0,805	88
Kepulauan Riau	10,174	66,489	4,180	90
DKI Jakarta	23,809	39,734	1,780	178
Jawa Barat	20,835	29,379	2,250	749
Jawa Tengah	17,718	26,222	1,558	593
DI Yogyakarta	12,876	33,591	1,520	115
Jawa Timur	20,358	30,664	2,085	670
Banten	22,601	43,006	1,844	125
Bali	8,335	29,205	0,956	52
Nusa Tenggara Barat	8,631	17,488	1,269	341
Nusa Tenggara Timur	11,166	22,119	1,022	347
Kalimantan Barat	13,069	27,152	1,142	198
Kalimantan Tengah	12,326	29,055	0,873	133
Kalimantan Selatan	16,991	32,833	1,010	175
Kalimantan Timur	17,241	39,177	1,260	125
Kalimantan Utara	8,651	22,278	0,647	121
Sulawesi Utara	18,490	41,966	1,129	203
Sulawesi Tengah	16,612	29,148	0,978	267
Sulawesi Selatan	19,187	31,615	1,248	392
Sulawesi Tenggara	17,373	31,401	0,881	264
Gorontalo	14,060	55,365	1,334	74
Sulawesi Barat	6,537	24,001	0,774	81
Maluku	13,612	35,034	1,225	221
Maluku Utara	11,101	24,521	0,702	213
Papua Barat	26,342	49,562	0,845	177
Papua	13,896	26,719	0,865	495
INDONESIA	21,934	25,063	1,822	9 361

Keterangan: Estimasi dengan RSE 25% atau lebih besar akan mengalami kesalahan pengambilan sampel yang tinggi dan harus digunakan dengan hati-hati

Sumber: Susenas 2021

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046
Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsdq@bps.go.id

